

SKRIPSI
DINAMIKA KONFLIK POLITIK ALI BIN ABI THALIB –
MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN TERHADAP PERUBAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM ABAD VII M



OLEH
NURBAITI
NIM 2220203880230011

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026 M/1448 H

**DINAMIKA KONFLIK POLITIK ALI BIN ABI THALIB –
MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN TERHADAP PERUBAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM ABAD VII M**



OLEH

NURBAITI

NIM 2220203880230011

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora
(S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026 M/1448 H**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dinamika Konflik Politik Ali bin Abi Thalib -
Muawiyah bin Abi Sufyan Terhadap Perubahan
Sistem Pemerintahan Islam Abad VII M

Nama Mahasiswa : Nurbaiti

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203880230011

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
No. B-1254/In.39/FUAD.03/PP.00.09/05/2025

Pembimbing Utama : Disetujui Oleh:
Usman, M. Hum

NIP : 199004122020121012

(.....)

Mengetahui:



Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. Heger Hiddin, Lc., M. Fil.I R
NIP. 19760713 200912 1002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dinamika Konflik Politik Ali bin Abi Thalib –
Muawiyah bin Abi Sufyan Terhadap Perubahan
Sistem Pemerintahan Islam abad VII M

Nama Mahasiswa : Nurbaiti

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203880230011

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Penguji : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
No. B-1254/In.39/FUAD.03/PP.00.09/05/2025

Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2026

Disetujui Oleh:

Usman, M. Hum

(Ketua)

(.....)

Dr. Musyarif, S.Ag, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Saidin Hamzah, M. Hum

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Muhiddin, Lc., M. Fil.I.
NIP. 197 60713 200912 1002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Tiada kata yang pantas penulis haturkan melainkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, kesehatan, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.) pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa kebersamai penulis selama proses penyusunannya.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Badaruddin dan Ibunda Nurmiati, yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan inspirasi dalam setiap perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, setiap pengorbanan yang diberikan tanpa pamrih, setiap nasihat yang selalu menguatkan, serta cinta yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa hormat, cinta, dan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah mengantarkan penulis sampai pada tahap ini, meskipun penulis menyadari bahwa seluruh pencapaian ini tidak akan pernah sebanding dengan segala kasih sayang dan perjuangan yang telah mereka berikan. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Usman, M.Hum., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap saran, kritik yang membangun, serta ilmu yang beliau berikan

menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

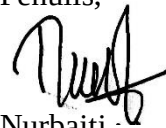
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare, Ibu Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Ibu. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor II Bidang Akademik Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. H. Muhiddin, Lc., M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Bapak Dr. Ahmad Yani, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AKKK), serta Bapak Dr. H. M. Ihsan Darwis, M.Si., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK), atas pengabdian dan dedikasinya dalam menciptakan suasana pendidikan yang kondusif serta memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa.
3. Bapak Saidin Hamzah, M. Hum. sebagai ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah meluangkan waktu dan mendidik serta telah mengembangkan program studi Sejarah Peradaban Islam.
4. Bapak Dr. Nurkidam, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan support dan motivasi kepada penulis mulai dari Mahasiswa baru sampai dengan Penulisan Skripsi.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah mendidik penulis mulai dari semester 1-6 yang sabar dalam mendidik dan mempunyai kehebatan tersendiri dalam materi perkuliahan sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi.

6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai ke berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
8. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak tercinta, Nurhadi dan Misrawati, yang telah menjadi salah satu sumber kekuatan dalam perjalanan akademik penulis.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan, Mariana dan Zulpiana Wahid, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak masa awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Parepare, 11 Mei 2026 M
23 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis,



Nurbaiti

NIM: 2220203880230011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurbaiti
NIM : 2220203880230011
Tempat/Tgl Lahir : Salupangi, 11 Agustus 2004
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Dinamika Konflik Politik Ali bin Abi Thalib –
Muawiyah bin Abi Sufyan Terhadap Perubahan
Sistem Pemerintahan Islam abad VII M

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya sebagai jaminan bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil plagiasi dalam bentuk apa pun. Apabila ditemukan ketidakjujuran akademik di masa depan, saya menerima sepenuhnya bahwa hak atas skripsi dan gelar akademik yang saya sandang akan dicabut secara otomatis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Parepare, 11 Mei 2026 M

Penyusun,



Nurbaiti

NIM: 2220203880230011

ABSTRAK

Nurbaiti, *Dinamika Konflik Politik Ali bin Abi Thalib – Muawiyah bin Abi Sufyan Terhadap Perubahan Sistem Pemerintahan Islam Abad VII M* (dibimbing oleh Usman selaku pembimbing Skripsi).

Penelitian ini mengkaji dinamika konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan serta dampaknya terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam pada abad VII M. Konflik tersebut berakar pada krisis legitimasi kepemimpinan pasca wafatnya Utsman bin Affan yang memunculkan perbedaan pandangan mengenai penyelesaian kasus pembunuhannya, pengakuan terhadap kepemimpinan Ali, serta tuntutan politik yang diajukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah tuntutan Muawiyah untuk menegakkan qisas atas darah Utsman murni didasarkan pada upaya menuntut keadilan, atau juga tidak terlepas dari kepentingan politik untuk memperoleh dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Perbedaan kepentingan tersebut berkembang menjadi konflik terbuka yang ditandai dengan Perang Shiffin, dan peristiwa tahkim, yang kemudian menyebabkan fragmentasi politik umat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis dan politik. Pengumpulan data dilakukan melalui metode heuristik, yang kemudian diuji melalui kritik sumber, dianalisis dengan interpretasi, dan diakhiri dengan tahapan historiografi. Sumber utama yang digunakan adalah *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* karya al-Tabari dan *Al-Bidayah wa al-Nihayah* karya Ibnu Katsir, serta didukung literatur sekunder yang relevan. Analisis diperdalam dengan menggunakan teori legitimasi kekuasaan Max Weber dan teori konflik Ralf Dahrendorf

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak sekadar dipicu oleh persoalan hukum atas pembunuhan Utsman bin Affan, melainkan oleh benturan konsep legitimasi politik pada masa transisi. Tuntutan qisas Muawiyah merupakan perpaduan antara penegakan keadilan dan kepentingan politik yang berjalan beriringan. Ali mendasarkan legitimasi kekuasaannya pada baiat melalui mekanisme syura, sedangkan Muawiyah mengaitkannya dengan tuntutan qisas. Perbedaan prinsip ini menggagalkan diplomasi hingga memicu Perang Shiffin. Meskipun dihentikan melalui tahkim, konflik tersebut memperdalam perpecahan umat, melemahkan posisi politik Ali, dan menjadi faktor kunci pergeseran sistem pemerintahan Islam dari syura menuju sistem dinasti pada masa Bani Umayyah.

Kata kunci: Ali bin Abi Thalib, Dinamika, Muawiyah bin Abi Sufyan, Pemerintahan Islam, Politik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	23
A. Latar Belakang Masalah	23
B. Rumusan Masalah.....	31
C. Tujuan Penelitian	31
D. Manfaat Penelitian	31
E. Definisi Istilah / Pengertian Judul.....	32
F. Tinjauan Penelitian Relevan	35
G. Landasan Teori	39
H. Metode Penelitian	46
BAB II DINAMIKA KONFLIK POLITIK ALI BIN ABI THALIB – MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN ABAD VII M.....	61
A. Kondisi Politik Masa Khalifah Utsman Bin Affan sebagai akar konflik Ali bin Abi Thalib – Muawiyah bin Abi Sufyan.....	61
B. Perkembangan Awal Konflik Politik umat Islam.....	71
BAB III DAMPAK DINAMIKA KONFLIK POLITIK TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM ABAD VII M	89

A.	Motif dibalik konflik Ali bin Abi Thalib – Muawiyah bin Abi Sufyan	89
B.	Jalannya Perang Nahrawan.....	112
C.	Pembunuhan Ali bin Abi Thalib.....	1187
D.	Pengangkatan Hasan bin Ali sebagai khalifah dan penyerahan kekuasaan pada Muawiyah bin Abi Sufyan.....	1210
E.	Dampak Konflik: Munculnya Tiga Golongan dan Pergeseran Pusat Kekuasaan Islam.....	105
F.	Perubahan sistem pemerintahan dari Syura ke Monarki	130
BAB IV	PENUTUP	137
A.	Simpulan	137
B.	Saran	138
DAFTAR PUSTAKA		139
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....		143
BIODATA PENULIS		VI

DAFTAR TABEL

No Tabel	Daftar Tabel	Halaman
1.1	Persamaan Dan Perbedaan Peneliatan	12-16

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Buku Fisik	Terlampir
2.	E-Book	Terlampir
3.	SK Pembimbing	Terlampir
4.	Turnitin	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem Konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lainnya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wa
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawali kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gambaran antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَافٍ:Kaifa

حَوْلٍ:Haula

c. *Madda*

Madda atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ :māta

رمى	:ramā
قيل	:qīla
يموت	:yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi Untuk *tamarbutah* ada dua:

- 1) *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Tamarbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah. Maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah
الْحِكْمَةُ	:al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:Rabbanā
نَجَّيْنَا	:Najjainā
الْحَقُّ	:al-haqq
الْحَجُّ	:al-hajj

نُعَم : *nu ‘ima*
عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunti huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’’murūna*
النَّوْعُ : *al-nau’’*
شَيْءٌ : *syai’’un*

أُمرت : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar Qur'an), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi „umum al-lafzlābi khusus al-sabab.

i. *Lafzal-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللهِ : *Dīnullah*

بِالله : *Billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Humfīrahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, baik huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi.,alinnāsilladhībīBakkatamubārakan Syahru

Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur''an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

*Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad
Ibnu)*

*NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd
(bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)*

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt.	= <i>subḥānahūwata,,āla</i>
Saw	= <i>ṣallallāhu ,,alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>,,alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/...,ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks refrensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan merupakan elemen fundamental dalam kehidupan suatu bangsa. Fungsi pemerintahan sangat luas dan penting, berperan sebagai pengatur yang menetapkan kebijakan dan aturan demi keteraturan sosial dan politik. Selain itu, pemerintahan berfungsi sebagai penegak hukum untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan pemelihara ketertiban untuk menjaga keamanan dan ketenangan bersama.¹ Kestabilan pemerintahan sangatlah krusial, sebab tanpa stabilitas, proses pembangunan dan kemajuan akan terhambat.

Dalam perspektif etika politik Islam, seorang pemimpin yang ideal memegang tanggung jawab moral dan spiritual sebagai pengayom masyarakat yang mengedepankan prinsip keadilan (*Al-Adl*) dan kebijaksanaan (*Hikmah*) di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Kepemimpinan ini bukan sekadar tentang kekuasaan, melainkan sebuah amanah untuk menjaga kemaslahatan umat (*Maslahah*) melalui perlindungan hak, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.²

Untuk mewujudkan stabilitas tersebut, pemimpin dituntut menggunakan mekanisme musyawarah (*Shura*) dalam setiap pengambilan keputusan serta mengedepankan pendekatan diplomatik melalui rekonsiliasi (*Sulh*) saat menghadapi konflik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral tersebut, seorang pemimpin dapat

¹ Muhadam Labolo, "*Memahami Ilmu Pemerintahan*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 36-37.

² Kurniati Sekarwangi and Yusril, "Peran Pemimpin Dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional : Perspektif Etika Politik Islam The Role of Leaders in Handling National Security Conflicts : An Islamic Political Ethics Perspective," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024), h. 202–217.

menciptakan tatanan pemerintahan yang harmonis dan berkeadilan sebagai fondasi perdamaian jangka panjang.

Dalam konteks pemerintahan Islam, konsep kepemimpinan ideal diwujudkan melalui prinsip syura atau musyawarah yang menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan kolektif. Mekanisme syura ini merupakan sarana untuk mencapai mufakat demi kemaslahatan umat. Prinsip ini menunjukkan bahwa kedaulatan dalam Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang wajib mengedepankan partisipasi publik serta nilai-nilai keadilan.³ Dengan demikian, kepemimpinan Islam pada masa awal sangat menekankan pentingnya transparansi dan persetujuan bersama, di mana seorang pemimpin memegang amanah untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan moralitas dan tanggung jawab sosial demi menciptakan tatanan masyarakat yang stabil dan adil, selaras dengan penegasan dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38 yang menyatakan bahwa urusan-urusan umat diselesaikan melalui musyawarah di antara mereka.

Allah Subhanu Wa Taala berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.⁴

Penerapan prinsip kepemimpinan ideal ini tercermin secara historis pada masa Khulafaurrasyidin, di mana suksesi kepemimpinan dan pengambilan kebijakan strategis

³ Muslim Societies et al., "Konsep Demokrasi Dalam Perspektif Islam Dan Barat," *Al-Bayan Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 01 (2025): h. 67–77.

⁴ Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

dilakukan melalui mekanisme musyawarah demi menjamin legitimasi dan keadilan bagi seluruh umat. Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, sistem pemerintahan menunjukkan stabilitas yang signifikan karena kepemimpinan yang dijalankan sangat berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah*) serta penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.⁵

Persoalan pergantian kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. menjadi salah satu fase yang paling menentukan dalam perkembangan sejarah politik Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, proses pengangkatan khalifah belum didasarkan pada satu mekanisme yang berlaku secara tetap sehingga setiap pergantian kepemimpinan berlangsung melalui cara yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa proses suksesi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pemimpin, tetapi juga menyangkut persoalan legitimasi kekuasaan, musyawarah (*syura*), baiat, serta hubungan antarkelompok dalam masyarakat Islam.

Keberagaman mekanisme suksesi tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Islam pada masa awal berupaya mengedepankan prinsip musyawarah dan partisipasi dalam menentukan pemimpin. Namun, di sisi lain, tidak adanya sistem suksesi yang disepakati secara permanen juga membuka ruang bagi munculnya perbedaan kepentingan politik yang pada akhirnya berkembang menjadi konflik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemimpin, tetapi juga oleh kejelasan mekanisme pergantian kekuasaan yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

⁵ Susmihara, Rahmat "*Sejarah Islam Klasik*" (Makassar: Ombak, 2013). h. 85-86.

Pengalaman politik pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan gambaran bahwa praktik pemerintahan Islam awal mengandung nilai-nilai penting, seperti musyawarah, partisipasi, dan pengawasan terhadap pemimpin. Akan tetapi, pengalaman tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ketika dasar legitimasi kepemimpinan diperdebatkan dan tidak memperoleh penerimaan yang luas, potensi konflik politik akan semakin besar. Oleh karena itu, dinamika suksesi pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, hingga Ali menjadi bagian penting dalam memahami perkembangan sistem pemerintahan Islam, termasuk perubahan politik yang terjadi pada masa berikutnya.⁶

Namun, memasuki masa pemerintahan Utsman bin Affan, tatanan politik mulai menghadapi tantangan kompleks seiring munculnya ketegangan yang dipicu oleh tuduhan nepotisme dan ketidakpuasan administratif di beberapa wilayah kekuasaan Islam. Dinamika politik tersebut memicu fragmentasi sosial dan konflik internal yang tajam, yang pada akhirnya berujung pada peristiwa tragis terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, sebuah titik balik yang menandai berakhirnya stabilitas politik kolektif di masa awal Islam.⁷

Tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menjadi titik awal krisis politik mendalam yang menandai dimulainya periode *Al-Fitnah Al-Kubra* dalam sejarah Islam. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (656–661 M) kemudian menjadi periode yang penuh gejolak, di mana kepemimpinannya harus berhadapan dengan situasi keamanan nasional yang tidak stabil dan fragmentasi politik yang tajam. Tantangan utama yang dihadapi Ali adalah adanya tuntutan keras terkait penegakan hukum atas pembunuhan

⁶ Musyarif, “Politik Suksesi Dari Abu Bakar Hingga Ali: Konflik, Demokrasi Awal, Dan Warisan Bagi Dunia Islam Modern” (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2026), <https://omp.iainpare.ac.id/index.php/ipnpress/catalog/book/325>.

⁷ Adelia Ramzar et al., “Pemikiran Politik Pada Masa Khulafaurasyidin,” *Jurnal Ilmiah Multidispilin Ilmu* 2, no. 2 (2025): h. 44–49.

Utsman, yang memicu perbedaan pandangan mendasar mengenai prioritas antara stabilitas pemerintahan dan keadilan hukum.

Eskalasi konflik ini kemudian melahirkan serangkaian konfrontasi besar, seperti Perang Jamal yang melibatkan faksi Thalhah, Zubair, dan Aisyah, serta Perang Shiffin yang mempertemukan kekuatan Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Rangkaian peristiwa ini mencerminkan dinamika perebutan pengaruh dan perbedaan ijtihad politik yang berdampak luas pada sistem pemerintahan Islam di masa-masa setelahnya.⁸

Konflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah politik Islam yang melampaui sekadar perselisihan kekuasaan. Pertempuran Shiffin pada tahun 657 M menjadi puncak dari ketegangan ini, di mana upaya penyelesaian konflik ditempuh melalui mekanisme *tahkim* atau arbitrase sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan perdamaian dalam Islam.

Namun, proses *tahkim* tersebut justru menjadi titik balik yang memperdalam polarisasi di dalam tubuh umat. Alih-alih menghasilkan stabilitas, keputusan tersebut memicu fragmentasi ideologis dengan lahirnya kelompok Khawarij yang menolak hasil arbitrase, serta semakin menguatnya faksi Syiah dan pendukung Muawiyah. Peristiwa ini memberikan pelajaran historis yang mendalam bahwa penyelesaian konflik yang tidak mencapai konsensus menyeluruh dapat melemahkan persatuan nasional dan meninggalkan warisan perpecahan yang berdampak panjang pada tatanan pemerintahan serta sistem hukum Islam di masa depan.

Jika kita membandingkan antara kepemimpinan ideal dalam Islam dengan kenyataan sejarah yang terjadi, tampak sebuah jarak yang cukup lebar antara harapan

⁸ Rahmat Hidayat et al., "Peristiwa Fitnah Kubro : Sejarah Dakwah Yang Harus Diluruskan," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2025): h. 8–16.

dan realitas. Konsep *syura* yang seharusnya menjadi ruang diskusi dan mufakat untuk mencapai stabilitas, pada praktiknya justru berhadapan dengan situasi politik yang sangat kompleks. Harapan masyarakat akan hadirnya pemimpin yang adil dan berwibawa sering kali harus berbenturan dengan kenyataan berupa ketegangan politik, dinamika perebutan pengaruh, serta perpecahan di dalam tubuh umat sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya sebuah kesenjangan (*gap*) yang nyata antara nilai-nilai luhur pemerintahan Islam secara teoretis dengan praktik politik yang terjadi di lapangan.

Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut memberikan gambaran bahwa implementasi sistem kepemimpinan yang ideal tidaklah mudah, karena selalu dipengaruhi oleh berbagai kepentingan kelompok dan perbedaan sudut pandang dalam merespons sebuah krisis. Fenomena ini menegaskan bahwa realitas sejarah sering kali menjadi ujian berat bagi prinsip-prinsip musyawarah dan keadilan yang telah digariskan oleh agama. Lebih jauh lagi, konflik ini membawa dampak fundamental terhadap transformasi sistem pemerintahan Islam. Berdasarkan catatan sejarah, masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) menjadi titik awal berdirinya Kekhalifahan Bani Umayyah yang mengubah tatanan politik secara drastis. Sistem yang sebelumnya berbasis musyawarah dan kesepakatan kolektif mengalami pergeseran menuju sistem monarki atau kekuasaan dinasti. Perubahan ini menjadi titik balik penting karena pola kepemimpinan tidak lagi ditentukan melalui pemilihan bersama oleh umat, melainkan beralih menjadi sistem turun-temurun (*hereditary monarch*).⁹

Dalam praktiknya, Muawiyah melakukan sentralisasi kekuasaan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus untuk memperkuat kontrol politik serta

⁹ Mochammad Ardika Akbar Bestari, Ala Abd., and Rochimah, "Dinamika Kekhalifahan Islam Bani Umayyah Di Masa Pemerintahan Muawiyah Bin Abi Sufyan (661-680 M): Pengaruh Politik , Sosial Dan Budaya," *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 1 (2024): h. 910–920.

stabilitas wilayah yang semakin luas. Perubahan struktural ini tidak hanya memengaruhi mekanisme suksesi kepemimpinan, tetapi juga mengubah wajah pemerintahan Islam dari yang semula sangat menekankan prinsip kesederhanaan dan demokrasi religius menjadi sistem yang lebih formal dan administratif layaknya kekaisaran besar. Fenomena ini menegaskan bahwa dinamika politik pada abad ke-7 telah menciptakan pergeseran paradigma yang mendalam, di mana stabilitas nasional dan keberlangsungan kekuasaan mulai diprioritaskan melalui pembentukan dinasti politik.

Beberapa peneliti terdahulu telah menelaah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dari sudut pandang yang berbeda. Deddi Fasmadhy Satiadharmanto dkk. (2024), misalnya, menyoroti penerapan *tahkim* (arbitrase) pasca Perang Shiffin sebagai upaya penyelesaian konflik yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan perdamaian. Meskipun dimaksudkan untuk menjaga persatuan, proses tersebut justru memicu perpecahan politik dan teologis yang mendalam. Sementara itu, Junaidin (2020) menekankan bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan upaya untuk mengembalikan sistem pemerintahan pada prinsip keadilan dan egalitarianisme. Namun, kebijakan tegasnya dalam menata ulang struktur birokrasi justru memicu resistensi politik yang kuat, terutama dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan.

Oleh karena itu, terdapat research gap yang mendasar dalam mengkaji bagaimana dinamika konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan membawa perubahan terhadap sistem pemerintahan Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas peristiwa Perang Shiffin, tahkim, atau kepemimpinan Ali bin Abi Thalib secara terpisah. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tuntutan penegakan qisas atas wafatnya Utsman bin Affan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan legitimasi

politik pada masa transisi kepemimpinan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan Muawiyah tidak dapat dipahami hanya sebagai tuntutan keadilan ataupun semata-mata sebagai upaya memperoleh kekuasaan, melainkan merupakan perpaduan antara tuntutan penegakan hukum terhadap pembunuh Utsman dan kepentingan politik untuk memperkuat legitimasi kekuasaan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam. Rangkaian peristiwa yang meliputi Perang Jamal, Perang Shiffin, tahkim, munculnya kelompok Khawarij, hingga berakhir dengan berdirinya Dinasti Umayyah menjadi titik balik dalam sejarah politik Islam. Konflik tersebut melemahkan sistem kepemimpinan yang berlandaskan musyawarah (syura) pada masa Khulafaur Rasyidin dan menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya sistem pemerintahan dinasti di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konflik politik tersebut tidak hanya berdampak pada pergantian kepemimpinan, tetapi juga mengubah struktur pemerintahan Islam secara mendasar.

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan salah satu fase penting dalam sejarah politik Islam yang memengaruhi perkembangan sistem pemerintahan pada masa berikutnya. Penelitian ini memperlihatkan bahwa krisis legitimasi kepemimpinan, perbedaan pandangan mengenai penyelesaian pembunuhan Utsman bin Affan, serta kepentingan politik yang berkembang pada masa tersebut menjadi faktor yang mempercepat perubahan dari sistem pemerintahan berbasis musyawarah menuju sistem monarki dinasti. Temuan ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sejarah politik

Islam, khususnya mengenai hubungan antara konflik politik, legitimasi kekuasaan, dan transformasi sistem pemerintahan Islam pada abad VII M.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana krisis legitimasi kepemimpinan pasca wafatnya Utsman bin Affan memicu dinamika konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan?
2. Bagaimana dampak konflik antara Ali bin Abi Thalib – Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap transisi sistem pemerintahan Islam abad VII M?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dinamika krisis legitimasi kepemimpinan pasca wafatnya Utsman bin Affan yang memicu munculnya rivalitas politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis dampak konflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap proses transisi sistem pemerintahan Islam pada Abad VII M.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.
 - a. Pengembangan kajian sejarah Islam: penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sejarah politik Islam terkait krisis legitimasi kepemimpinan dan konflik internal umat Islam pada Abad VII M.

- b. Memberikan kontribusi akademik: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika krisis legitimasi serta dampak konflik Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap transisi sistem pemerintahan Islam.

2. Secara Praktis

- a. Pengembangan diri penulis: bagi penulis, penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam menerapkan metodologi penelitian, mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis, serta meningkatkan pemahaman mendalam tentang sejarah Islam dan ilmu pemerintahan. Proses ini juga melatih penulis dalam menyusun argumen yang sistematis, melakukan analisis data historis, dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang komprehensif.
- b. Pembelajaran kepemimpinan dan manajemen konflik: penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya legitimasi kekuasaan dan pengelolaan konflik dalam menjaga stabilitas pemerintahan, yang relevan untuk memahami dinamika kepemimpinan di masa kini.

E. Definisi Istilah / Pengertian Judul

1. Dinamika

Dinamika adalah suatu proses perubahan, perkembangan, serta interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu kondisi atau peristiwa, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial, politik, maupun historis. Dinamika tidak hanya menunjukkan adanya perubahan, tetapi juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara berbagai unsur yang terlibat di dalamnya, sehingga menghasilkan situasi yang tidak statis, melainkan berkembang dari waktu ke waktu.¹⁰

¹⁰ M Rusdi, *Dinamika Sosial Masyarakat Desa* (Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, dinamika merujuk pada proses berkembangnya krisis legitimasi kepemimpinan pasca wafatnya Utsman bin Affan, yang melibatkan berbagai reaksi, kepentingan, dan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Proses tersebut kemudian memicu munculnya konflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan, yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga berdampak pada perubahan struktur dan sistem pemerintahan Islam pada Abad VII M.

2. Konflik Politik

Konflik politik adalah suatu bentuk pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok dalam ranah kekuasaan yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan, pandangan, serta klaim terhadap otoritas dan legitimasi kepemimpinan. Konflik ini umumnya muncul sebagai akibat dari ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, maupun dalam menentukan arah kebijakan yang dianggap mewakili kepentingan umat atau masyarakat. Selain itu, konflik politik juga sering melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan ideologis yang saling berinteraksi sehingga memperumit penyelesaian annya.

Dalam konteks penelitian ini, konflik politik merujuk pada pertentangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan yang dipicu oleh perbedaan sikap dalam menyikapi kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan tuntutan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut persoalan legitimasi kepemimpinan dan pengakuan terhadap otoritas khalifah. Seiring perkembangannya, konflik ini mengalami eskalasi menjadi konflik terbuka yang berdampak luas terhadap kondisi sosial-politik umat Islam serta memengaruhi arah perubahan sistem pemerintahan Islam pada abad ke VII M.

3. Sistem Pemerintahan Islam

Sistem pemerintahan Islam, yang merujuk pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, mengalami transformasi fundamental pasca kepemimpinan Khulafaurrasyidin. Pada periode awal, pemerintahan berlandaskan pada musyawarah (syura) dan keadilan, sebuah konsep yang mencerminkan partisipasi dan kesepakatan umat dalam mengambil keputusan. Namun, pascakonflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan, terjadi pergeseran signifikan dari prinsip tersebut. Dinamika konflik politik yang berujung pada berdirinya dinasti Umayyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengubah sistem pemerintahan secara drastis, dari yang sebelumnya bersifat demokratis-musyawarah menjadi monarki atau dinasti, dimana suksesi kekuasaan diwariskan secara turun-temurun.¹¹ Perubahan ini merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Islam, meninggalkan konsekuensi jangka panjang yang memengaruhi struktur dan praktik kekuasaan pada masa-masa berikutnya.

Indikator yang digunakan untuk menyatakan telah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dalam penelitian ini merujuk pada kajian Auliaurrahman, Zulkifli Abdurrahman Usman, dan Usman bin Abdullah yang secara khusus meneliti transisi sistem pemerintahan Islam klasik dari pola syura menuju monarki.¹² Menurut kajian tersebut, suatu sistem pemerintahan dapat dikatakan telah mengalami perubahan apabila terjadi pergeseran pada tiga aspek pokok, yaitu mekanisme suksesi kepemimpinan, kedudukan musyawarah (syura) sebagai sumber legitimasi, dan pola pewarisan

¹¹ Mochammad Ardika Akbar Bestari, Ala Abd., and Rochimah, "Dinamika Kekhalifahan Islam Bani Umayyah Di Masa Pemerintahan Muawiyah Bin Abi Sufyan (661-680 M): Pengaruh Politik , Sosial Dan Budaya," *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 1 (2024): h. 910–920.

¹² Auliaurrahman, Zulkifli Abdurrahman Usman, dan Usman bin Abdullah, "Dari Syura Ke Monarki: Perubahan Sistem Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Klasik," *JSSSR Journal Of Samudra Social Studies Research* (2025).

kekuasaan. Ketiga indikator inilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan titik terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam pascakonflik Ali bin Abi Thalib -- Muawiyah bin Abi Sufyan.

Dalam konteks penelitian ini, sistem pemerintahan Islam merujuk pada tatanan kepemimpinan umat Islam yang mengalami pergeseran indikator-indikator tersebut sebagai akibat dari konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu dari sistem yang berlandaskan musyawarah (syura) dan baiat pada masa Khulafaurrasyidin menuju sistem monarki-dinasti yang diwariskan secara turun-temurun pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Dinasti Umayyah.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Dinamika Konflik Politik Ali bin Abi Thalib-Muawiyah bin Abi Sufyan Terhadap Perubahan Sistem Pemerintahan Islam Abad VII M”. Penulis merujuk pada beberapa referensi sebagai acuan yang terkait dengan penelitian skripsi yang sedang diteliti antara lain:

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan.

NO	Nama Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Tegar Shidiq Pratama, Dian Prayoga	Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari Tahun 655-660 M”.	2023	persamaan dari penelitian ini terletak pada kesamaan fokus kajian terhadap periode	Penelitian terdahulu berfokus pada dinamika umum pemerintahan Ali bin Abi Thalib (meliputi politik,

				kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menyoroti masa pasca terbunuhnya Utsman bin Affan yang memunculkan kekacauan politik dan menjadi awal dari konflik besar antara Ali dan Muawiyah.	militer, hingga pendidikan) serta upaya pemulihan stabilitas. Penelitian ini berfokus pada dinamika konflik politik Ali bin Abi Thalib- Muawiyah bin Abi Sofyan terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam yaitu transformasi dari sistem khilafah musyawarah menjadi sistem dinasti turun-temurun. Kajian ini menelaah latar belakang konflik pasca wafatnya Utsman yang memicu krisis legitimasi, serta mengkaji motif perlawanan Muawiyah, apakah dilandasi tuntutan keadilan atau kepentingan politik strategis.
2.	Nur Aulia Rustan	Konflik Bani Hasyim dan Bani Umayyah (Konflik	2020	Sama-sama membahas konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan yang	Penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek historis dan politik konflik antara Bani Hasyim

		Politik Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan		muncul setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Latar sejarah yang dikaji pun sama, yakni masa awal pemerintahan Islam yang diwarnai perang saudara seperti Perang Shiffin dan peristiwa tahkim.	dan Bani Umayyah, dengan menelusuri akar permusuhan antarklan Quraisy sejak masa Jahiliyah. penelitian ini berfokus pada dinamika konflik politik Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam, yaitu transformasi dari sistem khilafah yang ideal menuju sistem dinasti turun-temurun di bawah Bani Umayyah. Kajian ini menelaah latar belakang konflik pasca wafatnya Utsman bin Affan (yang memicu krisis legitimasi) serta mengkaji secara kritis motif perlawanan Muawiyah, apakah dilandasi tuntutan keadilan atau kepentingan politik strategis.
3.	Arfah Ibrahim	Taktik Muawiyah bin	2020	sama-sama membahas tentang	Penelitian terdahulu berfokus pada siasat

		Abi Sufyan Dalam Mengalahkan Ali bin Abi Thalib		konflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan, menyoroti peristiwa penting seperti perang Shiffin dan tahkim serta strategi politik licik Muawiyah yang menyebabkan kemenangan dan pecahnya umat Islam menjadi beberapa kelompok	politik dan aspek historis, seperti Perang Shiffin dan perundingan Tahkim, yang digunakan Muawiyah untuk mengalahkan Ali. Penelitian ini fokus pada bagaimana konflik tersebut memengaruhi struktur pemerintahan dan legitimasi kepemimpinan Islam pasca-konflik, khususnya transformasinya pada Abad VII M. Kajian ini menelaah latar belakang krisis legitimasi pasca wafatnya Utsman dan mengkaji motif perlawanan Muawiyah, antara tuntutan keadilan atau kepentingan politik strategis.
--	--	---	--	---	---

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

Tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas dinamika konflik kekuasaan pada masa awal Islam, khususnya terkait sosok Ali bin Abi Thalib -

Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai tokoh sentral. Namun, masing-masing penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Tegar Shidiq Pratama dan Dian Prayoga (2023) membahas pemerintahan Ali bin Abi Thalib secara umum, termasuk dinamika politik, sosial, dan militer yang terjadi selama masa kepemimpinannya. Penelitian Nur Aulia Rustan (2020) menitikberatkan pada akar konflik panjang antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah sebagai latar historis rivalitas politik Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara itu, penelitian Arfah Ibrahim (2020) menyoroti taktik politik dan strategi diplomatik Muawiyah bin Abi Sufyan dalam memenangkan persaingan kekuasaan.

Berbeda dari tiga penelitian terdahulu yang lebih luas cakupannya, penelitian ini fokus secara spesifik pada dinamika konflik politik Ali bin Abi dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai faktor utama transformasi sistem pemerintahan Islam Abad VII M. Tujuan utamanya adalah mengkaji dari konflik ini terhadap perubahan dari sistem khilafah berbasis musyawarah menjadi model monarki dinasti Bani Umayyah. Penelitian ini menelaah krisis legitimasi pasca wafatnya Utsman bin Affan dan menguji motif perlawanan Muawiyah bin Abi Sufyan apakah dilandasi tuntutan keadilan atau kepentingan politik strategis. Melalui analisis ini, penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan menyajikan perspektif komprehensif tentang pembentukan struktur politik Islam pasca Khulafaurasyidin.

G. Landasan Teori

Landasan teori merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian yang berisi teori-teori serta hasil-hasil studi pustaka yang relevan. Bagian ini berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menyelesaikan penelitian. Sering pula istilah ini disebut

sebagai kerangka teori.¹³ Landasan teori mencakup beberapa konsep, definisi, serta referensi dari sumber ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap teori dan konsep yang relevan sekaligus keterkaitannya dengan bidang ilmu yang diteliti. Landasan teori disusun secara sistematis dan terstruktur, memuat variabel-variabel utama yang menjadi fokus penelitian. Dengan adanya landasan teori yang kuat, suatu penelitian akan memiliki dasar yang jelas dan terarah. Secara umum, landasan teori dapat dipahami sebagai kumpulan definisi, konsep, dan proposisi yang tersusun rapi dan mencakup variabel penelitian, sehingga menjadi dasar kokoh dalam pelaksanaan penelitian.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai pisau analisis, yaitu Teori Legitimasi Kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber dan Teori Konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Kedua teori tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan konseptual dalam menjelaskan dinamika konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib serta implikasinya terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam abad VII M. Teori Legitimasi Kekuasaan digunakan untuk menganalisis krisis legitimasi yang muncul pasca wafatnya Utsman bin Affan, terutama terkait pengakuan terhadap otoritas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib serta perbedaan pandangan antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai dasar legitimasi dan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman. Sementara itu, Teori Konflik digunakan untuk menjelaskan bagaimana pertentangan kepentingan politik dan perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan berkembang menjadi konflik politik yang membawa perubahan terhadap struktur pemerintahan Islam, mulai dari

¹³ Haura Hanifah dkk, "Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Pikir, Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): h. 391–404.

melemahnya mekanisme syura pada masa Khulafaur Rasyidin hingga munculnya sistem monarki hereditas pada masa Dinasti Umayyah. Dengan demikian, kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menganalisis hubungan antara krisis legitimasi, dinamika konflik politik, dan transisi sistem pemerintahan Islam pada abad VII M.

1. Teori Legitimasi Kekuasaan

Legitimasi kekuasaan merupakan salah satu unsur fundamental dalam studi politik. Ia berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap otoritas penguasa, serta keyakinan bahwa kekuasaan tersebut dijalankan secara sah dan sesuai dengan norma yang berlaku. Tanpa legitimasi, kekuasaan hanya akan bertumpu pada paksaan dan berpotensi melahirkan instabilitas politik.¹⁴ Legitimasi kekuasaan adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap hak seseorang atau kelompok untuk memerintah. Kekuasaan yang tidak memiliki legitimasi cenderung bertumpu pada paksaan dan berpotensi melahirkan instabilitas politik.

Max Weber merupakan seorang sosiolog dan pemikir besar asal Jerman yang dikenal sebagai peletak dasar pemikiran mengenai rasionalitas dan otoritas dalam sosiologi modern. Weber menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam studi mengenai sosiologi agama, ekonomi, serta dinamika kekuasaan yang bertumpu pada tindakan sosial yang memiliki makna. Karyanya yang paling monumental, *Economy and Society* serta *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, menjadikan namanya dikenal secara global dan menjadi rujukan utama dalam kajian sosiologi politik, birokrasi, serta kebijakan publik di berbagai negara. Max Weber menilai bahwa kekuasaan bukan

¹⁴ Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). h. 101.

sekadar paksaan fisik, tetapi sebuah arena legitimasi yang menentukan kepatuhan individu dalam struktur sosial. Pandangannya yang mendalam dan analitis menjadikan Weber sebagai arsitek utama pemikiran modern mengenai tipologi otoritas dan dominasi legal-rasional.¹⁵

Teori Legitimasi Kekuasaan yang diperkenalkan Max Weber menegaskan bahwa stabilitas suatu sistem politik sangat bergantung pada klaim legitimasi atau pengakuan akan keabsahan kekuasaan tersebut. Dalam pandangannya, kekuasaan (power) yang hanya mengandalkan paksaan tidak akan bertahan lama ia harus bertransformasi menjadi otoritas (authority) agar ditaati secara sukarela. Otoritas tidak hanya sebatas kemampuan untuk memerintah, tetapi mencakup keyakinan pihak yang diperintah bahwa perintah tersebut layak untuk diikuti. Weber menegaskan bahwa tanpa legitimasi, suatu kekuasaan akan selalu berada dalam ancaman instabilitas. Sebaliknya, penguatan basis legitimasi akan memperkuat kedaulatan dan integrasi sistem pemerintahan.¹⁶

Berdasarkan konsep legitimasi yang dikemukakan oleh Max Weber, penelitian ini menempatkan krisis legitimasi sebagai salah satu faktor penting dalam memahami dinamika konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan. Weber menjelaskan bahwa suatu kekuasaan akan memperoleh kepatuhan apabila dipandang memiliki dasar legitimasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, keberlangsungan suatu pemerintahan tidak hanya bergantung pada kekuatan politik yang dimiliki, tetapi juga pada pengakuan terhadap keabsahan otoritas pemimpinnya.

¹⁵ Satrio Dwi Haryono, "Wacana Rasialisme Dalam Sosiologi Max Weber," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): h. 400-410.

¹⁶ Eymal B. Demmallino Muhammad Yamin Saud M. Saleh S. Ali, *Teori-Teori Sosial Dan Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Perencanaan* (Balikpapan: CV. Azizah Publishing, 2020). h. 403-406.

Dalam konteks sejarah Islam, penelitian ini memandang bahwa krisis legitimasi pasca wafatnya Utsman bin Affan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika politik pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Meskipun Ali telah memperoleh baiat sebagai khalifah, muncul perbedaan pandangan mengenai penyelesaian kasus pembunuhan Utsman yang kemudian memengaruhi penerimaan sebagian kelompok terhadap kepemimpinannya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan legitimasi tidak hanya berkaitan dengan proses pengangkatan khalifah, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan terhadap pelaksanaan otoritas politik dalam situasi krisis.

Oleh karena itu, Teori Legitimasi Kekuasaan digunakan sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bagaimana krisis legitimasi kepemimpinan pasca wafatnya Utsman bin Affan memicu dinamika konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan. Melalui teori ini, penelitian ini menganalisis hubungan antara legitimasi kepemimpinan, penerimaan terhadap otoritas politik, dan munculnya konflik politik pada masa awal perkembangan pemerintahan Islam.

2. Teori Konflik

Teori konflik berpandangan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan politik. Konflik muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, distribusi kekuasaan yang tidak merata, serta perebutan legitimasi antara kelompok-kelompok yang bersaing. Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu diperebutkan oleh aktor-aktor politik yang memiliki

tujuan dan kepentingan berbeda.¹⁷ Teori konflik menolak anggapan bahwa masyarakat selalu berada dalam kondisi harmonis. Sebaliknya, perubahan sosial dan politik justru sering kali lahir dari pertentangan dan ketegangan antarkelompok. Konflik dipandang sebagai mekanisme yang mendorong transformasi struktur kekuasaan, baik menuju stabilitas baru maupun menuju bentuk pemerintahan yang berbeda.¹⁸

Ralf Dahrendorf adalah seorang sosiolog dan filsuf sosial asal Jerman yang dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan teori konflik modern dalam sosiologi, pemikirannya menekankan bahwa masyarakat tersusun atas hubungan kekuasaan dan otoritas yang melekat pada posisi sosial bukan pada individu. Perbedaan distribusi otoritas tersebut menjadi faktor utama yang memunculkan konflik dalam masyarakat.¹⁹

Teori konflik Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik muncul dari upaya suatu kelompok untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta otoritas. Dalam setiap masyarakat akan selalu terdapat kelompok yang memiliki kekuasaan (superordinat) dan kelompok yang berada di bawah kekuasaan (subordinat) yang memiliki kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang memicu terjadinya konflik sosial dan perubahan dalam sistem sosial. Dahrendorf, menyatakan bahwa konflik muncul karena distribusi otoritas yang tidak seimbang dalam masyarakat. Mereka yang memiliki otoritas berusaha mempertahankan posisinya, sedangkan pihak

¹⁷ Wasid Shofiyya Mawaddah, Imam Ibnu Hajar, "Teori Konflik Kekuasaan Dan Dinamika Politik Di Indonesia," *Qurthuba: The Journal History and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2024): h. 28–41.

¹⁸ Nina Nursari, Nasrudin, *Pengantar Sosiologi (Teori, Realitas, Dan Transformasi Sosial Di Abad 21)* (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025). h. 1-10

¹⁹ Muhammad Yamin Saud M. Saleh S. Ali, *Teori-Teori Sosial Dan Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Perencanaan*.

lain berupaya untuk merebutnya. Konflik dalam hal ini tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga legitimasi kekuasaan dan struktur wewenang dalam sistem politik.²⁰

Berdasarkan Teori Konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, penelitian ini memandang bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial dan politik yang dapat mendorong terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Menurut Dahrendorf, konflik muncul sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan kepentingan dan distribusi otoritas di dalam suatu sistem sosial. Oleh karena itu, konflik tidak hanya dipahami sebagai bentuk pertentangan, tetapi juga sebagai proses yang dapat melahirkan perubahan terhadap struktur kekuasaan yang telah ada.

Dalam konteks penelitian ini, konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan dipahami sebagai dinamika politik yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pemerintahan Islam pada abad VII M. Perbedaan pandangan mengenai legitimasi kepemimpinan dan penyelesaian persoalan politik berkembang menjadi konflik yang tidak hanya berdampak pada kondisi politik saat itu, tetapi juga memengaruhi perubahan struktur pemerintahan Islam pada masa berikutnya.

Oleh karena itu, Teori Konflik digunakan sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai bagaimana dampak konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap transisi sistem pemerintahan Islam abad VII M. Melalui teori ini, penelitian ini menganalisis bagaimana dinamika konflik politik tersebut berkontribusi terhadap perubahan sistem pemerintahan

²⁰ Puspita Rani Swari, "Budaya Patriarki Dan Tantangan Dalam Kebebasan Berepresi (Analisi Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): h. 213–218.

Islam yang secara bertahap bergeser dari mekanisme syura menuju sistem monarki hereditas pada masa Dinasti Umayyad.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah metode penelitian sejarah, yang diterapkan untuk mengkaji secara mendalam Dinamika konflik politik Ali bin Abi Thalib – Muawiyah bin Abi Sufyan serta dampaknya yang signifikan terhadap perubahan sistem pemerintahan pada abad ke VII M. Metode ini memungkinkan penelusuran peristiwa lampau secara sistematis melalui langkah-langkah yang terstruktur sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai bahan utama dalam memperoleh data penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab-kitab sejarah klasik sebagai sumber primer, serta buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan karya ilmiah lainnya sebagai sumber sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis penelitian ini dipilih karena objek kajian merupakan peristiwa sejarah yang telah terjadi pada abad VII M, yaitu dinamika konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan serta pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan Islam. Oleh karena itu, data penelitian tidak diperoleh melalui observasi lapangan, melainkan melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber tertulis yang membahas peristiwa tersebut. Penelitian kepustakaan dipandang sebagai metode yang paling sesuai dengan fokus penelitian karena memungkinkan peneliti menelaah berbagai

informasi historis secara sistematis dari sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang atau perspektif yang digunakan peneliti untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan suatu permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan penelitian berfungsi sebagai landasan berpikir dalam mengkaji objek penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fakta sejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan pendekatan politik. Kedua pendekatan tersebut dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji dinamika konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan Islam pada abad VII M.

a. Pendekatan Historis

Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi, memahami, dan menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah yang berkaitan dengan dinamika konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan secara kronologis. Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri latar belakang terjadinya konflik, perkembangan peristiwa, serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan Islam pada abad VII M. Melalui pendekatan historis, penelitian ini menelaah berbagai fakta sejarah berdasarkan sumber primer berupa kitab-kitab sejarah klasik dan sumber sekunder yang relevan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika politik pada masa Khulafaur Rasyidin hingga awal pemerintahan Dinasti Umayyah.

Pendekatan historis dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji rangkaian peristiwa yang dimulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, munculnya tuntutan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman, hingga terjadinya Perang Jamal, Perang Shiffin, peristiwa tahkim, dan lahirnya kelompok Khawarij. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perubahan sistem pemerintahan Islam sebagai dampak dari dinamika konflik politik yang berkembang pada masa tersebut.

b. Pendekatan Politik

Pendekatan politik digunakan untuk menganalisis dinamika konflik politik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Islam. Pendekatan ini berfokus pada kajian mengenai legitimasi kepemimpinan, kebijakan politik yang ditempuh oleh kedua tokoh, serta hubungan antara berbagai kelompok politik yang terlibat dalam konflik. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan rangkaian peristiwa sejarah, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi munculnya konflik serta implikasinya terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam.

Melalui pendekatan politik, penelitian ini berupaya memahami bagaimana dinamika konflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan memengaruhi perkembangan pemerintahan Islam, khususnya perubahan mekanisme kepemimpinan dari sistem syura yang berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin menuju sistem monarki pada masa Dinasti Umayyah. Dengan demikian, pendekatan politik memberikan pemahaman mengenai perubahan pola kepemimpinan dan praktik pemerintahan yang terjadi sebagai bagian dari perkembangan sejarah politik Islam pada abad VII M.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan dinamika konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan serta perubahan sistem pemerintahan Islam pada abad VII M.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber primer memegang peranan penting untuk merekonstruksi dinamika konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan serta dampaknya terhadap transisi sistem pemerintahan Islam pada abad VII M. Melalui literatur yang dekat dengan masa peristiwa tersebut, peneliti dapat membedah alur historis mulai dari wafatnya Utsman bin Affan, proses pengangkatan khalifah, hingga transformasi sistem syura menjadi sistem monarki pada era Dinasti Umayyah. Penggunaan sumber primer menjadi fondasi utama untuk menjamin otentisitas data dalam analisis penelitian ini. Adapun sumber primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tarikh al-Tabari (*Tarikh al-Rusul wa al-Muluk*)

Kitab Tarikh al-Rusul wa al-Muluk karya Imam Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Tabari merupakan sumber primer utama yang digunakan dalam penelitian ini. Kitab tersebut memuat kronologi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Perang Jamal, Perang Shiffin, peristiwa tahkim, hingga munculnya

pemerintahan Bani Umayyah. Informasi yang disajikan al-Tabari disusun berdasarkan riwayat-riwayat yang berasal dari para perawi terdahulu dengan mencantumkan sanad periwayatan, sehingga menjadikan karyanya sebagai salah satu rujukan utama dalam kajian sejarah Islam klasik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan edisi terjemahan akademik berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh State University of New York Press (SUNY Press) dengan judul *The History of al-Tabari*. Terjemahan ini terdiri atas beberapa volume yang disunting oleh para akademisi sesuai dengan periode sejarah yang dibahas. Meskipun menggunakan edisi terjemahan, sumber tersebut tetap diperlakukan sebagai sumber primer, karena merupakan hasil penerjemahan langsung dari naskah asli karya al-Tabari tanpa mengubah substansi isi maupun riwayat yang disampaikan. Oleh karena itu, data yang dianalisis dalam penelitian ini tetap berasal dari karya asli al-Tabari, bukan dari interpretasi penulis modern.

2. Kitab *Al-Bidayah wa al-Nihayah*

Kitab *Al-Bidayah wa al-Nihayah* karya Imam Ibnu Katsir digunakan sebagai sumber primer pendukung dalam penelitian ini. Kitab ini merupakan karya sejarah Islam klasik abad ke-8 H yang memuat kronologi peristiwa sejak penciptaan alam hingga masa penulisnya, termasuk pembahasan mengenai pemerintahan Khulafaur Rasyidin serta konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan edisi terjemahan bahasa Indonesia berjudul *Al-Bidayah wan Nihayah: Masa Khulafa'ur Rasyidin*, terbitan Darul Haq Jakarta cetakan pertama tahun 2004, yang diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari dan dimuraja'ah oleh Ahmad Amin Sihab, Lc. Penggunaan edisi terjemahan dilakukan karena keterbatasan akses terhadap naskah asli berbahasa Arab. Meskipun menggunakan edisi terjemahan, isi, sistematika

penyajian, dan substansi historisnya tetap merepresentasikan pemikiran serta penulisan Ibnu Katsir sehingga dapat dijadikan dasar dalam menganalisis peristiwa sejarah yang menjadi fokus penelitian.

Berbeda dengan Tarikh al-Tabari yang lebih banyak menyajikan berbagai riwayat secara kronologis beserta sanadnya, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa al-Nihayah melakukan proses seleksi, perbandingan, serta penilaian terhadap riwayat-riwayat tersebut sebelum menyusunnya ke dalam narasi sejarah. Oleh karena itu, kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai kronik sejarah, tetapi juga menyajikan analisis terhadap riwayat-riwayat yang dinilai lebih kuat dan lebih dapat dipercaya berdasarkan pendekatan ilmu hadis dan sejarah yang digunakan oleh penulisnya.

Dalam penelitian ini, Al-Bidayah wa al-Nihayah dimanfaatkan sebagai sumber pembanding terhadap informasi yang terdapat dalam Tarikh al-Tabari. Melalui perbandingan kedua sumber primer tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan serta dampaknya terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam pada abad VII M. Selain itu, penggunaan dua sumber primer ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber sejarah sehingga interpretasi yang dihasilkan menjadi lebih objektif, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai karya ilmiah yang membahas, mengkaji, atau menginterpretasikan peristiwa sejarah berdasarkan sumber-sumber primer. Dalam penelitian sejarah, data sekunder berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, dan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber primer

sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif. Selain itu, data sekunder juga memberikan berbagai perspektif akademik terhadap suatu peristiwa sejarah serta membantu peneliti memahami konteks sosial, politik, dan pemerintahan yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa. Adapun sumber sekunder antara lain:

1. Wilferd Madelung, (*The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*)

Buku karya Wilferd Madelung digunakan untuk memahami proses suksesi kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., dinamika politik pada masa Khulafaur Rasyidin, serta persoalan legitimasi kekuasaan yang berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Buku ini memberikan analisis yang mendalam mengenai latar belakang konflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga menjadi salah satu rujukan penting dalam mengkaji sejarah politik Islam awal.

2. Marshall G. S. Hodgson, (*The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*)

Buku karya Marshall G. S. Hodgson digunakan sebagai referensi untuk memahami perkembangan peradaban Islam dalam perspektif sejarah yang lebih luas, khususnya mengenai perubahan struktur politik dan pemerintahan Islam. Buku ini membantu peneliti menjelaskan bagaimana dinamika konflik politik pada masa Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan berkontribusi terhadap transformasi sistem pemerintahan Islam dari sistem khilafah menuju pemerintahan berbasis dinasti.

3. Jurnal ilmiah

Jurnal ilmiah digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperoleh hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik politik pada masa Khulafaur Rasyidin, legitimasi kekuasaan, Perang Shiffin, peristiwa tahkim, serta perubahan sistem

pemerintahan Islam. Berbagai artikel ilmiah tersebut dimanfaatkan untuk membandingkan temuan penelitian sebelumnya dengan hasil analisis dalam penelitian ini, sekaligus memperkuat argumentasi berdasarkan hasil kajian akademik yang telah dipublikasikan.

4. Sirah Nabawiyah

Buku karya Shafiyurrahman al-Mubarakfuri digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial, politik, dan sistem kepemimpinan pada masa Nabi Muhammad saw. Buku ini membantu peneliti memahami konteks historis yang menjadi landasan bagi perkembangan pemerintahan Islam sebelum terjadinya dinamika konflik politik pada masa Khulafaur Rasyidin.²¹

5. Nahjul Balaghah

Nahjul Balaghah digunakan sebagai sumber pendukung untuk memahami pidato, surat, dan hikmah yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan, pemerintahan, keadilan, dan dinamika politik pada masa awal Islam. Sumber ini dimanfaatkan sebagai bahan pelengkap dalam memperkuat analisis terhadap pemikiran dan pandangan politik Ali bin Abi Thalib serta dipadukan dengan berbagai sumber sejarah lainnya.²²

a. Keterbatasan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menyadari terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasil analisis dapat dipahami secara lebih proporsional. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Sumber

²¹ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum Bahtsun fis Siratin Nabawiyyati ala Shahibiha Afdhalus Shalati wa Sallam*, ter. Agus Suwandi (Jakarta: Ummul Qura 2011).

²² Syarif Radhi, *Nahj Al-Balaghah*.

Sebagian besar sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur sejarah Islam klasik yang telah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penggunaan sumber dalam dua bahasa tersebut membuka kemungkinan terjadinya variasi dalam penafsiran, baik dalam hal pemilihan istilah maupun dalam pemaknaan konteks historis yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelaahan secara teliti dengan membandingkan berbagai edisi terjemahan untuk menjaga ketepatan pemahaman terhadap isi sumber.

2. Ketersediaan dan Bias Sumber

Sumber-sumber yang membahas konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan pada abad VII M tidak selalu tersedia secara lengkap dan utuh dalam bentuk laporan sejarah primer yang sezaman dengan peristiwa tersebut. Sebagian besar narasi sejarah ditulis oleh sejarawan setelah peristiwa terjadi dalam rentang waktu yang cukup jauh, sehingga memungkinkan adanya perbedaan perspektif dan interpretasi. Selain itu, terdapat kecenderungan bias dalam beberapa sumber, baik yang dipengaruhi oleh sudut pandang politik, mazhab, maupun kepentingan penulis sejarah. Kondisi ini menyebabkan peneliti harus menerapkan kritik sumber secara ketat untuk menjaga objektivitas dalam proses analisis.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahap utama: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Berikut penjelasan lengkapnya:

a. Heuristik

Heuristik adalah metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian sejarah. Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani "heuristiken" yang berarti menemukan atau

mengumpulkan sumber informasi.²³ Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan tertulis seperti kitab, buku, jurnal, ensiklopedia, dan sumber dari internet yang relevan dengan Dinamika Konflik Politik Ali bin Abi Thalib – Muawiyah bin Abi Sufyan Terhadap Perubahan Sistem Pemerintahan Islam Abad VII M. Peneliti juga mengumpulkan referensi dari Perpustakaan IAIN Parepare, koleksi buku pribadi, serta situs-situs internet yang terkait.

Tahap heuristik dalam penelitian ini difokuskan pada pengumpulan serta klasifikasi sumber yang relevan guna menganalisis konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan serta dampaknya terhadap pemerintahan Islam abad VII M. Untuk menjamin akurasi ilmiah, data dikumpulkan dari dua kategori sumber: pertama, sumber primer yang meliputi *Tarikh al-Tabari* dan *Al-Bidayah wa al-Nihayah* sebagai rujukan utama peristiwa Perang Jamal, Perang Shiffin, dan tahkim. Kedua, sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai sejarah politik Islam awal yang berfungsi untuk memperkuat konteks historis dan memberikan perspektif analitis yang lebih komprehensif.

b. Kririk Sumber (Verifikasi Data)

Kritik sumber merupakan salah satu tahapan penting dalam metode penelitian sejarah yang bertujuan untuk menguji kualitas sumber-sumber yang digunakan sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahap ini dilakukan setelah proses pengumpulan sumber (heuristik) sebagai upaya untuk menyeleksi dan menilai sumber berdasarkan tingkat keaslian serta kredibilitas informasinya.²⁴

²³ Meri Erawati dkk, *Jejaring Teknologi Pembelajaran Ilmu Sejarah, Adat, Dan Sosial*, vol. 4 (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2023).

²⁴ Nina Herllina, *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020* (Bandung: Satya Historika, 2022), h. 52-55.

Tahap kritik sumber dilakukan terhadap seluruh bahan pustaka, baik primer maupun sekunder, untuk menjamin otentisitas, kredibilitas, dan relevansi historisnya terhadap fokus penelitian. Proses ini krusial untuk memastikan kelayakan sumber dalam mengkaji dinamika konflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan serta dampaknya terhadap transisi sistem pemerintahan Islam abad VII M. Untuk mencapai hal tersebut, kritik sumber dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kritik ekstern dan kritik intern sebagai berikut:

1. Kritik Ekstern (Keaslian)

Kritik eksternal dilakukan untuk memastikan keaslian, asal-usul, serta identitas sumber yang digunakan dalam penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menilai apakah sumber-sumber tersebut benar-benar berasal dari penulis yang memiliki otoritas, diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, serta memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa sejarah yang diteliti. Dalam penelitian ini, kritik eksternal difokuskan pada pemeriksaan identitas penulis, waktu penyusunan karya, edisi yang digunakan, penerbit, penerjemah, serta hubungan sumber tersebut dengan objek penelitian.

2. Kritik Intern (Reliabilitas)

Kritik intern dilakukan untuk menilai tingkat reliabilitas isi sumber yang digunakan dalam penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menguji sejauh mana informasi yang terkandung dalam setiap sumber dapat dipercaya, memiliki konsistensi, serta relevan dengan fokus penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti menganalisis isi sumber secara kritis dengan membandingkan berbagai data dan pendapat yang terdapat dalam sumber primer maupun sumber sekunder sehingga diperoleh interpretasi sejarah yang lebih objektif.

Dalam mengkaji konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, dilakukan perbandingan terhadap riwayat yang terdapat dalam *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* karya al-Ṭabari dan *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* karya Ibnu Katsir. Kedua kitab tersebut sama-sama memuat pembahasan mengenai peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Shiffin, tahkim, hingga proses terbentuknya pemerintahan Muawiyah. Meskipun membahas peristiwa yang sama, terdapat perbedaan dalam penyajian riwayat, pemilihan informasi, serta penjelasan terhadap latar belakang maupun dampak dari setiap peristiwa. Oleh karena itu, dilakukan perbandingan terhadap kedua sumber tersebut untuk memperoleh pemahaman sejarah yang lebih utuh dan menghindari penggunaan satu sudut pandang saja dalam merekonstruksi peristiwa sejarah.

Apabila ditemukan perbedaan riwayat antara al-Ṭabari dan Ibnu Katsir, pemilihan riwayat didasarkan pada kesesuaian kronologi peristiwa, konsistensi isi riwayat, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian mengenai konflik politik Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam. Dengan demikian, riwayat yang digunakan sebagai dasar analisis dipilih berdasarkan pertimbangan akademik, bukan karena kecenderungan untuk membenarkan salah satu tokoh yang terlibat dalam konflik tersebut.

Selain membandingkan isi riwayat, perhatian juga diberikan terhadap latar belakang penyusunan masing-masing kitab. Al-Ṭabari dikenal sebagai sejarawan yang menghimpun berbagai riwayat dari banyak periwayat tanpa selalu memberikan penilaian terhadap kebenaran setiap riwayat yang dicantumkan. Sebaliknya, Ibnu Katsir lebih selektif dalam menyajikan riwayat dengan memberikan penilaian serta melakukan penyaringan terhadap beberapa riwayat berdasarkan pertimbangan keilmuan yang dimilikinya. Perbedaan karakter penyusunan kedua kitab tersebut menjadi pertimbangan

penting dalam proses kritik internal sehingga setiap informasi dianalisis secara cermat sebelum digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan.

Keaslian dan kredibilitas riwayat dinilai melalui perbandingan antara Tarikh al-Rusul wa al-Muluk karya al-Ṭabari dan Al-Bidāyah wa al-Nihāyah karya Ibnu Katsir. Riwayat yang menunjukkan kesesuaian fakta, kronologi, serta memiliki dukungan dari kedua sumber dipandang memiliki tingkat kepercayaan yang lebih kuat. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan informasi, dilakukan analisis secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan karakter masing-masing sumber sehingga kesimpulan yang dihasilkan tetap bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sebagai bentuk penerapan kritik internal, dilakukan pula perbandingan terhadap riwayat mengenai peristiwa tahkim setelah Perang Shiffin. Al-Ṭabari menyajikan berbagai riwayat mengenai proses tahkim dengan mengutip sejumlah periwayat yang terkadang memberikan penjelasan berbeda mengenai jalannya peristiwa dan sikap tokoh-tokoh yang terlibat. Sementara itu, Ibnu Katsir menyajikan uraian yang lebih ringkas disertai penilaian terhadap sebagian riwayat yang dianggap lebih kuat. Perbedaan tersebut dianalisis dengan memperhatikan kesesuaian kronologi, konsistensi isi riwayat, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Langkah ini dilakukan agar analisis mengenai konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan serta pengaruhnya terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam didasarkan pada riwayat yang memiliki tingkat kredibilitas lebih tinggi.

c. Interpretasi

Tahap interpretasi dilakukan setelah kritik sumber guna menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi. Dalam proses ini, peneliti tidak hanya menyajikan data

mentah, tetapi juga membangun hubungan antarfakta untuk menghasilkan penjelasan historis yang utuh dan komprehensif. Upaya interpretasi ini menuntut objektivitas dan sikap kritis agar terhindar dari bias subjektif, dengan memastikan seluruh penafsiran tetap berpijak pada bukti-bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahapan interpretasi dalam penelitian ini dilakukan melalui dua langkah sebagai berikut:

1) Analisis

Analisis merupakan proses menguraikan dan mengkaji setiap fakta sejarah yang telah diperoleh dari sumber-sumber yang telah melalui tahap kritik. Pada tahap ini, peneliti membandingkan informasi yang terdapat dalam berbagai sumber untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan data.

2) Sintesis

Merupakan tahap menyatukan berbagai fakta yang telah dianalisis menjadi suatu penjelasan sejarah yang sistematis dan menyeluruh. Fakta-fakta mengenai perselisihan politik, peperangan, proses arbitrase (tahkim), melemahnya legitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib, hingga berdirinya pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan disusun menjadi satu kesatuan yang menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Islam.

d. Historiografi

Secara etimologis, istilah historiografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Historia berarti “sejarah” atau “kisah tentang masa lampau” Graphein berarti “menulis” atau “pencatatan”. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, setelah melalui fase heuristik, kritik sumber dan

interpretasi.²⁵ Pada tahap terakhir inilah penulisan sejarah dilakukan guna merekonstruksi seluruh sumber-sumber yang ada kedalam bentuk cerita sejarah mengenai Dinamika Konflik Politik Ali bin Abi Thalib – Muawiyah bin Abi Sufyan Terhadap Perubahan Sistem Pemerintahan Islam Abad VII M.

Historiografi merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah yang berfungsi sebagai proses penyusunan dan penyajian hasil penelitian ke dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis. Tahap ini dilakukan setelah seluruh rangkaian penelitian, mulai dari heuristik, kritik sumber, hingga interpretasi, diselesaikan secara cermat. Data dan fakta sejarah yang telah diperoleh, diverifikasi, serta dianalisis kemudian dirangkai menjadi sebuah narasi yang utuh sehingga mampu menggambarkan peristiwa sejarah secara logis dan kronologis.

²⁵ Nina Herlina, "*Metode Sejarah*" (Bandung: Satya Historika, 2020), h. 30.

BAB II

DINAMIKA KONFLIK POLITIK ALI BIN ABI THALIB – MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN ABAD VII M

A. Kondisi Politik Masa Khalifah Utsman Bin Affan sebagai akar konflik Ali bin Abi Thalib – Muawiyah bin Abi Sufyan

1. Tuduhan Nepotisme Utsman bin Affan dan Munculnya Kritik Politik

Meskipun pada awalnya pemerintahan Utsman bin Affan berjalan dengan cukup stabil, dalam perkembangannya beberapa kebijakan yang beliau lakukan mulai menimbulkan kritik dan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian adalah pengangkatan sejumlah kerabat dari Bani Umayyah ke dalam jabatan-jabatan penting pemerintahan. Sebagian masyarakat memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk nepotisme karena jabatan strategis dianggap lebih banyak diberikan kepada anggota keluarga dan kerabat dekat dibandingkan tokoh-tokoh lain yang juga memiliki kemampuan dan jasa besar dalam perjuangan Islam. Beberapa daerah penting seperti Syam, Kufah, Basrah, dan Mesir dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memiliki hubungan keluarga dengan Utsman, sehingga memunculkan anggapan bahwa pemerintahan mulai didominasi oleh Bani Umayyah.²⁶

Kondisi tersebut menimbulkan rasa kecewa di kalangan sebagian masyarakat, terutama dari kelompok yang menginginkan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan

²⁶ Siti Masykuroh, “Analisis Jejaring Sosial : Nepotisme Dan Krisis Legitimasi Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan (644-656M) Social Network Analysis: Nepotism and the Crisis of Legitimacy during the Time of Caliph Uthman Bin Affan (644-656 AD),” *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 06, no. 02 (2025): 113–27.

adil seperti pada masa pemerintahan sebelumnya. Kritik terhadap kebijakan Utsman tidak hanya muncul dari masyarakat biasa, tetapi juga dari beberapa sahabat Nabi yang menilai bahwa kebijakan tersebut dapat memicu kecemburuan sosial dan ketegangan politik di tengah umat Islam. Selain itu, luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan pengawasan terhadap para gubernur menjadi semakin sulit dilakukan, sehingga muncul berbagai laporan mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang dianggap merugikan masyarakat daerah. Situasi ini kemudian memperbesar ketidakpuasan politik yang akhirnya berkembang menjadi konflik sosial dan politik pada akhir masa pemerintahan Utsman. Dengan demikian, kebijakan pengangkatan kerabat dalam pemerintahan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi munculnya krisis politik dalam sejarah Islam awal. Menurut Wilferd Madelung dalam *The Succession to Muhammad*

Pengangkatan kerabat dekat dari klan Umayyah (Banu Abd Shams) oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menduduki posisi ke gubernuran yang strategis memicu gelombang ketidakpuasan yang meluas di berbagai wilayah provinsi kekhalifahan. Berbeda dengan pendahulunya, Abu Bakr dan Umar, yang menahan diri untuk tidak menempatkan kerabat mereka sendiri dalam lingkaran kekuasaan finansial dan politik, Utsman secara terbuka menerapkan kebijakan nepotisme ini. Ia meyakini bahwa klan Umayyah, sebagai inti dari suku Quraisy, memiliki kualifikasi paling unik untuk memimpin atas nama Islam. Namun, langkah ini dipandang oleh masyarakat luas sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang mengkhianati komitmen awal sang khalifah saat memenangkan dewan pemilihan (shura) untuk mengikuti sunah Nabi serta praktik adil para pendahulunya.

Di provinsi Kufah, ketegangan politik ini memuncak ketika Utsman menunjuk saudara tiri atau kerabat dekatnya, seperti al-Walid bin Uqbah dan kemudian Said bin al-As, sebagai gubernur. Para elit lokal dan pembaca Al-Qur'an (qurra) di Kufah merasa hak-hak mereka atas tanah rampasan perang (fay) mulai diasingkan dan dikuasai secara sepihak oleh pemerintahan pusat demi keuntungan keluarga Umayyah. Ketidakpuasan ini melahirkan gerakan perlawanan spontan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Malik al-Ashtar dan Amr bin Zurarah, yang secara vokal menuntut pencopotan gubernur Umayyah. Kritik-kritik ini direspons keras oleh pihak ke gubernuran dan khalifah melalui tindakan pengasingan para tokoh oposisi Kufah ke Damaskus, yang

justru semakin mengobarkan api kebencian di kalangan pejuang suku di daerah tersebut.

Dampak ketidakpuasan ini tidak hanya terbatas di Irak, melainkan menjalar hebat hingga ke Mesir dan wilayah provinsi lainnya. Di Mesir, penunjukan Abd Allah bin Sad bin Abi Sarh memicu penolakan keras yang meluas hingga melahirkan kelompok pemberontak terorganisir. Faksi-faksi militer dan kelompok suku di provinsi-provinsi tersebut merasa bahwa kekayaan serta otoritas negara yang seharusnya didistribusikan secara merata kini dimonopoli oleh segelintir elit dinasti Umayyah. Akumulasi kemarahan dari Kufah, Basra, dan Mesir ini pada akhirnya mendorong konvergensi pasukan pemberontak dari berbagai provinsi untuk bergerak menuju Madinah, mengepung istana khalifah, dan menuntut reformasi radikal atas tata kelola pemerintahan yang berujung pada peristiwa tragis pembunuhan Khalifah Utsman.²⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Utsman bin Affan dalam menunjuk anggota keluarganya sebagai gubernur tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Banyak kelompok di daerah-daerah kekuasaan Islam merasa bahwa pemerintahan mulai lebih mengutamakan hubungan keluarga dibandingkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang sebelumnya dijaga pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Ketidakpuasan tersebut muncul karena sebagian masyarakat menilai bahwa jabatan penting seharusnya diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan kontribusi besar terhadap perjuangan Islam, bukan hanya berdasarkan kedekatan keluarga dengan khalifah.

Di beberapa wilayah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah, kritik terhadap para gubernur yang berasal dari Bani Umayyah semakin berkembang karena dianggap kurang memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Kondisi ini kemudian memunculkan rasa kecewa, kecemburuan sosial, dan ketegangan politik yang semakin meluas di tengah umat Islam. Oleh karena itu, kebijakan pengangkatan kerabat dalam pemerintahan

²⁷ Madelung, *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*, h. 78 - 143.

dipandang sebagai salah satu faktor yang memperbesar krisis politik pada akhir masa pemerintahan Utsman.

Situasi tersebut diperparah oleh luasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa itu sehingga pengawasan pemerintahan pusat terhadap daerah menjadi semakin sulit dilakukan. Berbagai laporan mengenai tindakan para gubernur sampai ke Madinah dan memunculkan kritik dari masyarakat maupun beberapa tokoh Muslim terhadap kebijakan Utsman dalam memilih pejabat pemerintahan. Di Kufah dan Basrah, misalnya, muncul kelompok-kelompok yang secara terbuka menyampaikan ketidakpuasan terhadap para pemimpin daerah yang dianggap tidak mampu menjaga keadilan sosial.²⁸

Sementara itu, di Mesir, ketegangan politik berkembang semakin besar hingga melahirkan gerakan perlawanan terhadap pemerintahan pusat. Ketidakpuasan yang awalnya hanya berupa kritik terhadap kebijakan gubernur akhirnya berkembang menjadi gerakan oposisi yang menentang kepemimpinan Utsman secara lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan politik pada akhir masa pemerintahan Utsman tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi khalifah, tetapi juga oleh lemahnya kontrol pemerintahan pusat terhadap daerah serta meningkatnya persaingan politik di tengah masyarakat Islam yang terus berkembang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan politik pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari kebijakan atau keputusan pribadi khalifah semata, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Luasnya wilayah kekuasaan Islam yang

²⁸ fadil Sj Ikwil Pangsa Chaniago , Ahmad Kholil, “Politik Kekuasaan Dan Legitimasi Pada Masa Utsman Bin Affan : Kajian Historis Atas Ekspansi Dan Nepotisme Dalam Pemerintahan Islam Awal,” *Jurnal Studi Islam* 03, no. 02 (2026), h. 239–252

berkembang sangat pesat setelah masa penaklukan menyebabkan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah menjadi semakin sulit dilakukan. Di sisi lain, muncul berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial di wilayah-wilayah provinsi yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di Madinah. Kebijakan pengangkatan sejumlah kerabat Utsman ke dalam jabatan strategis turut memperkuat persepsi di kalangan sebagian masyarakat bahwa prinsip keadilan dan pemerataan dalam pemerintahan mulai mengalami perubahan. Akibatnya, ketidakpuasan yang pada awalnya hanya berupa kritik terhadap kebijakan para gubernur berkembang menjadi ketegangan politik yang semakin meluas.

Berbagai kelompok masyarakat di Kufah, Basrah, dan Mesir mulai menyuarakan tuntutan perubahan terhadap tata kelola pemerintahan yang mereka anggap lebih berpihak kepada kelompok tertentu. Oleh karena itu, krisis politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Utsman merupakan akumulasi dari berbagai persoalan struktural, mulai dari lemahnya kontrol pemerintahan pusat terhadap daerah, meningkatnya persaingan politik antarkelompok, hingga menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut kemudian menjadi landasan bagi munculnya gerakan oposisi yang pada tahap berikutnya berkembang menjadi pemberontakan terbuka terhadap pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.

2. Perkembangan Politik Menjadi Gerakan Oposisi

Kritik terhadap pemerintahan Utsman bin Affan yang pada awalnya hanya berupa keluhan dan ketidakpuasan masyarakat secara perlahan berkembang menjadi gerakan oposisi yang lebih terbuka. Pada tahap awal, berbagai kritik disampaikan melalui surat, pertemuan masyarakat, maupun laporan dari penduduk daerah kepada pemerintah pusat di Madinah. Keluhan tersebut umumnya berkaitan dengan kebijakan

para gubernur di beberapa wilayah yang dianggap tidak adil dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan harta negara, pembagian jabatan, serta perlakuan terhadap masyarakat setempat. Namun, karena sebagian masyarakat merasa bahwa keluhan mereka tidak segera mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, ketidakpuasan tersebut semakin meluas dan berubah menjadi tindakan politik yang lebih serius.

Situasi ini terlihat dari munculnya kelompok-kelompok masyarakat dari Mesir, Kufah, dan Basrah yang mulai mengorganisasi diri untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada khalifah di Madinah. Wilayah-wilayah tersebut memang dikenal sebagai pusat kekuatan politik dan militer Islam pada masa itu sehingga memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pemerintahan. Mereka mengirim delegasi yang terdiri dari tokoh masyarakat, prajurit, dan beberapa kelompok oposisi untuk meminta adanya perubahan dalam sistem pemerintahan. Tuntutan utama mereka adalah pergantian beberapa gubernur yang dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan, bertindak sewenang-wenang, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun keluarga dibanding kepentingan masyarakat umum.²⁹

Selain meminta pergantian pejabat daerah, para delegasi juga menuntut agar khalifah melakukan reformasi pemerintahan secara lebih luas. Mereka berharap pemerintahan kembali menerapkan prinsip keadilan dan kesederhanaan sebagaimana yang dianggap telah dijalankan pada masa Umar bin Khattab dan Abu Bakar ash-Shiddiq. Sebagian kelompok menilai bahwa pemerintahan pada masa Utsman terlalu memberi ruang kepada keluarga dekat khalifah dalam jabatan-jabatan penting sehingga

²⁹ Sri Wahyuni, Afni Raisya Lestari, and Zuhri Mulyani, Mela, "Sejarah Kepemimpinan Utsman Bin Affan : Analisis Peranannya Dalam Perkembangan Peradaban Islam History of the Leadership of Uthman Bin Affan : Analysis of His Role in the Development of Islamic Civilization," *ARJI Action Research Journal Indonesia* 7, no. 2 (2025), h. 706–720.

menimbulkan kecemburuan sosial dan politik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, reformasi dianggap perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan pusat.

Dalam perkembangannya, dialog antara para delegasi dan pemerintah tidak sepenuhnya berhasil meredakan ketegangan. Meskipun Utsman sempat memberikan beberapa janji perbaikan dan mencoba menyelesaikan masalah melalui musyawarah, kecurigaan serta ketidakpercayaan dari kelompok oposisi sudah semakin kuat. Keadaan tersebut menyebabkan situasi politik di Madinah menjadi tidak stabil dan akhirnya berkembang menjadi pemberontakan terbuka terhadap pemerintahan khalifah. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat terjadinya krisis politik dalam sejarah Islam awal dan berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan. Pada awalnya, Utsman berusaha menyelesaikan persoalan tersebut melalui dialog dan musyawarah. Beberapa sahabat Nabi juga mencoba menjadi penengah antara pemerintah dan kelompok oposisi. Akan tetapi, situasi politik semakin sulit dikendalikan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat. Menurut Tarikh al-Tabari dalam Tarikh al-Rusul wa al-Muluk (The History of al-Tabari) Volume 15:

Fase penting dalam krisis kekhalifahan bermula dari meningkatnya ketidakpuasan kelompok-kelompok oposisi di berbagai wilayah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Kelompok-kelompok ini secara diam-diam menjalin komunikasi melalui surat-menyurat rahasia untuk mengkritik para gubernur yang diangkat dari Madinah. Di hadapan masyarakat, mereka membawa slogan amar maruf nahi munkar, yaitu menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika gelombang protes mulai sampai ke Madinah, jalan dialog dan musyawarah terlebih dahulu ditempuh untuk meredakan keadaan. Dalam sebuah pertemuan terbuka, para perwakilan oposisi mempersoalkan kebijakan keuangan negara yang dianggap terlalu menguntungkan kerabat dekat khalifah dari Bani Umayyah, seperti pemberian dana dalam jumlah besar kepada Marwan bin al-Hakam dan Abdallah bin Khalid bin Asid.

Menanggapi hal itu, Utsman bin Affan menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan atas dasar hubungan kekeluargaan untuk membantu kerabat yang membutuhkan, sesuatu yang sebelumnya tidak dilakukan oleh para khalifah

terdahulu. Namun, beliau juga menyatakan bahwa apabila tindakan itu dianggap salah, maka harta tersebut akan dikembalikan ke baitul mal dan keputusan akhir diserahkan kepada pertimbangan masyarakat. Sikap terbuka ini sempat meredakan ketegangan karena dana tersebut akhirnya dikembalikan sehingga kelompok oposisi merasa puas dan kembali ke daerah masing-masing.

Pada tahap berikutnya, suasana di Madinah berubah menjadi penuh ketakutan. Walaupun pada awalnya para pemberontak masih membiarkan masyarakat berdiskusi di tempat umum, mereka kemudian mulai membentuk kelompok bersenjata yang berpatroli dan melarang warga berkumpul dalam jumlah besar. Penghinaan terhadap simbol-simbol kekhalifahan pun mulai terjadi secara terbuka. Dalam salah satu peristiwa, ketika Utsman melewati rumah Jabalah bin Amr al-Saidi dan mengucapkan salam, Jabalah tidak menjawab dengan baik bahkan mengancam akan mengikat leher khalifah jika beliau tidak memecat orang-orang dekatnya yang dianggap bermasalah, seperti Marwan, Muawiyah, dan Abdallah bin Sad.

Ketegangan semakin memuncak pada hari Jumat berikutnya ketika Utsman sedang berkhotbah di atas mimbar Rasulullah saw. Jahjah al-Ghifari berteriak menghina khalifah dengan menyebutnya “hyena” dan memerintahkannya turun dari mimbar. Ia kemudian merebut tongkat yang dipegang Utsman, tongkat yang dahulu digunakan oleh Nabi Muhammad saw., Abu Bakar, dan Umar, lalu mematahkannya di atas lututnya hingga serpihan kayu melukai lututnya sendiri dan menyebabkan infeksi parah di kemudian hari. Penghinaan itu segera berubah menjadi kekerasan fisik. Massa mulai melempari mimbar dengan batu hingga Utsman jatuh pingsan dan harus dibawa pulang ke rumahnya. Sejak kejadian itu, Utsman praktis terkurung di rumahnya dan hanya keluar jika sangat mendesak. Dalam keadaan darurat tersebut, beliau mengirim surat ke berbagai wilayah pemerintahan untuk meminta bantuan militer guna menghadapi pemberontakan yang semakin terbuka.

Pada tahap akhir krisis, para pemberontak memperketat pengepungan terhadap rumah khalifah dan memberi ultimatum agar Utsman mengundurkan diri atau menghadapi pedang. Di dalam rumah, Utsman mengumpulkan para sahabat, budak-budak setia, dan sejumlah pemuda dari kaum Ansar dan Muhajirin yang dikirim oleh keluarga mereka untuk melindungi khalifah, di antaranya al-Hasan bin Ali, Abdallah bin al-Zubayr, dan Muhammad bin Talhah. Ketegangan berubah menjadi bentrokan ketika seorang sahabat senior bernama Niyar bin Iyad mencoba menenangkan massa. Ia berdiri di depan rumah Utsman dan meminta khalifah agar mendengarkan tuntutan rakyat demi Allah. Namun, di tengah upaya mediasi tersebut, seorang penjaga dari dalam rumah melepaskan anak panah yang mengenai Niyar hingga meninggal dunia.

Kematian Niyar membuat massa pemberontak semakin marah. Mereka menuntut agar pelaku pembunuhan diserahkan untuk dihukum qisas. Akan tetapi, Utsman menolak permintaan itu dengan tegas. Beliau menyatakan bahwa beliau tidak akan membunuh seseorang yang sedang membelanya, sementara

massa sendiri datang dengan niat membunuh khalifah. Penolakan tersebut membuat keadaan semakin tidak terkendali. Massa kemudian menyerbu rumah Utsman, membakar pintu gerbang, dan memulai pertempuran jarak dekat. Marwan bin al-Hakam dan Said bin al-As memimpin pertahanan di depan rumah demi melindungi khalifah. Meskipun para pendukungnya siap berjuang sampai mati, Khalifah Utsman bin Affan tetap melarang penggunaan kekerasan untuk menyerang balik karena beliau tidak ingin darah sesama kaum Muslimin tertumpah di kota suci Madinah hanya demi mempertahankan kedudukannya. Beliau bahkan memerintahkan para pembelanya, termasuk Abdallah bin al-Zubayr dan al-Hasan bin Ali, untuk meletakkan senjata dan kembali ke rumah mereka masing-masing demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar.

Ketika gerbang depan kediaman resmi tersebut telah runtuh akibat lahapan api, situasi di dalam rumah berubah menjadi sangat sunyi namun mencekam. Dalam kondisi kritis ini, Utsman memilih untuk berserah diri sepenuhnya kepada takdir Allah Swt. dengan mengenakan celana panjang yang ikat pinggangnya dikencangkansuatu tindakan yang belum pernah beliau lakukan sejak zaman jahiliah dengan tujuan agar auratnya tidak tersingkap saat beliau gugur nanti. Selanjutnya, beliau duduk dengan tenang menghadap kiblat, membuka mushaf Al-Qur'an yang besar, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an secara khusyuk. Di sisi lain, para pemberontak mulai mengirimkan beberapa orang secara bergantian ke dalam kamar Utsman untuk mengeksekusinya. Orang pertama yang masuk menemui khalifah seketika gemetar, memohon ampunan Allah, dan mengurungkan niatnya lalu keluar membelot dari barisan setelah Utsman mengingatkannya akan kedudukan tinggi kekhalifahan serta besarnya dosa menumpahkan darah yang diharamkan. Gelombang eksekutor kedua dan ketiga yang dikirim setelahnya pun mengalami hal yang serupa mereka mendadak kehilangan keberanian untuk mengeksekusi sang khalifah setelah diingatkan tentang doa pengampunan yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah saw. bagi kaum mereka di masa lalu.

Melihat utusan mereka terus-menerus gagal dan urung melepaskan serangan, sekelompok pemberontak inti yang dipimpin oleh Muhammad bin Abi Bakr (putra Abu Bakar Ash-Shiddiq) memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Bersama dengan Kinanah bin Bishr, Sudan bin Humran, dan Amr bin al-Hamiq, mereka memanfaatkan situasi kekacauan akibat runtuhnya pintu depan untuk menerobos masuk secara langsung ke dalam area kamar kediaman khalifah guna menghindari sisa-sisa penjagaan yang masih bertahan.

Saat rombongan pemberontak tersebut berhasil menerobos masuk ke dalam kamar, mereka mendapati Utsman bin Affan sedang duduk bersama istrinya, Nailah, sambil membaca Al-Qur'an, tepatnya Surah Al-Baqarah. Aktivitas melantunkan kitab suci ini mencerminkan komitmen moral, kesalehan pribadi, serta keteguhan iman sang khalifah yang lebih memilih jalan damai ketimbang konfrontasi militer di akhir hayatnya. Muhammad bin Abi Bakr segera memimpin serbuan mendekati khalifah, lalu mencengkeram janggut lebat

Utsman dengan sangat kasar seraya menghina dengan berteriak, "Semoga Allah menghina kamu, wahai hyena! Muawiyah dan para gubernurmu tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini".

Menghadapi agresi verbal tersebut, Utsman dengan ketenangan luar biasa menatap pemuda itu dan menjawab, "Aku bukanlah hyena, melainkan hamba Allah dan Amirul Mukminin. Wahai putra saudaraku, lepaskan janggutku. Demi Allah, ayahmu (Abu Bakar) dahulu sangat menghormati dan memuliakan janggut yang kau cengkeram ini.". Mendengar nama mendiang ayahnya disebut, Muhammad bin Abi Bakr seketika dilingkupi rasa malu dan penyesalan mendalam, hingga ia melepaskan cengkeramannya dan melangkah mundur untuk mencoba menghalangi rekan-rekannya yang lain agar tidak menyakiti Utsman.

Kendati demikian, kemarahan massa pemberontak lainnya sudah tidak dapat dibendung lagi, yang ditandai dengan majunya Kinanah bin Bishr melompati Muhammad bin Abi Bakr sambil mengayunkan senjata tajam ke arah kepala Utsman. Ketika Utsman mencoba melindungi dirinya dengan tangan kosong, sabitan tersebut mengakibatkan jari-jari tangan beliau terputus. Mengalami serangan fisik yang fatal ini, Utsman tetap berserah diri dan menunjukkan keteguhan moral yang luar biasa. Melihat suaminya diserang secara brutal, Nailah dengan berani menjatuhkan badannya di atas tubuh Utsman untuk melindungi beliau, tetapi para pemberontak menghalaunya hingga beberapa jari tangan Nailah turut terputus akibat menahan mata pedang. Puncak kekejaman terjadi saat Sudan bin Humran dan Amr bin al-Hamiq merangsek maju menembus pertahanan terakhir tersebut dan menikamkan senjata mereka ke dada serta perut Utsman bin Affan secara berulang kali hingga beliau jatuh tersungkur. Sang khalifah akhirnya gugur sebagai syahid pada hari Jumat sore, tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah (656 M), di mana aliran darah segar dari tubuhnya memenuhi lantai kamar dan beberapa tetes pertamanya jatuh tepat di atas lembaran mushaf terbuka pada Surah Al-Baqarah ayat 137 yang berbunyi, "Maka Allah akan memeliharaku dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". sebuah fragmen tragis yang kemudian dicatat oleh sejarawan al-Tabari sebagai akhir dari fase krusial kepemimpinan Utsman bin Affan.³⁰

³⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir al-Amali Ath-Thabari., *The History of Al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk) The Crisis of the Early Caliphate the Reign of Uthman*, terj. R. Stephen Humphreys vol. XV (Albany: State University of New York Press, 1990), h.153-216

B. Perkembangan Awal Konflik Politik umat Islam

1. Proses baiat Ali bin Abi Thalib

Dalam situasi politik yang tidak stabil, mayoritas masyarakat Madinah membaiai Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali dianggap sebagai tokoh yang paling layak memimpin umat Islam karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW serta pengalamannya dalam pemerintahan dan perjuangan Islam. Selain dikenal sebagai sepupu dan menantu Nabi, Ali juga memiliki reputasi sebagai sosok yang berani, cerdas, dan memiliki pemahaman agama yang mendalam. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang berharap Ali mampu memulihkan kondisi politik umat Islam yang sedang mengalami krisis.³¹

Meskipun demikian, pengangkatan Ali tidak langsung diterima oleh seluruh kelompok Muslim. Sebagian pihak menilai bahwa Ali harus segera menghukum para pembunuh Utsman sebelum menjalankan pemerintahan. Tuntutan tersebut terutama datang dari keluarga Bani Umayyah dan para pendukung Utsman yang menganggap bahwa penegakan hukum atas pembunuhan khalifah merupakan prioritas utama. Mereka khawatir apabila para pelaku tidak segera dihukum, maka wibawa pemerintahan Islam akan semakin melemah dan kekacauan politik akan terus berlanjut. Menurut Marshall

G. S. Hodgson dalam bukunya yang berjudul *The Venture of Islam*:

Pembunuhan Utsman bin Affan menandai awal krisis politik dan kepemimpinan yang parah di dalam komunitas Muslim. Kematianannya bukan hanya menandai jatuhnya seorang khalifah, tetapi juga membuka periode konflik dan perpecahan yang intens di antara umat Muslim mengenai arah masa depan negara Islam. Setelah Utsman dibunuh oleh pemberontak di Madinah, perselisihan segera muncul di antara para sahabat Nabi mengenai keadilan, otoritas, dan suksesi. Banyak tokoh berpengaruh menuntut balas dendam atas

³¹ Muhammad Noor, Muhammad Husni, and Muhammad Iqbal, "Structuration in the Leadership of Caliph Ali Bin Talib Strukturasi Dalam Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Thalib," *Syams : Jurnal Studi Keislaman* 3, no. November (2022), h. 198–220..

kematian Utsman, sementara yang lain berpendapat bahwa pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan dan pemerintahannya. Situasi ini akhirnya berubah menjadi perjuangan yang lebih luas atas legitimasi dan kendali politik di dalam kekaisaran Muslim yang berkembang pesat.

Setelah pembunuhan Utsman, Ali bin Abi Talib diakui oleh banyak Muslim sebagai khalifah baru, khususnya oleh penduduk Madinah dan para pendukung dari Irak. Namun, kepemimpinannya ditentang oleh beberapa sahabat Nabi yang terkemuka, termasuk Aisyah binti Abi Bakr, yang menuntut hukuman segera bagi mereka yang bertanggung jawab atas kematian Utsman. Konflik antara faksi-faksi ini akhirnya berkembang menjadi perang terbuka, dimulai dengan Pertempuran Unta di dekat Basra. Meskipun Ali meraih kemenangan, perselisihan mengenai keadilan bagi Utsman tetap tidak terselesaikan dan terus melemahkan persatuan di antara umat Muslim. Loyalitas politik semakin bergeser dari pusat keagamaan di Madinah menuju kelompok-kelompok militer provinsi di Irak dan Suriah.

Krisis semakin memburuk ketika Muawiyah, gubernur Suriah dan kerabat Utsman, menolak mengakui otoritas Ali dan malah menyerukan pembalasan terhadap para pembunuh khalifah sebelumnya. Konfrontasi antara Ali dan Muawiyah memuncak dalam Pertempuran Siffin, di mana pertempuran berkepanjangan dan negosiasi politik gagal menghasilkan resolusi yang menentukan. Proses arbitrase yang menyusul menciptakan perpecahan lebih lanjut di antara pendukung Ali, yang menyebabkan munculnya Kharijites, sebuah kelompok yang menolak Ali dan Muawiyah karena berkompromi atas apa yang mereka yakini seharusnya diputuskan semata-mata berdasarkan Al-Qur'an. Fragmentasi ini menunjukkan bagaimana pembunuhan Utsman telah berkembang menjadi krisis yang lebih luas yang memengaruhi tidak hanya politik tetapi juga interpretasi agama dan identitas komunal.

Konsekuensi kematian Utsman terus membentuk masa depan peradaban Islam jauh setelah berakhirnya Fitnah Pertama. Konflik tersebut melemahkan persatuan ideal yang telah menjadi ciri khas komunitas Muslim awal pada masa Nabi dan para khalifah sebelumnya. Konflik ini juga berkontribusi pada munculnya perpecahan politik dan teologis yang berkepanjangan, khususnya antara kelompok yang mendukung Ali dan kelompok yang mendukung kepemimpinan Umayyah. Selain itu, pusat otoritas politik secara bertahap bergeser dari Madinah menuju ibu kota provinsi yang termiliterisasi seperti Kufa dan Damaskus. Akibatnya, negara Muslim semakin bergantung pada kekuatan militer dan aliansi regional untuk mempertahankan persatuan. Oleh karena itu, pembunuhan Utsman menjadi salah satu titik balik paling menentukan dalam

sejarah Islam awal, karena memicu krisis otoritas, legitimasi, dan kohesi komunal yang berkepanjangan di dunia Muslim.³²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wafatnya Utsman bukan sekadar peristiwa politik biasa, tetapi menjadi awal munculnya krisis legitimasi kepemimpinan dalam dunia Islam. Umat Islam mulai mengalami perbedaan pandangan mengenai siapa yang memiliki hak dan kewenangan untuk memimpin pemerintahan. Kondisi ini kemudian melahirkan berbagai kelompok politik yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda.

2. Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal

Perang Jamal merupakan konflik politik besar pertama yang terjadi di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Peristiwa ini terjadi pada tahun 36 H/656 M pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah Islam, Perang Jamal sering disebut sebagai bagian awal dari Fitnah Kubra, yaitu masa terjadinya konflik internal yang menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam. Konflik ini bukan hanya persoalan pribadi antar tokoh, tetapi berkaitan erat dengan kondisi politik, sosial, dan pemerintahan Islam yang sedang mengalami perubahan besar setelah wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat luas.

Perang Jamal melibatkan sejumlah tokoh penting dalam sejarah awal Islam yang memiliki kedudukan besar di tengah masyarakat Muslim. Tokoh-tokoh tersebut sebagian besar merupakan sahabat Nabi Muhammad saw. yang sebelumnya memiliki hubungan dekat dan peran penting dalam perjuangan Islam. Akan tetapi, perbedaan pandangan politik setelah wafatnya Utsman bin Affan menyebabkan mereka berada pada posisi yang berbeda dalam konflik tersebut. Meskipun demikian, para tokoh yang terlibat pada

³² Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), h. 214-215.

dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keutuhan umat Islam dan menegakkan keadilan, hanya saja mereka berbeda dalam menentukan langkah politik yang dianggap paling tepat. Berikut peran dan pandangan para tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa tersebut:

a. Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang diba'iat setelah wafatnya Utsman bin Affan pada tahun 35 H/656 M. Ali dikenal sebagai salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad saw., sepupu sekaligus menantu Nabi, serta termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Dalam sejarah Islam, Ali dikenal memiliki ilmu pengetahuan yang luas, keberanian dalam peperangan, dan kedekatan yang sangat kuat dengan Nabi Muhammad saw.

Setelah terbunuhnya Utsman, situasi politik di Madinah berada dalam keadaan tidak stabil. Sebagian besar masyarakat kemudian memilih Ali sebagai khalifah karena dianggap memiliki kemampuan dan wibawa untuk memulihkan kondisi umat Islam. Akan tetapi, sejak awal pemerintahannya Ali menghadapi tantangan politik yang sangat berat, terutama terkait tuntutan untuk segera menghukum para pembunuh Utsman.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, Ali mengambil sikap hati-hati. Ia tidak langsung melaksanakan qisas terhadap para pelaku pembunuhan Utsman karena menilai bahwa kondisi negara saat itu masih kacau dan belum memungkinkan untuk melakukan proses hukum secara adil. Menurut Ali, stabilitas pemerintahan harus dipulihkan terlebih dahulu agar penegakan hukum tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Selain itu, para pelaku pembunuhan Utsman juga sulit diidentifikasi secara pasti karena bercampur dengan berbagai kelompok masyarakat dan sebagian berada di sekitar pemerintahan baru.

Sikap Ali yang menunda pelaksanaan hukuman inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan dengan sebagian sahabat Nabi lainnya. Meskipun demikian, Ali tetap berusaha menghindari perang dan lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Ali sebenarnya tidak menginginkan terjadinya peperangan antar sesama Muslim karena hal tersebut dapat merusak persatuan umat Islam yang telah dibangun sejak masa Nabi Muhammad saw.

b. Aisyah binti Abu Bakar

Aisyah binti Abu Bakar merupakan salah satu istri Nabi Muhammad saw. dan putri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama dalam Islam. Aisyah dikenal sebagai perempuan yang memiliki kecerdasan, pengetahuan agama yang luas, dan berperan penting dalam periwayatan hadis Nabi. Dalam sejarah Islam, Aisyah menjadi salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh pada masa awal perkembangan Islam.

Dalam konflik Perang Jamal, Aisyah muncul sebagai salah satu tokoh utama yang menuntut agar pembunuh Utsman segera dihukum. Menurut pandangannya, penegakan qisas terhadap pembunuh khalifah merupakan langkah penting untuk menegakkan keadilan dan menjaga kewibawaan pemerintahan Islam. Aisyah merasa bahwa keterlambatan penghukuman dapat memperburuk keadaan politik dan memunculkan kekacauan yang lebih besar di tengah masyarakat Muslim.

Aisyah kemudian bersama Talhah dan Zubair berangkat menuju Basrah untuk menggalang dukungan politik dari masyarakat. Tujuan awal keberangkatan mereka sebenarnya bukan untuk memerangi Ali, melainkan untuk memperkuat tuntutan penegakan hukum terhadap pembunuh Utsman dan mencari jalan penyelesaian terhadap

konflik politik yang sedang terjadi. Akan tetapi, situasi politik yang penuh ketegangan dan provokasi akhirnya menyebabkan perundingan damai gagal dilakukan.³³

Dalam peperangan tersebut, Aisyah berada di atas seekor unta yang menjadi pusat pertahanan pasukannya. Karena itulah perang ini dikenal dengan nama “Perang Jamal” atau Battle of the Camel. Keberadaan Aisyah dalam perang menunjukkan bahwa ia memiliki pengaruh besar terhadap kelompok pendukungnya. Setelah perang berakhir, Ali tetap memperlakukan Aisyah dengan hormat dan mengantarkannya kembali ke Madinah dengan perlindungan yang baik. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi konflik politik, hubungan penghormatan antar sahabat Nabi tetap dijaga.

c. Talhah bin Ubaidillah

Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu sahabat besar Nabi Muhammad saw. yang dikenal sebagai tokoh Quraisy terkemuka dan termasuk golongan awal yang masuk Islam. Talhah juga dikenal sebagai salah satu sahabat yang dijamin masuk surga menurut hadis Nabi. Dalam berbagai peperangan pada masa Nabi, Talhah memiliki peran penting dan dikenal sebagai pribadi yang berani serta setia kepada Islam.

Pada awalnya, Talhah termasuk orang yang membaiai Ali sebagai khalifah setelah wafatnya Utsman. Akan tetapi, seiring berkembangnya situasi politik, Talhah kemudian bergabung dengan kelompok yang menuntut agar pembunuh Utsman segera dihukum. Talhah berpandangan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan khalifah harus menjadi prioritas utama sebelum stabilitas politik dipulihkan.

Bersama Aisyah dan Zubair, Talhah berangkat ke Basrah untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Kehadirannya memberikan pengaruh besar karena ia merupakan salah satu sahabat senior yang dihormati oleh umat Islam. Meskipun terlibat

³³ Rahmawati Selviana, Syamzan Syukur, “Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal Dan Perang” 3, no. 1 (2024), h. 1–11

dalam konflik politik dengan Ali, Talhah sebenarnya tetap menginginkan perdamaian dan tidak berniat memecah belah umat Islam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum perang berlangsung, upaya perdamaian sebenarnya sempat dilakukan antara kedua pihak.

d. Zubair bin Awwam

Zubair bin Awwam merupakan salah satu sahabat senior Nabi Muhammad saw. dan termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Zubair dikenal sebagai pejuang yang memiliki keberanian tinggi dan memiliki hubungan keluarga dekat dengan Nabi Muhammad saw. Ia juga termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga.

Dalam Perang Jamal, Zubair berada di pihak yang menuntut penegakan qisas terhadap pembunuh Utsman. Bersama Aisyah dan Talhah, ia pergi menuju Basrah untuk mengumpulkan dukungan politik dari masyarakat. Zubair memandang bahwa penegakan keadilan terhadap pembunuh khalifah sangat penting demi menjaga persatuan dan ketertiban umat Islam.

Perang Jamal merupakan konflik bersenjata pertama yang terjadi di kalangan umat Islam pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Konflik ini muncul setelah terbunuhnya Utsman bin Affan yang menimbulkan ketegangan politik di tengah masyarakat Muslim. Setelah Ali dibaiat sebagai khalifah, sebagian sahabat menuntut agar para pelaku pembunuhan Utsman segera dihukum. Tuntutan tersebut terutama datang dari Aisyah binti Abu Bakar, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam yang menganggap bahwa penegakan hukum harus segera dilakukan demi menjaga keadilan dan kestabilan umat Islam. Menurut Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, situasi politik setelah wafatnya Utsman berada dalam kondisi yang sangat tegang karena

muncul berbagai kelompok yang memiliki kepentingan politik berbeda terhadap pemerintahan Islam.

Dalam kondisi tersebut, Aisyah bersama Thalhah dan Zubair berangkat menuju Basrah untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Tujuan mereka bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan menuntut penyelesaian kasus pembunuhan Utsman dan memperbaiki kondisi politik umat Islam yang semakin tidak stabil. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib juga bergerak menuju Basrah dengan tujuan mencegah terjadinya perpecahan yang lebih besar di kalangan kaum Muslimin. Al-Tabari dalam *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* menjelaskan bahwa sebelum peperangan terjadi, kedua belah pihak sebenarnya telah melakukan dialog dan upaya perdamaian untuk menghindari pertumpahan darah sesama Muslim. Meskipun peluang perdamaian sempat terbuka, situasi politik yang telah dipenuhi ketegangan dan provokasi akhirnya menyebabkan perang tidak dapat dihindari. Sebagaimana dalam kitab *Tarikh Al- Thabari Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* (The History of Al-Tabari) volume 16.

Al-Zubayr dan Talhah kemudian keluar bersama para pemimpin Mudar dan mengutus Abd al-Rahman b. al-Harith b. Hishdm untuk memimpin sayap kanan (yang merupakan Rabiah) dan mengutus Abd al-Rahman b. Attab b. Asid ke sayap kiri, sementara mereka sendiri tetap berada di tengah, dan bertanya, "Apa semua ini?" "Orang-orang Kufah menyerang kami di malam hari," jawab mereka. Mendengar itu, mereka berkata, "Kami tahu bahwa Ali tidak akan berhenti sampai ia menumpahkan darah dan menodai apa yang suci dan bahwa ia tidak akan pernah mencapai kesepakatan dengan kami." Kemudian keduanya kembali bersama orang-orang Basra, yang memukul mundur orang-orang Kufa (yang telah melancarkan serangan mendadak) dan memaksa mereka kembali ke perkemahan mereka. Ali dan orang-orang Kufa mendengar suara itu. Seorang pria telah ditempatkan di dekat Ali untuk memberitahunya apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi ketika dia bertanya, "Apa yang terjadi?" pria itu menjawab: "Pasukan mereka melakukan serangan mendadak terhadap kami di malam hari, tetapi kami mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka. Kemudian kami mendapati mereka siap berperang, dan mereka mulai menyerang, sehingga semua orang bangkit untuk bertempur." Ali kemudian berkata kepada komandan sayap kanan pasukannya, "Serang sayap kanan!" dan

kepada komandan sayap kiri: "Serang sayap kiri! Aku tahu bahwa Talhah dan al Zubayr tidak akan berhenti sampai mereka menumpahkan darah dan menodai apa yang suci dan bahwa mereka tidak akan pernah mencapai kesepakatan dengan kami dan bahwa Sabaiyyah tidak akan berhenti menimbulkan masalah. Ali kemudian berteriak kepada orang-orang: "Tahan!" Bukan apa-apa!

Kini telah menjadi keputusan bulat mereka mengenai fitnah ini untuk tidak menjadi penyerang pertama. Dengan cara itu, mereka dapat memberikan bukti dan menuntut hak terhadap pihak lain. [Mereka sepakat bahwa] mereka tidak akan membunuh siapa pun yang melarikan diri, tidak akan menghabisi siapa pun yang terluka, dan tidak akan mengejar. Inilah sebagian dari apa yang telah disepakati kedua belah pihak dan kemudian diumumkan secara terbuka.

Menurut Al-Sari (tulisan) - Shuayb - Sayf - Muhammad dan Talhah dan Abu Amr: Kab bin Sur datang kepada Aisyah dan berkata: "Lakukan sesuatu untuk menyelamatkan situasi, karena pasukan bertekad untuk berperang! Semoga Allah memberimu keberhasilan dalam memulihkan perdamaian!" Maka ia menaiki tandunya, dan mereka menutupi tandunya dengan baju zirah pelindung; kemudian mereka mengirimkan untanya yang bernama Askar ke depan. Yala bin Umayyah, yang telah membelinya seharga 200 dinar, telah mengangkatnya ke atas unta itu. Ketika ia keluar dari rumah-rumah, ia mendengar keributan, jadi ia berhenti dan segera mendengar keributan yang lebih keras lagi. "Apa itu?" tanyanya, dan mereka menjawab, "Itu adalah keributan tentara." "Untuk kebaikan atau keburukan?" tanyanya. "Untuk keburukan." "Dari pihak mana pun keributan ini berasal," katanya, "mereka akan dikalahkan." Demi Allah! Ia masih berdiri ketika kekalahan mengejutkannya. Al-Zubayr berangkat ke arah yang kebetulan dihadapinya dan mengambil jalan menuju Wadi al-Siba'. Adapun Talhah, sebuah panah dari pemanah tak dikenal menancap di lututnya ke sisi kudanya. Ketika sepatunya berlumuran darah dan ia mengantuk, ia berkata kepada ghulamnya: "Naiklah ke belakangku di atas kuda. Pegang aku erat-erat, dan carikan aku tempat untuk turun." Maka mereka pergi ke al-Basrah, dan ia menceritakan kisah dirinya dan al-Zubayr dalam puisi berikut:

Aku tersesat ketika mengejar bagian (rezeki) karena kebodohan yang kulakukan, setelah kehilangan akal sehatku.

Aku seperti al-Kusai dalam penyesalanku ketika, bertentangan dengan penilaianku yang lebih baik, aku membeli persetujuan Banu Sahm.

Aku menaati mereka dengan memisahkan diri dari Al Lay, yang kemudian melemparkan daging dan darahku kepada binatang buas.³⁴

³⁴ Abu Jafar Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir al-Amali Ath-Thabari., *The History of Al-Tabari (Tarikh al-rusul wal-muluk) The Community Divided*, terj. Adrian Brockett vol. XVI (Albany: State University of New York Press, 1997), h.122-125.

Riwayat diatas menunjukkan bahwa eskalasi konflik pada Perang Jamal tidak sepenuhnya dikehendaki oleh para pemimpin utama di kedua belah pihak, yaitu Ali bin Abi Thalib, Aisyah binti Abu Bakar, Talhah, dan al-Zubayr. Keterlibatan Aisyah yang pada mulanya berupaya menjadi penengah justru terjebak dalam situasi yang tidak terkendali akibat provokasi pihak ketiga. Meskipun para pemimpin ini telah berupaya melakukan rekonsiliasi dan menyepakati gencatan senjata, serangan mendadak oleh kelompok radikal di malam hari memicu kesalahpahaman fatal di kedua kubu.

Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin utama kehilangan kendali atas komando lapangan, sehingga konflik yang sejatinya hendak diredam justru berubah menjadi peperangan terbuka akibat manipulasi faksi-faksi yang memiliki agenda politik tersendiri. Penyesalan mendalam atas kegagalan ini tergambar jelas dalam bait-bait puisi Talhah menjelang akhir hayatnya, di mana ia mengakui kebodohan langkah politiknya yang memisahkan diri dari persatuan demi memenuhi ambisi kelompok tertentu. Puisi tersebut menjadi refleksi kritis sekaligus pengakuan tragis bahwa keputusan politik yang bertentangan dengan penilaian objektif terutama ketika terjerat oleh kepentingan kelompok hanya akan berakhir pada kehancuran dan penyesalan yang sia-sia.

Pasukan Ali akhirnya berhasil memenangkan peperangan tersebut. Setelah perang berakhir Ali tetap memperlakukan pihak lawan dengan baik, menghormati Aisyah sebagai istri Nabi Muhammad SAW serta memulangkannya ke Madinah dengan pengawalan khusus. Sikap tersebut menunjukkan upaya Ali untuk menjaga persatuan umat Islam meskipun konflik politik telah terjadi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab *Al-Bidayah wa al-Nihayah* .

Ketika Ummul Mukminin Aisyah hendak meninggalkan kota Bashrah, Ali mengirim segala sesuatu yang diperlukan untuknya, mulai dari kendaraan, perbekalan, barang-barang dan lainnya. Dan beliau mengizinkan pasukan Aisyah yang selamat untuk kembali bersamanya atau jika mau mereka boleh tetap

tinggal di Bashrah. Beliau mengirim saudara lelaki Aisyah, Muhammad bin Abi Bakar, untuk menyertainya. Pada hari keberangkatan, Ali mendatangi rumah tempat Aisyah menginap, beliau berdiri di depan pintu bersama orang-orang. Kemudian Aisyah keluar dari rumah dalam sekedupnya, beliau mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Aisyah berkata, "Wahai bunayya, janganlah saling mencela di antara kalian. Demi Allah sesungguhnya apa yang telah terjadi antara aku dan Ali hanyalah masalah yang biasa terjadi antara seorang wanita dengan ipar-iparnya. Sesungguhnya, meski aku dahulu mencelanya namun sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang terpilih." Ali berkata, "Ia benar, demi Allah tidak ada masalah yang terjadi antara kami berdua kecuali seperti yang telah disebutkan. Sesungguhnya ia adalah istri nabi kalian di dunia dan di akhirat." Kemudian Ali berjalan mengiringinya sampai beberapa mil sembari mengucapkan selamat jalan kepadanya. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu awal bulan Rajab tahun 36 Hijriyah. Aisyah dan rombongan berangkat menuju Makkah kemudian ia menetap di sana hingga musim haji pada tahun itu juga kemudian ia kembali ke Madinah.³⁵

3. Mobilisasi Pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan di Perang Shiffin

Peristiwa menuju Perang Shiffin tidak dapat dipisahkan dari eskalasi konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ketegangan yang terus meningkat membuat kedua belah pihak melakukan konsolidasi kekuatan militer secara besar-besaran. Dalam situasi inilah, pergerakan pasukan dari Kufah dan Syam menjadi titik awal terjadinya konfrontasi terbuka yang kelak dikenal sebagai Perang Shiffin. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Bidayah wa al-Nihayah*

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berangkat dari Kufah bertujuan menduduki Syam. Beliau mempersiapkan pasukan di Nukhailah, Beliau menunjuk Abu Masud Uqbah bin Amru al-Badri al-Anshari sebagai amir sementara di Kufah. Sebetulnya sejumlah orang menganjurkan agar beliau tetap tinggal di Kufah dan cukup mengirim pasukan ke sana, namun beberapa orang lainnya menganjurkan agar beliau turut keluar bersama pasukan. Sampailah berita kepada Muawiyah bahwa Ali telah keluar bersama pasukan menuju Syam. Muawiyah bermusyawarah dengan Amru bin al-Ash, ia berkata kepada Muawiyah, "Keluirlah engkau juga bersama pasukan!" Lalu Amru bin al-Ash

³⁵ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin*, h. 476-478.

bangkit berpidato di hadapan manusia seraya berkata, "Sesungguhnya penduduk Kufah dan Bashrah telah musnah pada peperangan Jamal, tidak tersisa bersama Ali kecuali segelintir orang saja. Termasuk sekelompok orang yang membunuh Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Allah Allah! Jangan sia-siakan hak kalian! Jangan biarkan darah Utsman tertumpah sia-sia!"

Lalu ia menulis pesan kepada seluruh pasukan di Syam, dalam waktu singkat mereka sudah berkumpul dan mengangkat panji-panji bagi amir masing-masing. Pasukan Syam telah bersiap-siap berangkat! Mereka bergerak menuju Eufrat dari arah Shiffin. Sementara di lain pihak Ali bersama pasukan bergerak dari Nukhailah menuju tanah Syam. Ali mengirim Ziyad bin an-Nadhar al-Haritsi maju ke depan bersama delapan ribu pasukan bersama, diiringi oleh Syuraih bin Hani bersama empat ribu pasukan. Mereka berangkat dengan mengambil jalan lain. Sementara Ali bersama pasukan lain terus berjalan hingga menyeberangi sungai Tigris lewat jembatan Manbij. Kemudian dua pasukan detasemen bergerak maju ke depan. Sampai berita ke telinga mereka bahwa Muawiyah telah keluar bersama pasukan dari Syam untuk bertemu dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mereka ingin menyambutnya namun mereka takut karena jumlah mereka sedikit dibanding jumlah pasukan Muawiyah. Mereka berbelok jalan dan berusaha menyeberang dari arah Anat. Namun penduduk Anat tidak membolehkan mereka melintas. Maka mereka pun terus berjalan dan menyeberang dari Hiet, Kemudian mereka berhasil menyusul Ali dan pasukan inti yang telah mendahului mereka. Ali berkata, "Pasukan detasemenku justru berjalan di belakang pasukan inti?" Mereka meminta maaf kepada Ali dengan menyampaikan apa yang mereka alami.

Ali menerima permintaan maaf mereka. Kemudian Ali mengirim pasukan detasemen ke depan untuk menyambut pasukan Muawiyah setelah menyeberang sungai Eufrat. Mereka disambut oleh Abul Awar Amru bin Sufyan, pemimpin detasemen pasukan Syam. Mereka saling berhadapan. Ziyad bin an-Nadhar, pemimpin detasemen pasukan Iraq, mengajak mereka untuk berbaiat kepada Ali. Namun mereka tidak menyambutnya. Lalu ia menyampaikan informasi ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali mengirim al-Asytar an-Nakhai sebagai amir pasukan infantri ke depan. Di sebelah kanan pasukan dipimpin oleh Ziyad dan di sebelah kiri pasukan dipimpin oleh Syuraih. Ali memerintahkan agar tidak maju memulai perang kecuali bila mereka yang memulainya. Akan tetapi memerintahkan agar terus mengajak mereka berbaiat. Jika mereka menolak maka janganlah menyerang kecuali bila merekalah yang mulai menyerang. Janganlah mendekat kepada mereka seolah ingin menyerang dan janganlah menjauh dari mereka seolah-olah takut kepada mereka. Akan tetapi hadapilah mereka dengan sabar hingga aku (Ali) menyusulmu. Aku segera menyusulmu dari belakang insya Allah.³⁶

³⁶ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin*, h. 480-482.

Berdasarkan riwayat di atas, pergerakan militer yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang berangkat dari Kufah menuju Syam serta konsentrasi pasukan di Nukhailah, diikuti oleh mobilisasi yang dilakukan oleh pihak Muawiyah, menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya bersifat militer, tetapi juga sarat dengan dimensi politik dan persoalan legitimasi kekuasaan. Kedua belah pihak sama-sama melakukan mobilisasi secara sistematis, yang menandakan bahwa ketegangan politik telah berkembang menuju konfrontasi terbuka. Pidato dan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Amru bin al-Ash memperlihatkan bahwa isu utama yang diangkat bukan semata-mata soal kekuasaan, tetapi juga penggunaan narasi “penegakan keadilan atas darah Utsman” sebagai dasar legitimasi moral. Hal ini menunjukkan bahwa konflik berkembang tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam ruang opini dan pembentukan persepsi politik di tengah masyarakat.

Di sisi lain, sikap Ali bin Abi Thalib yang menekankan agar pasukan tidak memulai peperangan mencerminkan upaya menjaga prinsip kehati-hatian serta menghindari pertumpahan darah selama masih memungkinkan. Instruksi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan etis dan tanggung jawab kepemimpinan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan militer pada masa itu. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa Perang Shiffin merupakan akumulasi dari krisis politik pasca wafatnya Utsman bin Affan, perbedaan pandangan terkait legitimasi kepemimpinan, serta penggunaan isu keadilan sebagai instrumen mobilisasi sosial dan politik.

4. Jalannya Perang Shiffin

Perang Shiffin merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Islam yang memperlihatkan eskalasi konflik antara pasukan Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa ini tidak hanya menggambarkan konfrontasi

militer, tetapi juga mencerminkan dinamika politik, strategi perang, serta proses negosiasi yang berlangsung di tengah ketegangan yang semakin meningkat. Berikut ini adalah riwayat jalannya peristiwa Perang Shiffin sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Bidayah wa al-Nihayah:

Ali mengirim surat khalifah ini bersama pasukan detasemen yang dipimpin oleh al-Harits bin Jumhan al-Jufi. Ketika al-Asytar tiba dan bergabung bersama pasukan detasemen di depan, ia melaksanakan apa yang telah diinstruksikan oleh Ali. Lalu ia maju berhadapan dengan Abul Awar as-Sulami, pemimpin detasemen pasukan Muawiyah. Kedua pasukan saling berhadapan seharian penuh. Di penghujung siang, Abul Awar as-Sulami menyerang mereka namun mereka berhasil menghadangnya maka terjadilah pertempuran kecil selama beberapa saat. Sore harinya pasukan Syam kembali. Keesokan harinya kedua pasukan saling berhadapan kembali. Mereka saling menunggu. Tiba-tiba al-Asytar maju menyerang, sehingga gugurlah Abdullah bin al-Mundzir At-Tannukhi -ia adalah salah seorang penunggang kuda yang handal dari pasukan Syam-. Ia dibunuh oleh salah seorang pasukan deta-semen Iraq bernama Zhibyan bin Umarah at-Tamimi. Melihat hal itu, Abul Awar bersama pasukannya menyerang pasukan Iraq. Ia bersama pasukan maju menghadang mereka.

Saat berhadapan al-Asytar menantang Abul Awar berduel satu lawan satu. Namun Abul Awar tidak meladeninya. Sepertinya ia memandang al-Asytar bukanlah lawan yang seimbang. Ketika malam tiba kedua pasukan menghentikan peperangan pada hari kedua ini. Keesokan paginya pada hari ketiga, Ali bin Abi Thalib tiba bersama pasukannya. Kemudian Muawiyah juga tiba bersama pasukannya. Lalu kedua pasukan saling berhadapan di tempat yang bernama Shiffin dekat sungai Eufrat sebelah timur wilayah Syam. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Dzulhijjah tahun 36 H. Kemudian Ali berhenti dan mengambil tempat bermalam bagi pasukannya. Akan tetapi Muawiyah bersama pasukannya telah lebih dahulu mengambil tempat, mereka mengambil tempat di sumber air, tempat yang paling strategis dan luas. Lalu pasukan Iraq datang untuk mengambil air. Namun pasukan Syam menghalanginya. Lalu terjadilah pertempuran kecil disebabkan masalah air tersebut. Masing-masing pasukan meminta bantuan kepada rekannya. 154 Kemudian kedua belah pihak sepakat berdamai dalam masalah air ini. Sehingga mereka berdesak-desakan di sumber mata air tersebut, mereka tidak saling bicara dan tidak saling mengganggu satu sama lain.

Ali berdiam selama dua hari di tempat itu tanpa mengirim sepucuk surat pun kepada Muawiyah dan Muawiyah juga tidak mengirim sepucuk surat pun kepada beliau. Kemudian Ali mengirim seorang utusan kepada Muawiyah namun kesepakatan belum juga tercapai. Muawiyah tetap bersikeras menuntut darah Utsman yang telah dibunuh secara zalim. Karena kebuntuan tersebut pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak. Setiap hari Ali mengirim

seorang amir pasukan untuk maju bertempur. Demikian pula Muawiyah, setiap hari ia mengirim seorang amir untuk maju bertempur. Kadang kala dalam satu hari kedua belah pihak terlibat dua kali pertempuran. Peristiwa itu terjadi sebulan penuh pada bulan Dzulhijjah. Lepas bulan Dzulhijjah dan masuk bulan Muharram pada tahun tiga puluh tujuh hijriyah, kedua belah pihak meminta agar perang dihentikan, dengan harapan semoga Allah mendamaikan mereka di atas satu kesepakatan yang dapat menghentikan pertumpahan darah di antara mereka.

Kemudian juru runding terus bolak balik menemui Ali dan Muawiyah sementara kedua belah pihak menahan diri dari pertempuran, demikian kondisinya hingga berakhir bulan Muharram tahun itu tanpa tercapai satupun kesepakatan. Ali bin Abi Thalib menyuruh Martsad bin al-Harits al-Jasymi untuk mengumumkan kepada pasukan Syam saat terbenam matahari, "Ketahuilah, sesungguhnya Amirul Mukminin mengumumkan kepada kalian, Sesungguhnya aku telah bersabar menunggu kalian kembali kepada kebenaran. Dan aku telah menegakkan hujjah atas kalian namun kalian tidak menyambutnya. Dan sesungguhnya aku telah memberi udzur kepada kalian dan telah memperlakukan kalian dengan adil. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."

Mendengar pengumuman pasukan Syam segera menemui para amir mereka dan menyampaikan pengumuman yang mereka dengar tadi. Maka bangkitlah Muawiyah dan Amru, keduanya segera menyiapkan pasukan di sayap kanan dan di sayap kiri. Demikian pula Ali, ia menyiapkan pasukan pada malam itu. Beliau menempatkan al-Asytar an-Nakhai sebagai pemimpin pasukan berkuda Kufah, pasukan infantri Kufah dipimpin oleh Ammar bin Yasir, pasukan berkuda Bashrah dipimpin oleh Sahal bin Hunaif dan pasukan infantri Bashrah dipimpin oleh Qais bin Saad dan Hasyim bin Utbah, dan pemimpin para qari adalah Misar bin Fadaki at-Tamimi. Ali maju menghadap pasukan dan menyerukan supaya jangan seorang pun memulai pertempuran hingga merekalah yang memulainya dan menyerang kalian, jangan membunuh orang yang terluka, jangan mengejar orang yang melarikan diri, jangan menyingkap tirai kaum wanita dan jangan melakukan pelecehan terhadap kaum wanita, meskipun kaum wanita itu mencaci maki pemimpin dan orang-orang shalih kalian!"

Pagi harinya Muawiyah muncul, di sebelah kanan pasukannya berdiri Ibnu Dzil Kala al-Himyari, di sebelah kiri pasukannya berdiri Habib bin Maslamah al-Fihri, di depan pasukan berdiri Abul Awar as-Sulami. Sedangkan pasukan berkuda Damaskus dipimpin oleh Amru bin al-Ash, dan pasukan infantri Damaskus dipimpin oleh Adh-Dhahhak bin Qais. Jabir al-Jufi meriwayatkan dari Abu Jafar al-Baqir dan Zaid bin al-Hasan serta yang lainnya, mereka berkata, "Ali bin Abi Thalib bergerak menuju Syam dengan kekuatan seratus lima puluh ribu personil yang berasal dari penduduk Iraq. Dan Muawiyah bergerak dengan jumlah personil sebanyak itu juga yang berasal dari penduduk Syam. Yang lain mengatakan, Ali berangkat dengan membawa seratus ribu lebih

personil. Sedang Muawiyah berangkat dengan membawa seratus tiga puluh ribu personil.

Sejumlah orang dari pasukan Syam bersumpah untuk tidak lari dari medan perang, mereka mengikat diri mereka dengan sorban-sorban mereka. Mereka berjumlah lima barisan dan diikuti enam barisan yang lain. Demikian pula halnya pasukan Iraq, mereka berjumlah sebelas shaf yang melakukan hal serupa. Mereka saling berhadapan dengan kondisi seperti itu pada hari pertama di bulan Shafar tahun 37 H bertepatan pada hari Rabu. Panglima perang pasukan Iraq adalah al-Asytar an-Nakhai, sedangkan panglima perang pasukan Syam pada saat itu adalah Habib bin Maslamah. Kedua pasukan terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit pada hari itu, kemudian kedua pasukan menarik diri pada petang hari. Pertempuran pada hari itu berlangsung seimbang.

Pada keesokan harinya yakni hari Kamis, panglima perang pasukan Iraq pada hari itu adalah Hasyim bin Utbah dan panglima perang pasukan Syam adalah Abul Awar as-Sulami. Pada hari itu kedua pasukan terlibat lagi dalam pertempuran yang sangat sengit, pasukan berkuda bertempur dengan pasukan berkuda dan pasukan infantri bertempur dengan pasukan infantri. Pada petang hari kedua belah pihak menarik diri dari medan pertempuran. Kedua pasukan sama-sama bertahan dan pertempuran antara keduanya berimbang.

Kemudian pada hari ketiga yakni pada hari Jumat Ammar bin Yasir memimpin pasukan Iraq sementara Amru bin al-Ash memimpin pasukan Syam. Selanjutnya kedua pasukan terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit Amar menyerang Amru bin al-Ash beserta pasukannya hingga mereka terpukul mundur. Pada peperangan ini Ziyad bin an-Nadhar al-Haritsi berduel dengan seorang lelaki. Ketika keduanya telah saling berhadapan ternyata keduanya telah saling mengenal. Ternyata pula keduanya adalah saudara seibu. Maka keduanya pun menarik diri dan kembali ke pasukan masing-masing. Demikianlah peperangan terus berlanjut dengan kondisi seperti itu selama tujuh hari. Sore hari kedua belah pihak menarik diri dari medan pertempuran. Kedua belah pihak sama-sama bertahan selama tujuh hari ini, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ammar bin Yasir berperang di pihak Ali. Beliau terbunuh pada peperangan ini. Beliau dibunuh oleh pasukan Syam. Dengan demikian nyata dan terbuktilah apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa Ammar dibunuh oleh kelompok pembangkang. Dan terbuktilah bahwa Ali berada di pihak yang benar dan Muawiyah membangkang terhadapnya. Semua itu merupakan bukti kebenaran nubuat Rasulullah.

Imam Ahmad berkata, "Muhammad bin Jafar telah bercerita kepada kami, ia berkata, Syubah telah bercerita kepada kami dari Amru bin Murrah bahwa ia mendengar Abdullah bin Salamah berkata, Aku melihat Ammar bin Yasir pada peperangan Shiffin, beliau adalah seorang syaikh yang telah berumur, berkulit sawo matang dan berperawakan tinggi. Beliau menggenggam tombak dengan tangan bergetar. Ia berkata, Demi Allah yang jiwaku berada di tanganNya, aku telah berperang membawa panji ini bersama Rasulullah

sebanyak tiga kali, dan ini adalah yang keempat kali. Demi Allah yang jiwaku berada di tanganNya sekiranya mereka menebas kami hingga membawa kami ke puncak kematian niscaya aku yakin bahwa orang-orang baik yang bersama kami berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kesesatan. Ibrahim bin al-Husain bin Daizil berkata, "Yahya telah bercerita kepada kami, ia berkata, Nashr telah bercerita kepada kami, ia berkata, Amru bin Syamir telah bercerita kepada kami dari Jabir al-Jufi ia berkata, Aku men-dengar asy-Syabi meriwayatkan dari al-Ahnaf bin Qais ia berkata, kemudian Ammar bin Yasir menyerang mereka, namun serangannya dibalas oleh Ibnu Jaun as-Sakuni dan Abul Ghadiyah al-Fazzari. Adapun Abul Ghadiyah, ia menikam Ammar, sedangkan Ibnu Jaun menebas kepalanya.³⁷

Berdasarkan riwayat tersebut, terlihat bahwa Perang Shiffin merupakan konflik yang berkembang secara bertahap dari ketegangan politik menjadi konfrontasi militer terbuka. Mobilisasi pasukan dari Kufah dan Syam menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah memiliki kesiapan militer yang kuat serta struktur komando yang jelas. Selain itu, pola pertempuran yang terjadi secara berulang namun tidak menentukan hasil akhir menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, terutama persoalan tuntutan qisas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Hal ini menjadikan konflik berlangsung berkepanjangan tanpa adanya kemenangan yang tegas dari salah satu pihak.

Secara keseluruhan, dinamika yang diuraikan pada bab ini, mulai dari krisis legitimasi kepemimpinan pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan hingga pecahnya konfrontasi terbuka antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, dapat dianalisis melalui Teori Legitimasi Kekuasaan Max Weber sebagaimana dikemukakan pada Bab I. Dalam kerangka Weber, kepatuhan masyarakat terhadap seorang penguasa bertumpu pada legitimasi yang diakui bersama, baik melalui tradisi, hukum, maupun karisma. Ketidakpuasan sebagian sahabat terhadap kebijakan Utsman

³⁷ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin*, h. 483-484.

bin Affan mencerminkan melemahnya legitimasi yang menopang kekuasaannya, sehingga memicu delegitimasi yang berujung pada pembunuhannya. Kondisi ini kemudian berlanjut pada masa Ali bin Abi Thalib, sebab baiat yang diterimanya di Madinah tidak serta-merta diakui oleh seluruh pihak, termasuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang menuntut penegakan qisas terlebih dahulu sebagai syarat pengakuan, sebagaimana tercatat dalam riwayat Ath-Thabari.³⁸ Dengan demikian, sejak awal konflik ini telah berlangsung sebagai persoalan legitimasi kekuasaan yang belum sepenuhnya tuntas, sebelum kemudian berkembang menjadi konflik terbuka yang akan diuraikan lebih lanjut pada bab berikutnya.

³⁸ Ath-Thabari, *The History of Al-Tabari: The First Civil War*, vol. XVII (Albany: State University of New York Press, 1996).

BAB III

DAMPAK DINAMIKA KONFLIK POLITIK TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM ABAD VII M

A. Motif dibalik konflik Ali bin Abi Thalib – Muawiyah bin Abi Sufyan

1. Tuntutan Penegakan Qisas atas Pembunuhan Utsman bin Affan sebagai Dasar Penolakan Baiat kepada Ali bin Abi Thalib

Dalam sumber-sumber historiografi Islam, tuntutan penegakan hukum terhadap para pembunuh Utsman bin Affan menjadi argumen utama yang dikemukakan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam menghadapi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sebagai anggota keluarga Bani Umayyah sekaligus kerabat dekat Utsman, Muawiyah menempatkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan untuk menuntut qisas atas peristiwa pembunuhan khalifah ketiga tersebut. Tuntutan ini kemudian menjadi dasar sikap politik Muawiyah yang menolak memberikan baiat kepada Ali sebelum para pelaku pembunuhan Utsman diadili dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk memahami motif yang melatarbelakangi tindakan Muawiyah, perlu dikaji terlebih dahulu fakta-fakta historis yang berkaitan dengan tuntutan tersebut serta konteks politik yang melingkupinya. Menurut Tarikh al-Tabari dalam Tarikh al-Rusul wa al-Muluk (The History of al-Tabari) Volume 16:

Menurut Umar b. Shabbah Abu al-Hasan Awanah: Kemudian, ketika Ali sedang mencari utusan untuk dikirim ke Muawiyah, Jarir b. Abdallah berkata: Kirim aku, karena dia menyukaiku. Ketika aku sampai padanya, aku akan memanggilnya untuk mengakui kewenanganmu. Namun Al-Ashtar berkata kepada Ali: Jangan kirim dia! Demi Allah! Aku curiga dia condong ke pihak Muawiyah. Biarkan dia pergi, jawab Ali, dan kita akan lihat apa yang dia bawa kembali kepada kita. Maka dia mengirimnya dan menulis surat untuk dibawa. Dalam surat itu dia memberitahu Muawiyah tentang kesepakatan Muhajirun dan Ansar untuk memberikan baiat kepada Ali, tentang Talhah dan al-Zubayr yang mengingkari baiat mereka, dan tentang perang yang dia lakukan dengan

keduanya. Dia melanjutkan untuk memanggilnya agar mengakui kewenangannya, sebagaimana yang telah dilakukan Muhajirin dan Ansar. Oleh karena itu, Jarir berangkat untuk menemui Muawiyah, tetapi ketika ia tiba, Muawiyah menundanya dan membuatnya menunggu. Muawiyah kemudian memanggil Amr dan menanyakan nasihatnya tentang surat Ali kepadanya. Amr menasehatinya untuk mengirim pesan kepada para pimpinan Suriah, menuduh Ali atas darah Utsman dan dengan demikian membuat mereka bertempur untuknya melawan Ali. Muawiyah mengikuti nasihatnya.

Hal ini juga sebagaimana dilejelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab *A-Bidayah*

Wan Nihayah sebagai berikut:

Ketika Ali hendak mengirim utusan kepada Muawiyah untuk mengajak beliau berbaiat kepadanya, Jarir bin Abdillah berkata, Aku bersedia berangkat menemuinya wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya hubunganku dengannya sangat dekat. Aku akan mengambil baiat darinya untukmu. Al-Asytar menimpali, Jangan utus dia wahai Amirul Mukminin, aku khawatir hawa nafsunya akan mengiringi dirinya. Ali berkata, "Biarkanlah ia." Ali mengutus Jarir dengan membawa surat kepada Muawiyah, isinya pemberitahuan tentang kesepakatan kaum Muhajirin dan Anshar memba'iat beliau. Kemudian menceritakan kepadanya tentang peristiwa peperangan Jamal serta mengajaknya bergabung bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Jarir sampai di hadapan Muawiyah, ia menyerahkan surat Ali kepadanya. Muawiyah memanggil Amru bin al-Ash dan tokoh-tokoh negeri Syam untuk bermusyawarah. Mereka menolak berbaiat kepada Ali hingga para pembunuh Utsman diqishash atau Ali menyerahkan kepada mereka para pembunuh Utsman tersebut. Jika ia tidak memenuhi permintaan ini maka mereka akan memerangi beliau dan menolak berbaiat kepada beliau hingga mereka berhasil menghabisi seluruh pembunuh Utsman tanpa sisa. Maka Jarir pun pulang menemui Ali dan menceritakan hasil keputusan penduduk Syam.³⁹

Berdasarkan riwayat yang dikemukakan oleh al-Tabari dan Ibnu Katsir, tuntutan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap penegakan qisas atas pembunuhan Utsman bin Affan merupakan alasan utama yang digunakan untuk menolak memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam sumber-sumber tersebut dijelaskan bahwa Muawiyah

³⁹ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin*, h. 479-480.

bersama penduduk Syam menuntut agar para pelaku pembunuhan Utsman terlebih dahulu diadili dan dihukum sebelum mereka mengakui kepemimpinan Ali. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pembunuhan Utsman menjadi isu sentral yang mewarnai hubungan politik antara kedua tokoh tersebut pada masa awal kekhalifahan Ali.

Dalam perspektif hukum Islam, tuntutan qisas yang diajukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dapat dipahami sebagai respons terhadap peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang pada saat itu belum memperoleh penyelesaian hukum yang jelas. Sebagai salah satu kerabat Utsman dari Bani Umayyah, Muawiyah memiliki keterkaitan keluarga yang menjadi dasar bagi keterlibatannya dalam menuntut penegakan hukum atas kematian khalifah ketiga tersebut. Dalam tradisi masyarakat Arab maupun dalam ketentuan hukum Islam, keluarga korban memiliki kedudukan yang memungkinkan mereka untuk menuntut keadilan terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas suatu pembunuhan. Oleh karena itu, tuntutan yang disampaikan Muawiyah dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh kejelasan hukum terkait kasus pembunuhan Utsman, meskipun pelaksanaannya kemudian berkembang dalam situasi politik yang semakin kompleks.

Di samping tuntutan qisas yang dikemukakan terhadap para pembunuh Utsman bin Affan, posisi politik Muawiyah bin Abi Sufyan juga perlu diperhatikan untuk memahami dinamika konflik yang berkembang dengan Ali bin Abi Thalib. Sebelum terjadinya perselisihan tersebut, Muawiyah telah memimpin wilayah Syam dalam kurun waktu yang cukup lama sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab dan tetap mempertahankan kedudukannya pada masa Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan yang panjang tersebut memberinya kesempatan untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang relatif stabil, memperkuat hubungan dengan elite-elite lokal, serta

membentuk jaringan birokrasi yang loyal terhadap kepemimpinannya. Kondisi ini turut memperkuat pengaruh Muawiyah di Syam dan menjadikannya sebagai salah satu tokoh politik yang memiliki kedudukan kuat di wilayah tersebut.

Kekuatan politik yang telah terbentuk di Syam memberikan dukungan yang signifikan terhadap sikap Muawiyah dalam menuntut penegakan qisas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Sebagaimana terlihat dalam berbagai riwayat, tuntutan tersebut tidak hanya menjadi pandangan pribadi Muawiyah, tetapi juga memperoleh dukungan dari sebagian besar penduduk Syam yang menolak memberikan baiat kepada Ali sebelum persoalan pembunuhan Utsman diselesaikan. Dengan adanya basis dukungan yang luas tersebut, Muawiyah memiliki kapasitas politik untuk mempertahankan posisinya dalam menghadapi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, konflik yang kemudian berkembang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai waktu pelaksanaan qisas, tetapi juga melibatkan faktor kekuatan politik yang dimiliki masing-masing pihak dalam menentukan arah penyelesaian krisis yang terjadi setelah wafatnya Utsman bin Affan.

Selain memperoleh dukungan politik yang kuat dari masyarakat Syam, Muawiyah juga menggunakan berbagai simbol yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Dalam beberapa sumber sejarah, simbol-simbol tersebut ditampilkan kepada masyarakat Syam sebagai pengingat atas peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Kehadirannya tidak hanya mengingatkan masyarakat terhadap tragedi wafatnya Utsman, tetapi juga membentuk ingatan kolektif mengenai pentingnya penyelesaian kasus pembunuhannya sesuai dengan tuntutan yang berkembang pada masa itu. Hal ini sebagaimana termuat dalam riwayat yang dikutip al-Tabari dalam *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* (The History of Al-Thabari) volume 16:

Menurut al-Sari dalam tulisan Shuayb-Sayf-Muhammad dan Talhah: Ketika al-Numan b. Bashir datang kepada orang-orang Suriah dengan kemeja berlumuran darah yang dikenakan Utsman ketika dia dibunuh, dan dengan jari-jari Nailah, istrinya yang terputus-putus dua dengan buku-buku jari dan sebagian telapak tangan, dua dipotong di pangkalnya, dan setengah ibu jari. Muawiyah menggantung baju itu di minbar dan menulis kepada kota-kota garnisun Suriah. Orang-orang terus datang dan menangis karenanya saat itu tergantung di minbar, dengan jari-jari yang menempel padanya, selama setahun penuh. Tentara Suriah bersumpah bahwa mereka tidak akan bercinta dengan wanita atau melakukan wudhu besar kecuali jika terpaksa karena keluarnya air mani saat tidur atau tidur di tempat tidur sampai mereka membunuh para pembunuh Utsman dan siapa pun yang mungkin menghalangi mereka dengan cara apa pun, kecuali mereka mati di tengah jalan. Mereka tetap berada di sekitar baju itu selama setahun. Setiap hari baju itu diletakkan di mimbar, kadang-kadang digunakan untuk menutupinya dan digantungkan di atasnya, dan jari-jari Nailah menempel pada mansetnya.⁴⁰

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan baju Utsman yang berlumuran darah beserta jari-jari Nailah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Syam. Simbol-simbol tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti visual atas peristiwa pembunuhan Utsman, tetapi juga menjadi sarana yang membangkitkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Penempatannya di ruang publik menjadikan peristiwa tersebut terus hadir dalam perhatian masyarakat, sehingga pembunuhan Utsman tidak lagi dipandang semata sebagai tragedi yang menimpa seorang khalifah, melainkan sebagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Reaksi emosional yang ditunjukkan oleh masyarakat dan pasukan Syam sebagaimana tergambar dalam riwayat al-Tabari menunjukkan besarnya perhatian mereka terhadap tuntutan penegakan qisas atas peristiwa tersebut.

⁴⁰ Al-Tabari, *The History of al-Tabari*, vol. 16, h. 196–197.

Kondisi tersebut turut memengaruhi perkembangan situasi politik di wilayah Syam pada masa itu. Posisi Muawiyah yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Syam memungkinkannya untuk memfasilitasi penyampaian tuntutan qisas di ruang publik melalui berbagai simbol yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan Utsman. Tuntutan untuk menegakkan qisas memperoleh perhatian yang luas di kalangan masyarakat Syam sehingga semakin memperkuat keterkaitan Muawiyah dengan upaya penyelesaian kasus tersebut. Selain itu, status Muawiyah sebagai kerabat Utsman dari Bani Umayyah memberikan dasar legitimasi baginya untuk tampil sebagai salah satu pihak yang memperjuangkan penuntasan kasus pembunuhan khalifah ketiga tersebut. Dalam konteks ini, simbol-simbol yang berkaitan dengan wafatnya Utsman tidak hanya berfungsi sebagai pengingat atas sebuah peristiwa tragis, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan opini dan mobilisasi dukungan masyarakat terhadap tuntutan penegakan qisas yang berkembang pada masa itu.

Berbagai fakta historis di atas menunjukkan bahwa tuntutan qisas atas pembunuhan Utsman bin Affan menempati posisi yang penting dalam argumentasi yang dikemukakan Muawiyah bin Abi Sufyan selama berlangsungnya konflik dengan Ali bin Abi Thalib. Namun demikian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika konflik tersebut, perlu dikaji pula argumentasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam berbagai sumber sejarah. Salah satu sumber yang dapat digunakan untuk memahami perbedaan pandangan tersebut adalah surat-menyurat antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan.

Dalam salah satu surat yang ditujukan kepada Muawiyah, Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa baiat yang diberikan oleh kaum Muhajirin dan Ansar telah menjadi

dasar legitimasi kekhalifahannya. Sebagaimana termuat dalam Nahj Al- Balaghah Surat Nomor 6 dan sebagai berikut:

Kepada Muawiyah Bin Abi Sufyan (Surat nomor 06)

Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman telah membaiat kepadaku atas dasar yang sama di mana mereka membaiat kepada mereka. (Atas dasar ini) orang yang hadir tidak mempunyai pilihan (untuk mempertimbangkan), dan orang yang tak hadir tidak berhak untuk menolak; dan suatu musyawarah dibataskan pada Muhajirin dan Anshar. Apabila mereka menyetujui seorang individu dan mengambilnya sebagai pemimpin (khalifah), hal itu dianggap bermakna keridaan Allah. Apabila seseorang menjauh dengan jalan keberatan atau menuntut perubahan, mereka akan mengembalikannya kepada posisi dari mana dia menjauh. Apabila dia menolak, mereka akan memerangnya karena mengikuti jalan yang lain dari jalan kaum mukmin, dan Allah menempatkannya kembali (ke asal) dari mana dia melarikan diri. Demi hidupku, hai Muawiyah, apabila kalian melihat dengan akal kalian tanpa nafsu, maka kalian akan mendapatkanku orang yang paling tak berdosa dari antara semua orang sehubungan dengan darah Utsman, dan tentulah kalian akan melihat bahwa aku dalam keadaan terkucil darinya, kecuali apabila kalian menyembunyikan apa yang sangat terbuka bagi kalian. Maka kalian boleh melakukan keberangan (padaku) sesuka hati kalian. Wassalam.⁴¹

Isi surat tersebut menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa kekhalifahannya memiliki legitimasi yang sah karena didukung oleh baiat mayoritas kaum Muhajirin dan Ansar. Dalam pandangannya, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah umat bersifat mengikat bagi seluruh kaum Muslim, terutama setelah tokoh-tokoh utama dalam proses tersebut memberikan persetujuan. Selain itu, Ali juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan dan tidak berada dalam posisi yang dapat membenarkan tuduhan keterlibatan tersebut. Penegasan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak legitimasi kepemimpinannya.

⁴¹ Syarif Radhi, Nahj Al-Balaghah, surat. 06

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Ali memandang baiat dari kaum Muhajirin dan Ansar sebagai sumber utama legitimasi politik dalam sistem kekhalifahan. Mekanisme tersebut dianggap sah karena dilakukan melalui kesepakatan kelompok yang memiliki otoritas dalam proses musyawarah, sebagaimana praktik pengangkatan para khalifah sebelumnya. Dengan demikian, Ali menegaskan bahwa kepemimpinannya tetap memiliki dasar yang kuat selama berada dalam koridor mekanisme tersebut. Di sisi lain, Muawiyah tetap mempersyaratkan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman bin Affan sebelum memberikan pengakuan terhadap pemerintahan Ali. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memahami sumber legitimasi politik, yakni antara legitimasi yang bertumpu pada baiat umat dan legitimasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan qisas atas kasus pembunuhan khalifah sebelumnya.

2. Perbedaan Pandangan tentang Legitimasi Kepemimpinan dalam Kekhalifahan Islam

Perbedaan pandangan mengenai konsep dasar legitimasi kekuasaan berkembang menjadi ketegangan politik yang semakin nyata di antara kedua belah pihak. Ketegangan ini terus meningkat hingga bermuara pada Perang Shiffin, sebuah peristiwa yang menegaskan dimensi politik dalam konflik tersebut. Setelah berbagai upaya diplomasi melalui korespondensi dan negosiasi tidak membuahkan kesepakatan, kedua pasukan akhirnya bertemu di wilayah Shiffin pada tahun 37 H. Kegagalan proses diplomasi tersebut menandai bahwa perbedaan di antara keduanya tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan dialogis, sehingga memicu eskalasi menuju konfrontasi terbuka (Ibn Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*; Al-Tabari, *Tarikh Al-Tabari*).

Adapun Umarah bin Syihab yang diutus sebagai amir untuk wilayah Kufah, maka dicegah oleh Thulaihah bin Khuwailid karena kemarahannya atas terbunuhnya Utsman. Kemudian Umarah kembali kepada Ali dan menceritakan perihal di sana. Berkembanglah fitnah, semakin runyam masalah dan semakin

runcing pula perselisihan. Abu Musa mengirim berita kepada Ali tentang ketaatan penduduk Kufah dan baiat mereka kecuali sedikit dari mereka. Ali telah mengirim banyak sekali surat kepada Muawiyah namun Muawiyah tidak memberikan jawaban. Hal itu terus berlangsung hingga bulan ketiga terbunuhnya Utsman di bulan Shafar. Kemudian Muawiyah mengutus Thaumar bersama seorang lelaki untuk menemui Ali. Keduanya pun masuk menemui beliau. Ali berkata, "Berita apa yang kalian bawa?" Mereka menjawab, "Kami datang dari satu kaum yang hanya menghendaki Qishash. Mereka semua berputus asa, aku telah bertemu dengan enam puluh ribu orang tua mereka menangi kepergian Utsman. Sedang dia berdiri di atas mimbar Damaskus." Maka Alipun berkata, "Ya Allah, aku berlepas diri kepada-Mu dari darah Utsman."⁴²

Menurut Abu Mikhnaf Abd al-Malik b. Abi Hurrah al-Hanafi: Ali berkata, "Pada hari ini kalian telah diberi kemenangan melalui semangat." Orang-orang itu kembali ke perkemahan mereka, dan semuanya tinggal selama dua hari, di mana dia dan Muawiyah tidak bertukar utusan. Kemudian Ali memanggil Bashir b. Amr b. Mihsan al-Ansari Said b. Qays al-Hamdani dan Shabath b. Ribi al-Tamimi dan berkata, "Pergilah kepada orang ini dan ajaklah dia kepada Allah, kepada ketaatan, dan kepada persatuan." Shabath b. Ribi bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau akan menggodanya dengan tawaran jabatan yang berwibawa dan posisi di mana dia akan memiliki pengaruh terhadapmu jika dia memberikan sumpah setia kepadamu?" Ali menjawab, "Pergilah kepadanya dan berdebatlah dengannya dan cari tahu pendapatnya."

Mereka datang dan masuk menemui Muawiyah, dan Abu Amrah Basher bin Amr memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian dia berkata, "Wahai Muawiyah, dunia ini fana, tetapi ke akhirat engkau akan kembali. Allah akan menghakimimu sesuai dengan amal perbuatanmu dan membalasmu atas apa yang telah kau persembahkan. Aku memohon kepadamu demi Allah agar jangan memecah persatuan umat ini dan jangan menumpahkan darahnya dalam konflik internal." Tetapi Muawiyah memotongnya, berkata, "Bukankah engkau telah menyampaikan hal itu kepada tuanmu?" Abu Amrah menjawab, "Tuanku tidak seperti engkau. Dari seluruh ciptaan, beliau memiliki hak paling besar atas posisi otoritas ini berdasarkan jasa, agama (din) beliau, kedudukan beliau dalam Islam, dan hubungannya dengan Rasulullah." Muawiyah bertanya, "Apa yang beliau katakan?" dan Abu Amrah menjawab, "Beliau memintamu untuk takut kepada Allah dan untuk menanggapi sepupumu dengan mengakui kebenaran yang beliau serukan kepadamu." "Ini lebih aman bagimu dalam hal kehidupanmu di dunia ini dan lebih baik bagimu dalam hal akhiratmu!" Muawiyah berkata, "Dan apakah kita akan menganggap darah Utsman tidak berarti? Tidak, demi Allah, tidak akan

⁴² Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin*, h. 452-453.

pernah!" Said b. Qays hendak berbicara, tetapi Shabath b. Ribi menyela terlebih dahulu, setelah memuji dan mengagungkan Allah:

Muawiyah, aku mengerti jawabanmu kepada Ibnu Mikhan, dan demi Allah, kami tidak mengabaikan apa yang kau niatkan dan cari. Satu-satunya cara yang kau temukan untuk menyesatkan orang, memutarbalikkan keinginan mereka, dan mendapatkan ketaatan dari mereka adalah dengan mengatakan, "Imammu dibunuh secara tidak adil, dan kami membalas dendam atas darahnya!" Beberapa orang bodoh menanggapinya, tetapi kami tahu bahwa kau menunda memberikan bantuan kepada Utsman dan bahwa kau menginginkan pembunuhannya agar kau bisa mendapatkan posisi yang sekarang kau cari. Banyak orang yang menginginkan sesuatu dan mencarinya, tetapi Allah mencegahnya dengan kekuasaan-Nya, dan terkadang orang yang menginginkan sesuatu dikabulkan keinginannya atau bahkan lebih dari itu. Tetapi, demi Allah, tidak akan ada kebaikan bagimu dalam kedua kasus tersebut. Jika kau gagal mencapai apa yang kau harapkan, maka kau akan menjadi orang Arab yang paling celaka, sedangkan jika kau mencapai apa yang kau inginkan, kau hanya akan mencapainya dengan pantas mendapatkan api neraka dari Tuhanmu. Takutlah kepada Allah, wahai Muawiyah. Tinggalkan urusanmu itu, dan jangan menentang otoritas yang memilikinya secara sah.

Muawiyah memuji Tuhan dan mengagung-Nya, lalu berkata, "Hal pertama yang membuatku menyadari kebodohan dan kedewasaanmu yang rendah adalah ketika kau menyela pidato orang terhormat dan berstatus tinggi ini, yang merupakan pemimpin kaumnya (yaitu, Said bin Qays). Kemudian setelah itu kau mencampuri sesuatu yang tidak kau ketahui. Kau telah berbohong dan bersikap hina, kau orang Badui yang kasar dan tidak beradab, dalam segala hal yang kau sebutkan dan gambarkan. Pergilah dari hadapanku, kalian semua! Di antara kau dan aku tidak ada apa pun selain pedang!" Dia sangat marah. Delegasi itu pergi bersama Shabath yang berkata, "Apakah kau mengancam kami dengan pedang? Demi Allah, pedang itu akan segera diangkat melawanmu!" Mereka datang kepada Ali dan menceritakan apa yang dikatakan Muawiyah. Itu terjadi pada bulan Dzul Hijjah. Setelah itu, Ali akan memberi perintah kepada beberapa pemimpin individu berstatus tinggi, dan sekelompok orang akan keluar untuk berperang mendukungnya, sementara seorang pria berpangkat tinggi lainnya, pengikut Muawiyah, akan keluar melawannya dengan sekelompok pengikutnya.⁴³

Kedua riwayat di atas menunjukkan bahwa sebelum terjadinya Perang Shiffin, telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara Ali bin Abi

⁴³ Al-Tabari, *The History of al-Tabari*, vol. 17, h. 16–18.

Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan melalui jalur diplomasi. Riwayat dalam Al-Bidayah wa al-Nihayah menggambarkan adanya komunikasi yang berlangsung melalui surat-menyurat antara kedua pihak, meskipun tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat meredakan konflik yang berkembang pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Sementara itu, riwayat yang diriwayatkan Abu Mikhnaf dalam Tarikh al-Tabari memperlihatkan adanya pengiriman delegasi oleh Ali untuk mengajak Muawiyah kembali kepada persatuan umat dan memberikan baiat kepada khalifah yang telah dipilih. Akan tetapi, perundingan tersebut berakhir tanpa titik temu karena masing-masing pihak tetap mempertahankan posisi dan argumentasinya.

Kegagalan berbagai upaya diplomasi tersebut menunjukkan bahwa konflik yang berkembang antara kedua tokoh tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan teknis pemerintahan, melainkan telah menyentuh aspek yang lebih mendasar mengenai legitimasi kekuasaan dan otoritas politik dalam masyarakat Islam. Dalam riwayat al-Tabari terlihat bahwa pihak Ali menekankan pentingnya pengakuan terhadap kedudukannya sebagai khalifah yang sah, sedangkan Muawiyah tetap menjadikan tuntutan penegakan qisas atas terbunuhnya Utsman sebagai dasar utama sikap politiknya. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan ruang kompromi semakin sempit dan mendorong kedua belah pihak menuju konfrontasi yang lebih terbuka.

Dari perspektif historis, sikap Muawiyah yang terus mempertahankan tuntutan qisas tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk respon terhadap wafatnya Utsman bin Affan, tetapi juga sebagai posisi politik yang memberikan legitimasi bagi penolakannya untuk segera memberikan baiat kepada Ali. Dengan menjadikan isu qisas sebagai tuntutan utama, Muawiyah memperoleh landasan yang kuat untuk mempertahankan dukungan masyarakat Syam sekaligus memperkuat posisinya dalam percaturan politik

pada masa tersebut. Oleh karena itu, tuntutan qisas dalam konteks ini tidak hanya memiliki dimensi moral dan hukum, tetapi juga berkaitan dengan dinamika kekuasaan yang berkembang setelah berakhirnya masa pemerintahan Utsman bin Affan.

3. Dinamika Politik dalam Konflik Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan

Konflik yang terus berkembang akibat kegagalan berbagai upaya diplomasi tersebut pada akhirnya mencapai puncaknya dalam Perang Shiffin. Pertempuran yang berlangsung antara pasukan Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai penegakan qisas, legitimasi kepemimpinan, dan otoritas politik tidak lagi dapat diselesaikan melalui negosiasi. Namun, ketika peperangan berlangsung sengit dan menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak, muncul upaya untuk menghentikan konflik melalui mekanisme arbitrase yang kemudian dikenal sebagai Tahkim. Uraian mengenai peristiwa tersebut dapat dilihat dalam kitab tārīkh Al-Ṭabarī (The History of Al-Tabarī)

Menurut Abu Mikhnaḥ Abi Janab al-Kalbi Umarah b. Rabrah al-Jarmr: Demi Allah, al-Ashtar lewat di dekatku, dan aku maju bersamanya dan banyak orang bergabung dengannya. Dia melanjutkan perjalanan hingga kembali ke tempat sayap kanan, di mana dia memimpin pasukannya dan berkata: "Luncurkan serangan! Semoga paman-pamanku dari pihak ayah dan ibu menjadi tebusan bagi kalian, yang dengannya kalian akan menyenangkan Tuhan kalian dan memuliakan agama kalian (din). Ketika aku menyerang, seranglah!" Kemudian dia turun dari kudanya dan memukul bagian depan kudanya, dan dia berkata kepada pembawa panjinya, "Majulah dengan itu!" Dia dan pasukannya kemudian menyerang musuh dan memerangi orang-orang Suriah hingga mereka mendorong mereka sejauh perkemahan mereka. Mereka bertempur sengit di dekat perkemahan, dan pembawa panjinya terbunuh. Semua orang, melihat kemenangan pasukannya, mulai mengirimkan bala bantuan.

Menurut Abdallīh bin Ahmad (al-Marwazī), ayahnya Sulayman Abdallah Juwayriyah At Siffin Amr bin al-As berkata kepada Wardan, "Tahukah kau dengan apa kita berdua dapat dibandingkan? Dengan unta merah yang, jika ia maju ke depan, akan terhambat kakinya dan, jika ia tertinggal di belakang, akan disembelih. Jika kau tertinggal di belakang, aku akan memenggal kepalamu. Bawakan aku tali." (Ia pun melakukannya, dan Amr) mengikatkannya

di kaki Wardan, yang berkata: "Demi Allah, Abu Abdallah, aku akan membawamu ke liang kubur. Letakkan tanganmu di bahu." Kemudian ia mulai maju, sesekali melihat Amr dan berkata, "Sesungguhnya aku akan membawamu ke liang kubur."

(Melanjutkan kisah Abu Mikhnaf:) Ketika Amr bin al-As melihat bahwa posisi orang Irak telah menguat dan khawatir hal itu akan menyebabkan kehancuran, ia berkata kepada Muawiyah, "Bagaimana jika aku menyampaikan sesuatu kepadamu yang hanya akan meningkatkan persatuan kita dan perpecahan mereka?" "Baiklah," kata Muawiyah. Amr berkata, "Kita akan mengangkat mushaf dan berkata, Isinya haruslah menjadi dasar dalam perselisihan kita (ma fiha hukm baynana wabaynakum). Sekalipun sebagian dari mereka menolak untuk menerimanya, engkau akan mendapati bahwa sebagian dari mereka akan berkata, Memang, ya, kita harus menerimanya; dan akan terjadi perpecahan di antara mereka. Sebaliknya, jika mereka berkata, Ya, memang, kami menerima apa yang ada di dalamnya; maka kita akan terbebas dari pertempuran dan peperangan ini sampai waktu yang ditentukan atau kesempatan di kemudian hari!" Maka mereka mengangkat mushaf di atas tombak dan berkata: "Inilah Kitab Allah yang berada di antara kita dan kalian. Siapakah yang akan melindungi daerah perbatasan orang Siria jika mereka semua binasa, dan siapakah yang akan melindungi daerah perbatasan orang Irak jika mereka semua binasa? Ketika orang-orang itu melihat mushaf telah diangkat, mereka berkata, "Kami menanggapi Kitab Allah, dan kami bertaubat kepadanya."

Imam Ahmad berkata, "Yala bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Siyah dari Habib bin Abi Tsabit, ia berkata, Aku menemui Abu Wail di masjid keluarganya dan bertanya kepadanya tentang orang-orang yang diperangi Ali di Nahrawan, apa sajakah yang mereka penuhi dan apa pula yang mereka tolak dan mengapa Ali menghalalkan berperang mela-wan mereka?" Ia berkata, Sewaktu kami berada di Shiffin dan api peperangan sedang memanaskan melawan pasukan Syam, mereka berlindung di sebuah anak bukit. Amru bin al-Ash berkata kepada Muawiyah, "Kirimkanlah mushaf Al-Qur'an kepada Ali dan ajaklah ia bertahkim kepada Kitabullah, sesungguhnya ia tidak akan menolak ajakanmu." Lalu datanglah seorang lelaki kepada Ali dan berkata, Kitabullah menjadi hakim di antara kita.⁴⁴

Riwayat dalam Al-Tabari menunjukkan bahwa menjelang berakhirnya Perang Shiffin, pasukan Ali berada dalam posisi yang lebih unggul. Serangan yang dipimpin oleh Malik al-Asytar berhasil mendesak pasukan Syam hingga mendekati perkemahan mereka. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pasukan Muawiyah menghadapi tekanan

⁴⁴ Al-Tabari, *The History of al-Tabari*, vol. 17, h. 76–78.

militer yang serius dan berpotensi mengalami kekalahan apabila pertempuran terus berlanjut. Dalam situasi tersebut, Amr bin al-Ash mengusulkan kepada Muawiyah untuk mengangkat mushaf Al-Qur'an di ujung tombak dan mengajak pasukan Ali menjadikan Kitabullah sebagai dasar penyelesaian perselisihan. Riwayat tersebut menjelaskan bahwa usulan itu tidak hanya bertujuan menghentikan peperangan, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan sikap di dalam kubu Ali. Sebagian pasukan Ali diperkirakan akan menerima ajakan tersebut, sementara sebagian lainnya mungkin menolaknya. Perhitungan politik inilah yang kemudian mendorong pengangkatan mushaf sebagai simbol seruan kepada arbitrase atau tahkim.

Berdasarkan riwayat tersebut, tahkim tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya religius untuk mengakhiri peperangan, tetapi juga sebagai langkah politik yang muncul dalam konteks persaingan legitimasi antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan. Keterangan Al-Tabari secara eksplisit menunjukkan bahwa gagasan pengangkatan mushaf muncul ketika posisi militer pasukan Muawiyah berada dalam kondisi yang terdesak. Pernyataan Amr bin al-Ash mengenai kemungkinan terjadinya perpecahan dalam kubu Ali mengindikasikan adanya pertimbangan strategis yang bertujuan mengubah situasi perang yang kurang menguntungkan menjadi peluang politik yang lebih menguntungkan bagi pihak Syam.

Di sisi lain, sikap Ali yang menerima ajakan kembali kepada Kitabullah menunjukkan bahwa keputusan untuk menghentikan peperangan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan militer, tetapi juga oleh pertimbangan moral dan religius. Namun, penerimaan terhadap tahkim justru memunculkan perbedaan pandangan di dalam pasukannya sendiri. Sebagian pendukung Ali menerima arbitrase tersebut,

sedangkan sebagian lainnya menolaknya karena menganggap bahwa keputusan manusia tidak boleh menggantikan hukum Allah. Perbedaan sikap ini kemudian menjadi salah satu faktor yang melemahkan soliditas politik kubu Ali setelah Perang Shiffin.

Setelah kedua belah pihak menerima tahkim sebagai mekanisme penyelesaian konflik, langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan perundingan melalui perwakilan yang ditunjuk masing-masing pihak. Proses ini dilakukan karena permasalahan yang menjadi sumber perselisihan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghentikan peperangan, melainkan memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui musyawarah dan arbitrase. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian menunjuk wakil yang dipercaya untuk mewakili kepentingan masing-masing dalam perundingan tahkim. Muawiyah menunjuk Amr bin al-Ash sebagai juru runding dari pihak Syam, sedangkan pihak Ali pada akhirnya menunjuk Abu Musa al-Asyari sebagai wakil dari pihak Irak. Penunjukan kedua tokoh tersebut menandai dimulainya tahap perundingan yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tahkim pasca Perang Shiffin. Sebagaimana dalam kitab Tarikh Al-Thabari (The History of Al-Thabary) volume 17:

Pada tahun ini telah diadakan pertemuan kedua arbiter. Menurut Abu Mikhnaf-al-Mujalid b. Sard al-Shabr Ziyad b. al-Naflr al-Harithr, semuanya mengirim 400 orang di bawah komando Shurayh b. Hani al-Harithr, bersama Abdalldh b. Abbas, yang memimpin mereka dalam shalat dan mengatur urusan mereka, bersama dengan Abu Mom al-Ashari dan Muawiyah mengirim Amr b. al-Ag dengan 400 orang Suriah. Mereka datang ke Dumat al-Jandal di Adhruh. Setiap kali Muawiyah menulis surat kepada Amr, utusan itu lewat di antara mereka tanpa mengetahui pesan apa yang dibawanya atau apa yang dibawanya kembali, dan orang-orang Suriah tidak menanyainya tentang apa pun. Tetapi, setiap kali utusan Ali datang, orang-orangnya pergi kepada Ibnu Abbas dan bertanya, "Apa yang ditulis Amirul Mukminin kepadamu?" Jika Ibnu Abbas menyembunyikan pesan itu, mereka berspekulasi dan berkata, "Kami pikir dia menulis kepadamu begini dan begitu." Dia akan menjawab, "Apakah kalian tidak mengerti? Tidakkah kalian melihat utusan Muawiyah datang dan pergi tanpa mengetahui pesan apa yang dibawanya dan dibawanya kembali? Kalian tidak

mendengar apa pun dari mereka, tidak sepetah kata pun. Tetapi setiap hari kalian bersamaku berteori."

Hadir dalam pertemuan itu: Abdallah b. Umar Abdullah b. al-Zubair; Abd al-Rahman b. al-Harits b. Hisyam al-Makhzumi Abd al-Ralman b. al Aswad b. Abd Yaghuth al-Zuhri Abu Jahm b. Hudhayfah al-Adawi dan al-Mughlrah b. Shubah al Thaqafi Umar b. Sad b. Abi Waqqas mendatangi ayahnya yang berada di sumber air Bann Sulaym di padang pasir. Ia berkata kepadanya, "Wahai ayahku, engkau telah mendengar tentang perselisihan antara penduduk Siffin dan bahwa mereka telah menunjuk Abet Musa al-Ashari dan Amr bin al-As sebagai penengah. Sekelompok Quraisy telah datang bersama mereka. Engkau harus pergi dan hadir bersama mereka karena engkau adalah Sahabat Rasulullah dan salah satu dari para syura, dan engkau tidak pernah terlibat dalam hal apa pun yang ditentang oleh komunitas ini. Bergabunglah dengan mereka, karena engkau memiliki hak terbesar di antara manusia atas kekhalifahan." Tetapi Sad menjawab, "Aku tidak akan melakukan itu, karena aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Akan ada fitnah di mana orang terbaik adalah orang yang tidak mencolok dan takut kepada Allah. Demi Allah, aku tidak akan pernah terlibat dalam masalah ini."

Kedua penengah bertemu dan Amr bin al-As berkata, "Abu Musa, tidakkah kau tahu bahwa Utsman dibunuh secara tidak adil?" Dia menjawab, "Aku bersaksi akan hal itu." Amr berkata, "Tidakkah kau tahu bahwa Muawiyah dan keluarga Muawiyah adalah kerabat terdekatnya (awliya)?" Dia menjawab, "Ya, memang." Amr melanjutkan: "Allah telah berfirman, Siapa pun yang dibunuh secara tidak adil, Kami telah memberikan kekuasaan kepada kerabat terdekatnya, tetapi janganlah ia berlebihan dalam membunuh (sebagai pembalasan), ia akan dibantu (mansur). Jadi mengapa kau menahan diri untuk tidak mendukung Muawiyah, kerabat terdekat Utsman, Abu Musa? (Status) keluarganya di Quraisy seperti yang kau ketahui. Jika kau takut orang-orang akan berkata, Abu Musa telah memberikan kekuasaan kepada Muawiyah tetapi dia bukan salah satu Muslim awal, kau punya argumen untuk menjawab itu." Anda akan berkata, "Saya telah mendapati dia sebagai kerabat terdekat Utsman, khalifah yang dibunuh secara tidak adil, dan orang yang ingin membalas dendam atas kematian Utsman, dan saya telah mendapati dia mahir dalam pemerintahan dan mengelola berbagai hal. Dia adalah saudara Umm Habibah, istri Nabi, dan dia adalah Sahabat Nabi, salah satu dari kelompok Sahabat."

Kemudian Amr memberi isyarat kepada Abu Musa bahwa ia akan memperoleh kedudukan yang berwibawa dan berkata, "Jika Muawiyah berkuasa, ia akan menganugerahkan kepadamu kehormatan yang belum pernah diberikan oleh khalifah mana pun." Abu Musa menjawab: "Amr, takutlah kepada Allah. Mengenai apa yang telah kau katakan tentang kemuliaan Muawiyah, bukan berdasarkan kemuliaan orang-orang yang berhak mendapatkannya kekuasaan diberikan. Jika berdasarkan kemuliaan, maka kekuasaan akan menjadi milik keluarga Abraham bin al-Sabbah. Sebaliknya, itu hanya untuk orang-orang yang

beragama (din) dan berjasa (fadl). Selain itu, jika aku harus memberikannya kepada orang Quraisy yang terbaik dalam hal kemuliaan, aku akan memberikannya kepada Ali bin Abi Talib." Adapun mengenai apa yang kau katakan tentang Muawiyah sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membalas dendam atas darah Utsman, dan bahwa karena itu aku harus memberikan kekuasaan kepadanya, aku tidak akan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah dan meninggalkan (hak-hak) muh jirun pertama. Dan mengenai isyaratmu tentang posisi otoritas untukku, demi Allah, bahkan jika semua otoritas Muawiyah beralih kepadaku, aku tidak akan memberikannya kekuasaan, dan aku tidak akan disuap dalam (masalah yang menyangkut) otoritas (l ukm) Allah. Tetapi jika kau mau, kita akan menghidupkan kembali nama Umar bin al-Khattab.

Menurut Abu Mikhnaf, Abu janab al-Kalbi Umarah b. Rabiah atau al-Hurt b. al-Sayyah Abe Musa berkata, "Sesungguhnya, demi Allah, jika aku mampu, aku akan menghidupkan kembali nama Umar b. al-Khattab." Amr berkata kepadanya, "Jika engkau ingin memberikan baiat kepada putra Umar, apa yang menghalangimu untuk memberikannya kepada putraku, karena engkau mengetahui kebaikan dan kebenarannya?" Beliau menjawab, "Putramu adalah orang yang saleh (Sidq), tetapi engkau telah menenggelamkannya dalam fitnah ini." Menurut Abu Mikhnaf Muhammad b. Ishaq Nafi, mawld Ibn Umar: Amr b. al-As berkata, Hanya seorang pria yang memiliki gigi, yang makan dan memberi makan, yang cocok untuk jabatan ini. Ibn Umar tidak memperhatikan dan Abdallah b. al-Zubayr berkata kepadanya, Catat dan perhatikan. Abdallah b. Umar menjawab, Tidak, demi Allah, aku tidak akan memberikan apa pun sebagai suap untuk mendapatkan jabatan ini dan dia berkata, "Wahai Ibn al-As, orang-orang Arab telah mempercayakan urusan mereka kepadamu setelah berkonflik dengan pedang dan saling bertarung dengan tombak. Janganlah kau menjerumuskan mereka kembali ke dalam fitnah."

Menurut Abu Mikhnaf-al-Nadr b. Salih al-Absi, saya bersama Shurayh b. Hani dalam kampanye di Sijistan dan dia memberi tahu saya bahwa Ali telah mempercayakan kepadanya sebuah pesan untuk Amr b. al-As. Ali telah memberi tahu Shurayh bahwa ketika dia bertemu Amr, dia harus menyampaikan kepadanya bahwa Ali telah mengirimkan pesan berikut: Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih memilih berbuat benar, meskipun itu mengurangi dirinya dan menyebabkan kesedihan baginya, daripada perbuatan sia-sia, meskipun dia mendambakannya dan perbuatan itu menambah dirinya. Amr, demi Allah, engkau tahu di mana letak kebenaran, jadi mengapa engkau berpura-pura tidak tahu? Jika engkau diberi sedikit saja hal yang engkau idamkan, dengan itu engkau akan menjadi musuh Allah dan sahabat-sahabat-Nya, dan (akibatnya) seolah-olah engkau telah kehilangan apa yang telah diberikan kepadamu, celakalah engkau. Janganlah engkau menjadi musuh bagi para pengkhianat dan jangan pula menjadi pendukung orang-orang jahat. Sesungguhnya Aku mengetahui suatu hari di mana kamu akan menyesal, yaitu

hari kematianmu, (ketika) kamu akan sangat berharap bahwa kamu tidak pernah bermusuhan dengan seorang Muslim atau menerima suap untuk suatu keputusan (hukm).

Shurayb berkata: Aku mengatakan itu pada Amr, dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia berkata, "Kapan aku pernah menerima nasihat Ali, melakukan apa yang dia katakan, atau mempertimbangkan pandangannya?" Aku menjawabnya, "Mengapa kamu, Ibnu al-Nabighah, tidak menerima nasihat gurumu, orang yang, setelah Nabi mereka, adalah pemimpin kaum Muslimin? Orang-orang yang lebih baik darimu, Abu Bakar dan Umar, meminta nasihatnya dan bertindak sesuai dengan pandangannya." Dia berkata, "Orang-orang sepertiku tidak berdebat dengan orang-orang sepertimu." Aku berkata, "Karena orang tuamu yang mana kamu meremehkanku, apakah karena ayahmu yang rendah derajatnya (washī) atau ibumu yang terhormat (nabighah)?" Amr bangkit dan pergi, dan aku pun ikut pergi.

Menurut Abu Mikhnaf Abu Janab al-Kalbi: Ketika Amr dan Abu Musa bertemu di Dumat al-Jandal, Amr mula-mula memberi Abu Musa kesempatan berbicara lebih dulu, dengan berkata sendiri, Engkau adalah sahabat Rasulullah dan engkau lebih senior dariku. Bicaralah dan aku akan berbicara! Amr telah membiasakan Abu Musa untuk berpikir bahwa ia akan memberinya prioritas dalam segala hal, dengan demikian ia ingin Abu Musa berbicara lebih dulu sehingga ia akan mengambil inisiatif untuk menggulingkan Ali. Abu Musa mempertimbangkan masalah yang sedang dibahas dan tujuan mereka berkumpul, dan Amr ingin dia menyatakan dukungannya kepada Muawiyah, tetapi dia menolak. Amr kemudian ingin dia menyatakan dukungannya kepada putranya, tetapi sekali lagi dia menolak. Abu Musa mencoba membujuk Amr untuk menyatakan dukungannya kepada Abdaldh bin Umar, tetapi dia menolak. Amr kemudian berkata kepada Abu Musa, "Katakan padaku apa pendapatmu." Dia menjawab, "Menurutku kita harus menyingkirkan kedua orang ini dan menjadikan masalah ini musyawarah di antara kaum Muslimin, yang akan memilih sendiri siapa pun yang mereka sukai." Amr berkata kepadanya, "Aku setuju." Mereka pergi menuju orang-orang yang berkumpul. Amr berkata, "Aba Musa, katakan kepada mereka bahwa kita telah mencapai kesepakatan dan perjanjian!" Abu Musa berbicara dan berkata, "Aku dan Amr telah menyepakati sesuatu yang kami harapkan Allah akan membawa perdamaian bagi komunitas ini!" Amr berkata, "Engkau telah mengatakan yang sebenarnya dan menepati janjimu, Abu Musa, silakan berbicara."

Abu Musa maju untuk berbicara, tetapi Ibn Abbas berkata kepadanya: Celakalah kamu, demi Allah, aku curiga dia telah menipumu. Jika kalian berdua telah sepakat tentang sesuatu, biarkan dia berbicara terlebih dahulu tentang hal itu di hadapanmu, lalu kamu berbicara setelahnya. Amr adalah orang yang khianat dan aku tidak yakin dia telah memberimu kepuasan ketika hanya kalian berdua, tetapi, ketika kalian berdiri di antara orang banyak, dia akan menentangmu! Tetapi Abu Musa tidak mengindahkan hal itu dan berkata, Kami

telah sepakat. Abu Musa maju ke depan, memuji Tuhan dan mengagungkan-Nya, lalu berkata, "Wahai sekalian manusia, kita telah mempertimbangkan urusan umat ini dan kita tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih kondusif untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitannya selain yang telah saya dan Amr sepakati. Yaitu, kita harus mencopot Ali dan Muawiyah dan umat ini harus menghadapi masalah ini dan mengangkat siapa pun yang mereka inginkan sebagai pemimpin dari antara mereka sendiri. Saya telah menerima pencopotan Ali dan Muawiyah, dan sekarang kalian hadapi masalah ini dan berikan kekuasaan kepada siapa pun yang kalian anggap pantas untuk masalah ini."

Kemudian ia menyingkir dan Amr b. al-As mengambil tempatnya. Ia memuji Allah dan mengagungkan-Nya, lalu berkata, "Orang ini telah berbicara seperti yang telah kalian dengar dan menyatakan penggulingan orang yang diwakilinya. Demikian pula, saya menyatakan bahwa ia telah digulingkan dan saya menegaskan dukungan saya untuk kandidat saya, Muawiyah. Dia adalah kerabat terdekat Utsman bin Affan dan orang yang mencari pembalasan atas darahnya. Dari semua orang, dialah yang paling berhak untuk menggantikannya." Abu Musa berkata, "Apa yang kalian lakukan, semoga Allah menggagalkan kalian? Kalian telah bertindak khianat dan tidak adil. Kalian seperti anjing yang, jika kalian menyerangnya, ia menjulurkan lidahnya, atau, jika kalian membiarkannya, ia tetap menjulurkan lidahnya." Amr menjawab, "Dan kalian seperti monyet yang membawa tulisan!" Shurayh bin Hani menyerang Amr, mencambuk kepalanya dengan cambuk, dan seorang putra Amr menyerang Shurayh, memukulnya dengan cambuk. Semua orang bangkit dan memisahkan mereka berdua, dan kemudian Shurayh biasa berkata, "Tidak ada yang lebih saya sesali daripada memukul Amr dengan cambuk. Seandainya saja saya memukulnya dengan pedang dan membiarkan takdir memberinya apa pun yang ditakdirkan!" Orang-orang Suriah mencari Abu Musa, tetapi dia menaiki untanya dan kembali ke Mekah.

Ibn Abbas berkata, "Semoga Allah mengutuk keputusan (ray) Abu Musa. Saya telah memperingatkannya dan menyuruhnya untuk berhati-hati, tetapi dia tidak mengindahkan!" Dan Abu Musa biasa berkata, Ibnu Abbas memperingatkanku tentang tipu daya orang jahat (fasiq), tetapi aku mempercayainya dan tidak membayangkan bahwa dia akan mengutamakan nasihat tulus kepada umat ini. Kemudian Amr dan orang-orang Suriah kembali kepada Muawiyah dan memberi salam kepadanya sebagai khalifah, sementara Ibnu Abbas dan Shurayh bin Hani pergi kepada Ali. Setiap kali ia melaksanakan salat subuh, Ali akan berdiri berdoa dan berkata, "Ya Allah, kutuklah Muawiyah, Amr, Abu al-Awar al-Sulami, Habib bin Maslamah, Abd al-Rahman bin Khalid, al-dahhak bin Qays, dan al-Walid bin Uqbah." Muawiyah mendengar tentang itu,

dan ketika ia sendiri berdoa, ia mengutuk Ali, Ibnu Abbas, al-Ashtar, al-Hasan, dan al-Husayn.⁴⁵

Riwayat dalam Tarikh al-Tabari menggambarkan proses pelaksanaan tahkim setelah Perang Shiffin sebagai upaya penyelesaian konflik politik yang melibatkan dua kubu besar umat Islam, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak mengutus perwakilan untuk melakukan perundingan, yaitu Abu Musa al-Asyari dari pihak Ali dan Amr bin al-Ash dari pihak Muawiyah. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Dumat al-Jandal dengan disaksikan oleh sejumlah tokoh penting dari kalangan sahabat dan Quraisy.

Dialog yang terjadi antara kedua arbitrator menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada penghentian konflik bersenjata, tetapi juga menyentuh persoalan legitimasi kepemimpinan umat Islam setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Amr bin al-Ash berupaya meyakinkan Abu Musa agar mendukung Muawiyah dengan menekankan kedudukan Muawiyah sebagai kerabat dekat Utsman dan pihak yang menuntut penegakan keadilan atas kematiannya. Sebaliknya, Abu Musa menilai bahwa kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan kekerabatan atau kedudukan sosial, melainkan harus didasarkan pada integritas agama dan kapasitas moral seseorang.

Perundingan tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan awal untuk menanggalkan klaim kepemimpinan Ali maupun Muawiyah dan menyerahkan penentuan khalifah kepada musyawarah umat Islam. Akan tetapi, ketika keputusan itu diumumkan di hadapan publik, Amr bin al-Ash menyampaikan pernyataan yang berbeda dari kesepakatan sebelumnya dengan tetap memberikan dukungan kepada Muawiyah.

⁴⁵ Al-Tabari, *The History of al-Tabari*, vol. 17, h. 104–110.

Tindakan tersebut memicu perselisihan baru karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hasil kesepakatan yang telah dirumuskan bersama.

Riwayat ini memperlihatkan bahwa tahkim bukan sekadar mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa, melainkan juga arena kontestasi politik yang dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing pihak. Secara teoritis, tahkim bertujuan menghasilkan keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, efektivitas tahkim sangat bergantung pada komitmen para pelaku untuk mematuhi hasil kesepakatan yang telah dibuat.

Sumber al-Tabari menunjukkan adanya perbedaan strategi yang digunakan oleh kedua arbitrator. Abu Musa tampil sebagai tokoh yang berusaha mencari jalan tengah demi meredakan konflik dan menjaga persatuan umat. Sebaliknya, Amr bin al-Ash lebih menonjolkan pendekatan politik yang berorientasi pada penguatan posisi Muawiyah. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan tujuan awal tahkim sebagai sarana rekonsiliasi tidak tercapai secara optimal.

Dari sudut pandang politik Islam, peristiwa ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu ditentukan oleh kekuatan argumen normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan negosiasi, strategi komunikasi, dan kepentingan kekuasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kegagalan tahkim bukan hanya disebabkan oleh substansi keputusan yang dihasilkan, melainkan juga oleh rendahnya tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses arbitrase.

Selain itu, riwayat ini menunjukkan bahwa konsep musyawarah yang ditawarkan Abu Musa sebenarnya merupakan upaya untuk mengembalikan proses pemilihan pemimpin kepada prinsip kolektif umat. Gagasan tersebut mencerminkan keinginan

untuk menghindari dominasi salah satu kelompok dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam menentukan arah kepemimpinan politik Islam.

Peristiwa tahkim merepresentasikan perubahan orientasi konflik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan. Apabila pada fase awal perselisihan tuntutan terhadap para pelaku pembunuhan Utsman menjadi isu yang paling dominan, maka dalam proses arbitrase perhatian kedua belah pihak tampak bergeser ke arah persoalan legitimasi politik dan otoritas kepemimpinan umat Islam. Pergeseran tersebut tercermin dari substansi perundingan yang tidak lagi berfokus pada mekanisme penegakan hukum terhadap pembunuh Utsman, melainkan pada penentuan figur yang dianggap memiliki hak untuk memimpin komunitas Muslim.

Argumentasi yang disampaikan oleh Amr bin al-Ash selama tahkim memperlihatkan bahwa isu penuntutan darah Utsman digunakan sebagai dasar legitimasi bagi penguatan posisi politik Muawiyah. Klaim mengenai kedekatan kekerabatan Muawiyah dengan Utsman dikonstruksikan sebagai landasan untuk mendukung hak politiknya dalam kontestasi kepemimpinan. Pada saat yang sama, keputusan Amr untuk tetap mengukuhkan Muawiyah setelah pengumuman hasil arbitrase menunjukkan bahwa orientasi politik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian konflik tersebut. Dengan demikian, tahkim tidak hanya mencerminkan upaya rekonsiliasi antara dua kelompok yang bertikai, tetapi juga memperlihatkan bagaimana narasi keadilan atas kematian Utsman bertransformasi menjadi instrumen legitimasi dalam perebutan otoritas politik. Fakta ini memberikan petunjuk bahwa tuntutan terhadap darah Utsman tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan yang berkembang pada masa tersebut.

Perkembangan selanjutnya setelah berakhirnya konflik menunjukkan perubahan orientasi politik yang semakin jelas. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil menjadi penguasa tunggal dan mendirikan pemerintahan Bani Umayyah, perhatian pemerintahannya lebih banyak diarahkan pada upaya stabilisasi politik serta konsolidasi kekuasaan. Ibn Katsir menjelaskan bahwa setelah memperoleh kekuasaan, Muawiyah memusatkan perhatian pada penguatan administrasi negara, penataan sistem pemerintahan, serta pengelolaan wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa agenda pemerintahan Muawiyah pada masa kekhalifahannya tidak lagi berfokus pada tuntutan terhadap para pelaku pembunuhan Utsman bin Affan sebagaimana yang sebelumnya menjadi isu utama dalam perselisihannya dengan Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya, perhatian lebih diarahkan pada pembangunan stabilitas politik dan penguatan struktur pemerintahan. Perubahan prioritas tersebut mengindikasikan bahwa persoalan politik dan kepemimpinan umat Islam merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika konflik yang terjadi sebelumnya. Meskipun tuntutan penegakan keadilan atas kematian Utsman tetap memiliki dasar yang kuat, perkembangan politik pasca-konflik memperlihatkan bahwa isu tersebut juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi untuk memperkuat posisi politik Muawiyah.

Dengan demikian, rangkaian peristiwa sejak munculnya tuntutan penuntasan kasus pembunuhan Utsman, terjadinya Perang Shiffin, pelaksanaan tahkim, hingga terbentuknya pemerintahan Muawiyah menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan upaya menegakkan keadilan atas kematian khalifah ketiga tersebut. Konflik tersebut juga berkembang menjadi persaingan politik mengenai legitimasi kepemimpinan dan otoritas pemerintahan dalam masyarakat Islam. Oleh

karena itu, tuntutan terhadap darah Utsman dan kepentingan politik dalam memperoleh serta mempertahankan kekuasaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan membentuk dinamika konflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa motif Muawiyah bin Abi Sufyan dalam konflik dengan Ali bin Abi Thalib tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor. Tuntutan untuk menegakkan keadilan atas kematian Utsman bin Affan merupakan bagian penting dari argumentasi yang dikemukakan Muawiyah. Namun, berbagai peristiwa historis, mulai dari pemanfaatan simbol kematian Utsman, penguatan basis kekuasaan di Syam, korespondensi politik dengan Ali, Perang Shiffin, proses tahkim, hingga kebijakan setelah menjadi khalifah, menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara tuntutan tersebut dan kepentingan politik yang berkembang pada masa itu. Dengan demikian, konflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan tidak hanya mencerminkan upaya menuntut keadilan atas terbunuhnya Utsman, tetapi juga memperlihatkan persaingan mengenai legitimasi kepemimpinan dan arah pemerintahan umat Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor keagamaan, hukum, dan politik saling berinteraksi dalam membentuk dinamika konflik pada masa awal Islam, sehingga peristiwa tersebut perlu dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya dari satu sudut pandang.

B. Jalannya Perang Nahrawan

Perang Nahrawan yang meletus pada tahun 38 H (658 M) tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pasca perang Shiffin, khususnya setelah keputusan untuk menerima Tahkim (arbitrase) disepakati. Kelompok yang kelak dikenal sebagai kaum Khawarij ini pada awalnya merupakan bagian dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang paling setia. Namun, akibat benturan pemahaman teologis politik mengenai esensi

hukum Allah, mereka memutuskan untuk memisahkan diri (khuruj) dari barisan utama. Berdasarkan catatan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa al-Nihayah, faksi oposisi awal ini bergerak menuju wilayah Harura, sebuah desa di dekat Kufah, dengan kekuatan sekitar 12.000 personil, sebelum akhirnya memindahkan basis kekuatan militer utama mereka ke wilayah Nahrawan yang terletak strategis di dekat jalur sungai bagian timur Baghdad.

Abu Mikhnaf meriwayatkan dari Abdul Malik bin Abi Hurrah bahwa ketika Ali mengirim Abu Musa untuk bertahkim (berunding), kaum Khawarij berkumpul di rumah Abdullah bin Wahab ar-Rasibi. Ia menyampaikan pidato yang berapi - api, mengajak mereka zuhud di dunia dan mengejar akhirat dan surga. Ia juga mendorong mereka untuk menegakkan amar maruf nahi mungkar. Kemudian ia berkata, Keluarkanlah saudara saudara kita dari negeri yang zhalim penduduknya ke balik gunung ini di puncak puncaknya atau di beberapa negeri lainnya, demi mengingkari tahkim (perundingan) yang zhalim ini.

Lalu giliran Sinan bin Hamzah al-Asadi berorasi, ia berkata, Wahai kaum, sungguh sangat tepat pendapat kalian ini, sungguh kebenaran adalah yang kalian sebutkan tadi. Angkatlah seseorang menjadi pemimpin kalian, karena urusan ini harus diatur oleh seorang pemimpin dan harus ada panji yang menaungi kalian dan menjadi rujukan kalian. Mereka mengutus seseorang untuk menemui Zaid bin Hushain ath-Thai, ia termasuk salah seorang tokoh mereka lalu mereka menawarkan kepemimpinan kepadanya namun ia menolak. Kemudian mereka menawarkannya kepada Hurqush bin Zuhair, namun ia pun menolak. Kemudian mereka menawarkannya kepada Hamzah bin Sinan, namun ia juga menolak. Kemudian mereka menawarkannya kepada Syuraih bin Aufa al-Ibsi, namun ia juga menolaknya. Kemudian mereka menawarkannya kepada Abdullah bin Wahab ar-Rasibi, iapun menerimanya. Ia berkata, "Demi Allah, aku menerimanya bukan karena mengharapkan dunia dan tidak pula aku menolaknya karena takut mati. Lalu mereka berkumpul di rumah Zaid bin Hushain ath-Thai as-Simbasi, ia menyampaikan orasinya dan mendorong mereka untuk menegakkan amar maruf nahi mungkar.

Kemudian ia berkata, Saksikanlah wahai orang-orang yang mendengar seruan kami dari kalangan ahli kiblat bahwa mereka (Ali dan orang-orang yang bersama beliau) telah mengikuti hawa nafsu dan telah membuang hukum Allah. Mereka telah berbuat zhalim dalam perkataan dan perbuatan. Berjihad melawan mereka adalah kewajiban kaum mukminin. Mendengar orasinya itu menangislah seorang lelaki bernama Abdullah bin Syajarah as-Sulami. Kemudian ia mengajak mereka untuk memberontak. Dalam orasinya ia berkata, Pukullah wajah dan dahi mereka dengan pedang hingga hanya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang sajalah yang ditaati. Jika kalian menang, aku akan mentaati Allah sebagaimana yang kalian kehendaki. Allah akan memberi kalian pahala orang-orang yang taat dan orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Dan jika kalian terbunuh maka adakah lagi yang lebih utama daripada sabar dan menuju kepada Allah dan keridhaan dan surgaNya?

Mereka pun mengirim pesan umum kepada orang-orang yang sejalan dengan mereka dari kalangan penduduk Bashrah dan lainnya. Mereka mengirim utusan kepada penduduk Bashrah dengan membawa pesan agar semuanya berkumpul di sungai Jukha. Agar mereka menjadi satu barisan dalam menghadapi musuh. Kemudian mereka pun keluar secara berangsur satu demi satu supaya orang lain tidak mengetahui rencana mereka sehingga melarang mereka keluar. Maka mereka pun keluar meninggalkan ayah dan ibu, meninggalkan paman dan bibi mereka. Mereka meninggalkan seluruh handai taulan. Karena kejahilan dan dangkalnya ilmu dan akal mereka men-gira perbuatan tersebut mendatangkan keridhaan Rabb pemilik langit dan bumi. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah dosa besar, pelanggaran dan kesalahan yang besar. Perbuatan yang dibisiki oleh Iblis kepada mereka dan dibisiki oleh jiwa mereka yang selalu mendorong kepada kejahatan. Sejumlah orang tua memergoki anak-anak, kerabat atau rekan-rekan mereka, lalu mencela dan mengembalikan orang-orang yang tertipu itu ke jalan yang benar. Sebagian dari mereka sadar dan istiqamah di atas jalan yang benar. Dan sebagian lainnya lari dan bergabung bersama kaum Khawarij.

Seluruh kaum Khawarij berkumpul di Nahrawan. Akhirnya mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan. Mereka menggalang pasukan indepen-den, di dalamnya terdapat para jagoan, orang-orang pemberani, teguh dan sabar. Menurut mereka, apa yang mereka lakukan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah kaum yang tidak menghangatkan badan dengan nyala api dan tidak ada seorang pun yang berhasrat menuntut balas terhadap mereka. Ketika Ali tengah mempersiapkan pasukan untuk memerangi pasukan Syam, sampailah berita kepada beliau bahwa kaum Khawarij berbuat ke-kacauan di atas muka bumi. Mereka menumpahkan darah, menyabot jalan dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan. Di antara korban yang mereka bunuh adalah Abdullah bin Khabbab, salah seorang sahabat nabi. Mereka menawan Abdullah bin Khabbab beserta istrinya yang sedang hamil.

Lalu mereka pun mengikat tangan beliau. Ketika beliau berjalan bersama mereka, salah seorang dari mereka berpapasan dengan seekor babi milik kafir dzimmi. Ia menebas babi itu dengan pedangnya lalu membelah kulitnya. Temannya yang lain berkata, "Mengapa engkau lakukan itu? Bukankah babi itu milik kafir dzimmi?" Lalu ia mendatangi si kafir pemilik babi lalu memin-ta halal darinya dan membuat si kafir itu ridha. Ketika beliau bersama mereka tiba-tiba jatuhlah sebuah kurma dari batangnya, lalu salah seorang dari mereka memakannya. Rekannya yang lain berkata, "Apakah engkau memakannya tanpa

izin dan tanpa membayarnya?" Spontan saja orang itu memuntahkan kurma tersebut dari mulutnya.

Namun demikian, mereka tega membunuh Abdullah bin Khabbab dan menyembelihnya. Lalu mereka mendatangi istri beliau. Istri beliau berkata, "Aku adalah wanita yang sedang hamil, tidakkah kalian takut kepada Allah?" Namun mereka tetap menyembelihnya dan membelah perutnya lalu mengeluarkan janinnya. Ketika sampai ke telinga penduduk Kufah tentang perbuatan kaum Khawarij ini, mereka jadi khawatir berangkat ke Syam. Mereka sibuk berperang lalu meninggalkan kampung halaman dan keluarga mereka di bawah intaian kaum Khawarij yang setiap waktu bisa saja melakukan perbuatan serupa terhadap keluarga mereka. Mereka khawatir serangan mendadak dari kaum Khawarij. Lalu sebagian orang menyarankan kepada Ali agar terlebih dulu membereskan mereka. Setelah itu baru berangkat menuju Syam dalam kondisi penduduk telah aman dari kejahatan kaum Khawarij ini. Saran ini pun disepakati. Keputusan itu membawa kebaikan yang sangat besar bagi mereka dan bagi penduduk Syam juga. Sebab kalaulah kaum Khawarij ini bertambah kuat maka mereka akan berbuat kerusakan di mana-mana, baik di Iraq maupun di Syam. Mereka tidak akan membiarkan anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Karena dalam pandangan kaum Khawarij semua orang telah berbuat kerusakan dan tidak ada yang dapat memperbaiki mereka kecuali dihabisi seluruhnya.

Ali mengutus al-Harits bin Murrah al-Abdi kepada mereka. Ali berpesan kepadanya, Bawalah kepadaku informasi tentang keadaan mereka, bawalah keterangan kepadaku tentang kondisi mereka dan tuliskanlah semua itu dengan jelas kepadaku. Ketika al-Harits datang menemui mereka, mereka langsung membunuhnya tanpa basa-basi lagi. Ketika berita itu sampai kepada Ali, beliau langsung mengerahkan pasukan untuk menghadapi mereka dan menunda keberangkatan beliau bersama pasukan ke Syam. Ibnu Katsir berkata, "Ali berjalan lewat wilayah al-Anbar. Beliau mengutus satu detasemen ke depan yang dipimpin oleh Qais bin Saad. Beliau memerintahkan agar mendatangi al-Madain dan bertemu dengan wakil beliau di sana yaitu Saad bin Masud ats-Tsaqafi dan bergabung bersama pasukan al-Madain. Orang-orang bergabung bersama Ali di sana. Kemudian beliau mengirim seorang utusan kepada kaum Khawarij, Serahkan para pembunuh rekan-rekan kami untuk diqishash. Bila itu kalian laksanakan maka kami akan membiarkan kalian dan kami akan berangkat ke Syam meninggalkan kalian. Mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kalian dan mengembalikan kalian kepada kebaikan yang dahulu kalian berada di atasnya. Lalu mereka mengirim utusan kepada Ali untuk menyampaikan, Bahwa kami semua yang telah membunuh rekan kalian. Kami menghalalkan darah mereka dan darah kalian.

Lalu majulah Qais bin Saad bin Ubadah, beliau menasihati mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah dosa besar dan kesalahan yang fatal. Namun nasihat itu tidak bermanfaat bagi mereka. Hal yang sama dilakukan oleh Abu

Ayyub al-Anshari, beliau mengingatkan dan mencela mereka namun peringatan beliau itu juga tidak berguna bagi mereka. Lalu majulah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau menasihati, mengancam, memperi-ngatkan dan memberi ultimatum kepada mereka. Namun tidak ada jawaban melainkan teriakan, Janganlah berdialog dan berbicara dengan mereka! Bersiaplah menghadap Allah marilah bersegera menuju surga!"

Mereka maju dan mengatur barisan untuk berperang dan bersiap menghadapi pertempuran. Di sebelah kanan pasukan mereka berdiri Zaid bin. Hushain ath-Thai as-Simbisi, di sebelah kiri berdiri Syuraih bin Aufa, pasukan berkuda dipimpin oleh Hamzah bin Sinan dan pasukan infanteri dipimpin oleh Hurqush bin Zuhair as-Sadi. Mereka berdiri menghadang Ali dan pasukan beliau. Sementara itu Ali menunjuk Hujr bin Adi memimpin sebelah kanan pasukan dan Syabats bin Ribī atau Maqal bin Qais ar-Riyahi di sebelah kiri, pasukan berkuda dipimpin oleh Abu Ayyub al-Anshari dan pasukan infan-teri dipimpin oleh Abu Qatadah al-Anshari, pasukan Madinah yang pada saat itu berjumlah tujuh ratus orang dipimpin oleh Qais bin Saad bin Ubadah.

Ali memerintahkan Abu Ayyub al-Anshari mengibarkan bendera tanda aman bagi pasukan Khawarij. Ali menawarkan kepada mereka, "Barangsiapa bernaung di bawah bendera ini maka ia aman, barangsiapa kembali ke Kufah dan ke al-Madain maka ia aman, kami tidak ingin menumpahkan darah kalian kecuali orang-orang yang telah membunuh rekan kami. Sebagian besar dari mereka memilih kembali, jumlah mereka sekitar empat ribu orang. Hanya tersisa seribu orang saja atau kurang dari itu bersama Abdullah bin Wahab ar-Rasibi.

Mereka maju menyerbu ke arah pasukan Ali. Ali memerintahkan pasukan berkuda untuk maju ke depan, lalu memerintahkan agar pasukan pemanah mengambil tempat di belakang pasukan berkuda. Kemudian menempatkan pasukan infanteri di belakang pasukan berkuda. Beliau berkata kepada pasu-kan, "Tahanlah, hingga merekalah yang memulainya!" Pasukan Khawarij maju seraya meneriakkan kata-kata, "Tidak ada hukum melainkan milik Allah. marilah bersegera menuju surga!" Mereka menyerang pasukan berkuda yang dimajukan oleh Ali. Mereka membelah pasukan berkuda hingga sebagian dari pasukan berkuda menyingkir ke kanan dan sebagian lagi menyingkir ke kiri. Lalu mereka disambut oleh pasukan pemanah dengan panah-panah mereka. Pasukan pemanah memanahi wajah-wajah mereka kemudian pasu-kan berkuda mengurung mereka dari kanan dan dari kiri. Lalu pasukan infanteri menyerbu mereka dengan tombak dan pedang. Mereka menghabisi pasukan Khatvarij sehingga korban yang gugur terinjak-injak oleh kaki kuda. Turut tewas pula pada peperangan itu pemimpin mereka, Abdullah bin Wahab, Hurqush bin Zuhair, Syuraih bin Aufa dan Abdullah bin Syajarah as-Sulami. Sementara dari pasukan Ali hanya terbunuh tujuh orang saja.

Ali berjalan di antara korban-korban yang tewas sembari berkata, "Celakalah kalian, kalian telah dibinasakan oleh yang menipu kalian Orang-orang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah yang telah menipu mereka?

Ali menjawab, "Setan dan jiwa yang selalu menyuruh berbuat jahat. Mereka telah ditipu oleh angan-angan dan terlihat indah oleh mereka perbuatan maksiat dan membisiki mereka seolah mereka telah menang. Kemudian Ali memerintahkan untuk mengumpulkan orang-orang yang terluka dari mereka, ternyata jumlahnya empat ratus orang. Ali menyerahkan mereka kepada kabilah-kabilah mereka untuk diobati. Lalu membagikan senjata dan barang yang dirampas kepada mereka.

Al-Haitsam bin Adi berkata, "Ali tidak membagi-bagikan harta rampasan perang yang dirampas dari kaum Khawarij pada peperangan Nahrawan. Namun beliau mengembalikan seluruhnya kepada keluarga-keluarga mereka. Sampai-sampai sebuah periuk beliau menolaknya dan mengembalikan kepada keluarga si empunya. Al-Haitsam bin Adi berkata, "Ismail bin Abi Khalid telah menyampaikan kepada kami dari Hakim bin Jabir, ia berkata, Ali ditanya tentang pasukan Khawarij dalam perang Nahrawan, apakah mereka termasuk kaum musyrikin?" Ali menjawab, Justru mereka menghindari dari kemusyrikan. Ada lagi yang bertanya, Apakah mereka termasuk kaum munafikin? Beliau menjawab, Sesungguhnya kaum munafikin tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kemudian ada yang bertanya, Lalu bagaimanakah kedudukan mereka wahai Amirul Mukminin? Ali menjawab, Mereka adalah saudara-saudara kita yang membangkang terhadap kita. Kita memerangi mereka karena pembangkangan mereka itu.⁴⁶

Pasca pertempuran di Nahrawan, Ibnu Katsir mendokumentasikan sebuah kebijakan krusial yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib terhadap kelompok Khawarij. Ali secara sadar memilih untuk tidak memberikan label *musyrik* atau *munafik* kepada lawan politiknya tersebut. Beliau justru menempatkan mereka dalam kategori *ikhwanuna baghaw alayna*, yang berarti "saudara-saudara kita yang membangkang." Secara politik, label ini menjadi sangat penting karena membedakan antara tindakan kriminalitas politik dengan penistaan agama.

Konsistensi sikap ini ditunjukkan oleh Ali melalui keputusan administratif untuk tidak mengambil harta benda kaum Khawarij sebagai harta rampasan perang (*ghanimah*). Ali justru memerintahkan agar seluruh aset tersebut dikembalikan kepada keluarga mereka. Langkah ini mencerminkan bahwa meskipun Ali harus menempuh

⁴⁶ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin*, h. 512-515.

jalur militer untuk memulihkan keamanan dan stabilitas wilayah, beliau tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, tindakan Ali pasca perang bukan sekadar aksi kemenangan militer, melainkan sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa kekuasaan sejatinya adalah instrumen untuk melindungi hak warga negara, terlepas dari perbedaan ideologi yang tajam. Dalam kerangka kepemimpinan, Ali membuktikan bahwa seorang pemimpin tetap wajib menjamin keadilan hukum, bahkan terhadap pihak yang secara nyata telah melakukan pemberontakan terhadap otoritasnya.

C. Pembunuhan Ali bin Abi Thalib

Meskipun pasukan Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan Khawarij dalam Perang Nahrawan, kemenangan tersebut tidak sepenuhnya mengakhiri ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut. Sebagian anggota Khawarij yang selamat tetap mempertahankan permusuhan terhadap Ali dan menganggapnya telah melakukan kesalahan karena menerima Tahkim. Kebencian tersebut bahkan mendorong sebagian dari mereka untuk merencanakan pembunuhan terhadap Ali sebagai bentuk balasan atas kekalahan yang mereka alami. Keadaan ini menunjukkan bahwa konflik antara Ali dan Khawarij tidak berakhir dengan pertempuran di Nahrawan, tetapi terus berlanjut akibat perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan dan penyelesaian sengketa dalam umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Bidayah wa al-Nihayah*.

Ibnu Jarir dan pakar-pakar sejarah lainnya menyebutkan bahwa tiga orang Khawarij berkumpul, mereka adalah Abdurrahman bin Amru yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam al-Himyari al-Kindi sekutu Bani Jabalah dari suku Kindah al-Mishri, al-Burak bin Abdillah at-Tamimi dan Amru bin Bakr at-Tamimi. Mereka mengenang kembali perbuatan Ali bin Abi Thalib yang membunuh teman-teman mereka di Nahrawan, mereka memohon rahmat buat teman-teman mereka itu. Mereka berkata, "Apa yang kita lakukan sepeninggal mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia dan yang paling banyak shalatnya, mereka adalah penyeru manusia kepada Allah. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau kita

tebus diri kita lalu kita datangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu kemudian kita bunuh mereka sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka dan kita dapat membalas dendam atas kematian teman-teman kita.

Ibnu Muljam berkata, "Aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib!" Al-Burak bin Abdillah berkata, "Aku akan menghabisi Muawiyah bin Abi Sufyan." Amru bin Bakr berkata, "Aku akan menghabisi Amru bin al-Ash." Merekaapun berikrar dan mengikat perjanjian untuk tidak mundur dari niat semula hingga masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbu-nuh. Merekaapun mengambil pedang masing-masing sambil menyebut nama sahabat yang menjadi targetnya. Mereka sepakat melakukannya serempak pada tanggal 17 Ramadhan tahun 40 H. Kemudian ketiganya berangkat menuju tempat target masing-masing.

Adapun Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Setibanya di sana ia menyembunyikan identitas, hingga terhadap teman-temannya dari kalangan Khawarij yang dahulu bersamanya. Ketika ia sedang duduk bersama beberapa orang dari Bani Taim ar-Ribab, mereka mengenang teman teman mereka yang terbunuh pada peperangan Nahrawan. Tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Qatham binti Asy-Syijnah, ayah dan kakaknya dibunuh oleh Ali pada peperangan Nahrawan. Ia adalah wanita yang sangat cantik dan populer. Dan ia telah mengkhususkan diri beribadah dalam masjid jami". Demi melihatnya Ibnu Muljam mabuk kepayang. Ia lupa tujuannya datang ke Kufah. Ia meminang wanita itu. Qatham mensyaratkan mahar tiga ribu dirham, seorang khadim, budak wanita dan membunuh Ali bin Abi Thalib untuk dirinya. Ibnu Muljam berkata, "Engkau pasti mendapatkannya, demi Allah tidaklah aku datang ke kota ini melainkan untuk membunuh Ali."

Lalu Ibnu Muljam menikahinya dan berkumpul dengannya. Kemudian Qatham mulai mendorongnya untuk melaksanakan tugasnya itu. Ia mengutus seorang lelaki dari kaumnya bernama Wardan, dari Taim Ar-Ribab, untuk menyertainya dan melindunginya. Lalu Ibnu Muljam juga menggaet seorang lelaki lain bernama Syabib bin Bajrah al-Asyjai al-Haruri. Ibnu Muljam berkata kepadanya, "Maukah kamu memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat?" "Apa itu?" Tanyanya. "Membunuh Ali!" Jawab Ibnu Muljam. Ia berkata, "Celaka engkau, engkau telah mengatakan perkara yang sangat besar! Bagaimana mungkin engkau mampu membunuhnya?" Ibnu Muljam berkata, "Aku mengintainya di masjid, apabila ia keluar untuk mengerjakan shalat subuh, kita mengepungnya dan kita membunuhnya. Apabila berhasil maka kita merasa puas dan kita telah membalas dendam. Dan bila kita terbunuh maka apa yang tersedia di sisi Allah lebih baik dari pada dunia." Ia berkata, "Celaka engkau, kalaulah orang itu bukan Ali tentu aku tidak keberatan melakukannya, engkau tentu tahu senioritas beliau dalam Islam dan kekerabatan beliau dengan Rasulullah . Hatiku tidak terbuka untuk membunuhnya." Ibnu Muljam berkata, "Bukankah ia telah membunuh teman-teman kita di Nahrawan?" "Benar!" jawabnya. "Marilah kita

bunuh ia sebagai balasan bagi teman-teman kita yang telah dibunuhnya" kata Ibnu Muljam. Beberapa saat kemudian Syabib menyambutnya.

Masuklah bulan Ramadhan. Ibnu Muljam membuat kesepakatan dengan teman-temannya pada malam Jumat 17 Ramadhan. Ibnu Muljam berkata, "Malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing. Lalu mulailah ketiga orang ini bergerak, yakni Ibnu Muljam, Wardan dan Syabib, dengan menghunus pedang masing-masing. Mereka duduk di hadapan pintu yang mana Ali biasa keluar dari-nya. Ketika Ali keluar, beliau membangunkan orang-orang untuk shalat sembari berkata, "Shalat...shalat!" Dengan cepat Syabib menyerang dengan pedangnya dan memukulnya tepat mengenai leher beliau. Kemudian Ibnu Muljam menebaskan pedangnya ke atas kepala beliau. Darah beliau mengalir membasahi jenggot beliau.

Ali berteriak, "Tangkap mereka!" Adapun Wardan melarikan diri namun berhasil dikejar oleh seorang lelaki dari Hadhramaut lalu membunuhnya. Adapun Syabib, berhasil menye-lamatkan diri dan selamat dari kejaran manusia. Sementara Ibnu Muljam berhasil ditangkap. Ali menyuruh Jadah bin Hubairah bin Abi Wahab untuk mengimami Shalat Fajar. Ali pun dibopong ke rumahnya. Lalu digiring pula Ibnu Muljam kepada beliau dan dibawa dihadapan beliau dalam keadaan dibelenggu tangannya ke belakang pundak, semoga Allah memburukkan rupanya. Ali berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan ini?" Ibnu Muljam berkata, "Aku telah mengasah pedang ini selama empat puluh hari. Aku memohon kepada Allah agar aku dapat membunuh dengan pedang ini makhlukNya yang paling buruk!" Ali berkata kepadanya, "Menurutku engkau harus terbunuh dengan pedang itu. Dan menurutku engkau adalah orang yang paling buruk."Kemudian beliau berkata, "Jika aku mati maka bunuhlah orang ini, dan jika aku selamat maka aku lebih tahu bagaimana aku harus memperlakukan. orang ini".⁴⁷

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa kekalahan Khawarij dalam Perang Nahrawan tidak serta-merta mengakhiri konflik antara kelompok tersebut dengan Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya, peristiwa Nahrawan justru melahirkan rasa dendam yang mendalam di kalangan sebagian anggota Khawarij yang masih hidup. Mereka memandang tindakan Ali dalam memerangi dan membunuh rekan-rekan mereka sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip yang mereka yakini. Oleh karena itu, muncul

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin*, h. 435-437.

keinginan untuk melakukan pembalasan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas keadaan tersebut, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin al-Ash.

Perencanaan pembunuhan terhadap ketiga tokoh tersebut memperlihatkan bahwa gerakan Khawarij tidak lagi terbatas pada penolakan terhadap hasil Tahkim, tetapi telah berkembang menjadi tindakan politik yang bersifat radikal. Keyakinan bahwa mereka sedang menjalankan perintah agama mendorong sebagian anggota Khawarij untuk menghalalkan penggunaan kekerasan terhadap pihak yang mereka anggap telah keluar dari kebenaran. Dalam konteks ini, pembunuhan dipahami sebagai sarana untuk menegakkan apa yang mereka yakini sebagai hukum Allah serta membalas kematian anggota kelompok mereka yang gugur di Nahrawan.

Peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam juga menunjukkan bahwa konflik politik pada masa tersebut telah mengalami transformasi menjadi konflik ideologis yang sulit diselesaikan melalui pendekatan militer semata. Meskipun Khawarij telah dikalahkan secara fisik, gagasan dan keyakinan yang mereka anut tetap bertahan serta terus memengaruhi tindakan para pengikutnya. Dengan demikian, wafatnya Ali bukan hanya merupakan akibat dari tindakan individu, melainkan juga merupakan konsekuensi dari pertentangan politik dan keagamaan yang berkembang sejak Perang Shiffin, Tahkim, hingga Perang Nahrawan.

D. Pengangkatan Hasan bin Ali sebagai khalifah dan penyerahan kekuasaan pada Muawiyah bin Abi Sufyan

Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, masyarakat Kufah segera memberikan baiat kepada putranya, Hasan bin Ali, sebagai khalifah untuk melanjutkan kepemimpinan umat Islam. Pembaiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan pengakuan

terhadap Hasan sebagai penerus kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini menunjukkan upaya masyarakat Kufah untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan persatuan umat Islam di tengah situasi politik yang masih diliputi konflik, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Bidayah wa al-Nihayah*.

Ketika Ibnu Muljam menikam Ali bin Abi Thalib, mereka berkata kepada Ali, "Tunjuklah khalifah sepeninggalmu wahai Amirul Mukminin!" Ali berkata, "Tidak! Aku akan membiarkan kalian sebagaimana Rasulullah meninggalkan kalian (yakni tanpa menunjuk khalifah). Apabila Allah menghendaki kebaikan atas kalian maka Allah akan menyatukan kalian di bawah kepemimpinan orang yang terbaik dari kalian sebagaimana Dia telah menyatukan kalian di bawah kepemimpinan orang yang terbaik dari kalian sepeninggal Rasulullah. Setelah beliau wafat, putera beliau yakni al-Hasan menshalati jenazah beliau karena ia adalah putera beliau yang tertua, lalu jenazah beliau dikebumikan. Orang pertama yang maju membaiat al-Hasan bin Ali adalah Qais bin Saad bin Ubadah. Ia berkata kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu, aku akan membaiatmu atas dasar Kitabullah dan Sunnah nabiNya." Al-Hasan hanya diam. Qais membaiatnya lalu diikuti oleh orang banyak sesudahnya. Peristiwa itu terjadi pada hari wafatnya Ali bin Abi Thalib pada bulan Ramadhan tahun 40 H. Saat itu Qais bin Saad adalah amir wilayah Adzerbaijan. Ia membawahi empat puluh ribu tentara. Mereka semua telah berbaiat untuk membela Ali sampai titik darah penghabisan. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat Qais bin Saad mendorong al-Hasan agar berangkat memerangi penduduk Syam. Lalu al-Hasan menarik Qais dari Adzerbaijan, kemudian mengirim Ubaidullah bin Abbas sebagai penggantinya.⁴⁸

Riwayat tersebut menjelaskan bahwa menjelang wafatnya, Ali bin Abi Thalib tidak menunjuk pengganti secara langsung untuk memimpin umat Islam setelah dirinya. Setelah Ali wafat pada Ramadan tahun 40 H, masyarakat Kufah segera membaiat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Baiat pertama dilakukan oleh Qais bin Saad bin Ubadah dan kemudian diikuti oleh masyarakat lainnya. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa Hasan bin Ali memperoleh dukungan dari kelompok yang sebelumnya setia kepada Ali bin Abi Thalib, termasuk pasukan yang berada di bawah kepemimpinan Qais bin Saad. Selain

⁴⁸ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin*, h. 535.

itu, Qais mendorong Hasan untuk melanjutkan konfrontasi dengan Muawiyah dan penduduk Syam, meskipun pada perkembangan berikutnya Hasan mengambil kebijakan politik yang berbeda.

Pembaiatan Hasan bin Ali menunjukkan bahwa legitimasi politik pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib masih berpusat di Kufah sebagai basis utama pendukung keluarga Ali. Dukungan yang diberikan oleh Qais bin Saad dan para pengikutnya memperlihatkan adanya keinginan sebagian kelompok untuk melanjutkan perjuangan politik dan militer yang sebelumnya dijalankan oleh Ali dalam menghadapi Muawiyah. Namun, kondisi politik yang diwarisi Hasan sangat berbeda dengan masa awal pemerintahan ayahnya karena umat Islam telah mengalami perpecahan yang semakin mendalam akibat Perang Shiffin, Tahkim, dan munculnya kelompok Khawarij. Oleh karena itu, kepemimpinan Hasan dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan sekaligus menyelesaikan konflik yang berkepanjangan.

Konflik politik antara Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang masih berlanjut menunjukkan bahwa perselisihan yang telah berkembang sejak masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib belum sepenuhnya berakhir. Meskipun Hasan memperoleh dukungan dari masyarakat Kufah dan para pendukung ayahnya, kondisi internal yang tidak stabil serta keinginan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar mendorong munculnya upaya penyelesaian konflik melalui jalan damai. Dalam situasi tersebut, Hasan dan Muawiyah kemudian menempuh perundingan yang berujung pada tercapainya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa al-Nihayah

Dalam niat al-Hasan, beliau tidak ingin memerangi seorang pun. Akan tetapi mereka berhasil memaksakan pendapat mereka kepada beliau. Lalu berkumpul pasukan dalam jumlah yang sangat besar yang belum pernah terkumpul sebanyak itu. Al-Hasan menunjuk Qais bin Saad sebagai panglima

detasemen yang dikirim ke depan bersama dua belas ribu personil. Lalu beliau bergerak di belakangnya menuju negeri Syam untuk memerangi Muawiyah dan penduduk Syam. Ketika melewati wilayah al-Madain beliau mengirim pasukan detasemen ke depan, sementara beliau menunggu di al-Madain dalam kamp militer di pusat kota al-Madain. Tiba-tiba ada seorang yang berteriak di tengah-tengah kerumunan manusia, "Celaka, Qais bin Saad bin Ubadah telah terbunuh!". Pasukan menjadi kacau, mereka saling menyerang satu sama lain. Hingga mereka menyerbu kemah al-Hasan. Mereka menarik secara paksa permadani yang dipakai duduk oleh al-Hasan dan sebagian dari mereka menikam beliau ketika sedang menaiki kendaraan hingga beliau cedera.

Al-Hasan sangat marah melihat sikap mereka itu. Beliau melarikan diri hingga tiba di istana putih di kota al-Madain. Beliau berlindung di sana dalam keadaan luka parah. Pada saat itu wakil beliau untuk kota al-Madain adalah Saad bin Masud ats-Tsaqafi, saudara laki-laki Abu Ubaid panglima dan pahlawan perang Jisr di Iraq. Ketika al-Hasan berlindung dengan aman dalam istana, al-Mukhtar bin Abi Ubaid semoga Allah memburukkan dirinya berkata kepada paman-nya, "Maukah engkau memperoleh kemuliaan dan kekayaan?" "Apa itu?" Tanya Saad. Ia berkata, "Ringkuslah al-Hasan bin Ali lalu rantailah dia dan bawalah ke hadapan Muawiyah!" Saad bin Masud, pamannya, berkata kepadanya, "Semoga Allah memburukkan dirimu dan apa yang engkau katakan itu! Apakah kau kira aku mau mengkhianati cucu Rasulullah ?

Saat melihat pasukan beliau tercerai berai al-Hasan bin Ali marah besar kepada mereka. Saat itu juga beliau menulis surat kepada Muawiyah yang pada waktu itu sudah berangkat bersama pasukan Syam dan singgah di tempat bernama Maskin, yang isinya mengajak Muawiyah berdamai. Lalu Muawiyah mengutus Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah untuk menemui al-Hasan. Keduanya berangkat ke Kufah dan menemui beliau. Keduanya memberi harta yang beliau inginkan. Beliau mensyaratkan agar dibolehkan mengambil bagian sebesar lima juta dirham dari baitul mal Kufah dan mensyaratkan agar pajak wilayah Darabjard diserahkan kepada beliau. Dan beliau juga meminta agar tidak boleh seorang pun mencela Ali bin Abi Thalib di depan beliau. Jika syarat-syarat itu dipenuhi maka beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah demi menyelamatkan darah kaum muslimin.

Maka mereka pun menyepakati persyaratan tersebut. Dengan demikian bulatlah suara untuk Muawiyah. Dalam hal ini al-Husain mencela keputusan saudaranya itu, yakni al-Hasan. Ia tidak bisa menerima keputusan itu. Namun kebenaran berada di pihak al-Hasan, Kemudian al-Hasan mengirim perintah kepada Qais bin Saad selaku panglima detasemen agar mendengar dan patuh kepada Muawiyah. Menurut catatan yang masyhur, al-Hasan berbaiat kepada Muawiyah pada tahun 40 H. Oleh sebab itu tahun tersebut dinamakan tahun jamaah. Karena suara kaum muslimin bulat untuk Muawiyah. Menurut pendapat yang masyhur dari Ibnu Jarir dan pakar sejarah lainnya menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 41 H. Setelah Muawiyah menerima kekuasaan

negeri-negeri beliau masuk kota Kufah dan menyampaikan khutbahnya. Suara kaum muslimin dari seluruh daerah dan negeri telah bulat menerimanya. Tahun itu juga telah dicapai kesepakatan dan ijma atas pembaiatan beliau. Kemudian al-Hasan bin Ali bersama saudaranya, yakni al-Husain bin Ali serta saudara-saudara mereka yang lainnya dan keponakan mereka, Abdullah bin Jafar, meninggalkan tanah Iraq menuju kota Madinah An-Nabawiyah, semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada penduduknya.⁴⁹

Berdasarkan keterangan dalam kitab *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, Hasan bin Ali pada awalnya mempersiapkan pasukan untuk menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, kondisi pasukan yang tidak stabil menyebabkan munculnya berbagai persoalan di dalam kubu Hasan. Beredarnya kabar terbunuhnya Qais bin Saad menimbulkan kepanikan dan perpecahan di kalangan pasukan sehingga sebagian dari mereka bahkan menyerang kemah Hasan dan melukai beliau. Situasi tersebut menunjukkan lemahnya solidaritas pasukan Kufah yang menjadi pendukung utama Hasan. Melihat kondisi tersebut serta demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar, Hasan kemudian memilih menempuh jalan perdamaian dengan Muawiyah. Kesepakatan yang dicapai akhirnya mengakhiri konflik politik antara kedua belah pihak dan membuka jalan bagi bersatunya kembali kaum Muslimin di bawah kepemimpinan Muawiyah.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa keputusan Hasan bin Ali untuk berdamai dengan Muawiyah tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi internal pendukungnya yang mengalami perpecahan. Ketidakstabilan pasukan Kufah melemahkan posisi Hasan dalam menghadapi Muawiyah dan mengurangi peluang untuk melanjutkan konflik bersenjata. Oleh karena itu, perdamaian yang ditempuh Hasan dapat dipahami sebagai upaya menjaga persatuan umat Islam dan mencegah terjadinya perang saudara yang berkepanjangan.

⁴⁹ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin*, h. 536-538.

Perdamaian antara Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi titik penting dalam sejarah politik Islam karena mengakhiri konflik kekuasaan yang berlangsung sejak masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dengan penyerahan kekuasaan oleh Hasan, Muawiyah memperoleh pengakuan sebagai pemimpin tunggal umat Islam. Persatuan wilayah Islam di bawah kepemimpinan Muawiyah menandai berakhirnya masa konflik internal dan sekaligus menjadi awal berdirinya pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus.

E. Dampak Konflik: Munculnya Tiga Golongan dan Pergeseran Pusat Kekuasaan Islam

Proses konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya berawal dari tuntutan qisas atas pembunuhan Utsman bin Affan, berkembang melalui Perang Jamal dan Perang Shiffin, dan mencapai puncaknya pada peristiwa tahkim yang gagal menyelesaikan perselisihan secara tuntas. Rangkaian proses tersebut tidak berhenti sebagai pertikaian politik semata, melainkan menimbulkan dua dampak struktural yang mengubah wajah umat Islam pada paruh kedua abad VII M, yaitu munculnya tiga golongan dalam tubuh umat Islam serta bergesernya pusat kekuasaan pemerintahan.

Dampak pertama dari konflik tersebut adalah terpecahnya umat Islam menjadi tiga golongan besar, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur (kelompok mayoritas yang kemudian dikenal sebagai Ahlussunnah). Golongan Khawarij lahir dari kelompok pendukung Ali yang menolak hasil tahkim dan keluar dari barisannya karena menganggap penyelesaian melalui arbitrase manusia bertentangan dengan hukum Allah, sehingga kelompok ini kemudian berkembang menjadi gerakan oposisi bersenjata yang

memerangi baik Ali maupun Muawiyah. Golongan Syiah muncul dari kelompok yang tetap mempertahankan loyalitas eksklusif kepada Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya, dengan memandang kepemimpinan Ali dan ahlulbait sebagai satu-satunya kepemimpinan yang sah sepeninggal Rasulullah. Adapun Jumah merupakan mayoritas umat Islam yang memilih untuk tidak memihak secara ekstrem kepada salah satu kubu serta menahan diri dari penghakiman terhadap para sahabat yang terlibat perselisihan, sikap yang kemudian menjadi salah satu prinsip dasar paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ali Muhammad Ash-Shallabi menjelaskan bahwa perpecahan menjadi kelompok-kelompok tersebut merupakan konsekuensi langsung dari memuncaknya konflik politik pascatahkim, sekaligus permulaan dari perbedaan teologis dan politik yang terus berkembang dalam sejarah Islam berikutnya.⁵⁰ Kesimpulan yang sejalan juga dikemukakan Agus Mustofa, yang menegaskan bahwa perpecahan tersebut lahir dari ketegangan perebutan legitimasi kekuasaan yang tidak terselesaikan melalui mekanisme syura, sehingga sebagian kelompok memilih jalan konfrontasi politik maupun teologis.⁵¹ Dalam kerangka Teori Konflik Ralf Dahrendorf, kemunculan tiga golongan ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pertentangan otoritas yang tidak terselesaikan, di mana masing-masing kelompok berupaya mempertahankan atau merumuskan ulang legitimasi kepemimpinan sesuai dengan pandangannya masing-masing.

Konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dapat dikatakan menyebabkan perubahan sistem pemerintahan Islam karena konflik tersebut secara langsung menggeser landasan legitimasi kekuasaan, yang semula bertumpu pada baiat dan musyawarah (syura) para sahabat, menjadi kekuasaan yang diperoleh serta

⁵⁰ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, terj. Muslich Taman, Akmal Burhanudin, dan Ahmad Yaman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012).

⁵¹ Agus Mustofa, *Perluakah Negara Islam* (Surabaya: Padma Press, 2010).

dipertahankan melalui kekuatan politik dan militer. Selama pemerintahan Ali, prinsip syura tetap dipertahankan sebagai dasar legitimasi, sebagaimana tampak dari proses baiat yang dilakukannya di Madinah. Sebaliknya, Muawiyah membangun serta mempertahankan kekuasaannya melalui basis dukungan militer dan administratif di Syam sejak ia menjabat sebagai gubernur, tanpa melalui proses syura yang sama. Setelah Muawiyah menjadi penguasa tunggal pascapenyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali, pola kepemimpinan berbasis kekuatan politik-militer tersebut kemudian dilembagakan melalui penetapan Yazid bin Muawiyah sebagai wali al-ahd, sehingga konflik yang semula bersifat politik dan temporer berubah menjadi transformasi struktural yang permanen dalam sistem pemerintahan Islam.

Dampak kedua dari konflik tersebut adalah bergesernya pusat kekuasaan pemerintahan Islam. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan yang semula berada di Madinah dipindahkan ke Kufah, Irak.⁵² Kepindahan tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan strategis, karena Kufah merupakan basis utama pendukung Ali yang terdiri atas para prajurit dan penduduk Irak, sekaligus berjarak lebih dekat dengan wilayah Syam yang dikuasai Muawiyah, sehingga memudahkan mobilisasi pasukan dalam menghadapi konfrontasi militer. Agus Mustofa menjelaskan bahwa sejak kepindahan tersebut, Madinah tidak lagi berfungsi sebagai ibu kota kedaulatan Islam dan tidak ada lagi khalifah yang berkedudukan di kota itu.⁵³ Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik politik yang berkembang telah memaksa pusat pemerintahan berpindah

⁵² Agus Mustofa, *Perlukah Negara Islam* (Surabaya: Padma Press, 2010), h. 117.

⁵³ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, terj. Muslich Taman, Akmal Burhanudin, dan Ahmad Yaman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012).

mengikuti basis kekuatan politik dan militer masing-masing pihak, alih-alih tetap berada di kota yang menjadi pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin sebelumnya.

Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan memperoleh kekuasaan penuh pascapenyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali pada tahun 41 H/661 M, pusat pemerintahan Islam kembali berpindah, kali ini dari Kufah menuju Damaskus, Suriah.⁵⁴ Perpindahan ini merupakan kelanjutan logis dari basis kekuasaan yang telah dibangun Muawiyah sejak diangkat sebagai Gubernur Syam pada masa Umar bin Khattab dan dipertahankannya hingga masa Utsman bin Affan, sehingga Damaskus telah menjadi pusat administrasi, jaringan birokrasi, dan basis dukungan militernya selama hampir dua puluh tahun sebelum ia menjadi khalifah. Dengan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahan, Muawiyah tidak hanya memindahkan lokasi kekuasaan secara geografis, tetapi juga memindahkan pusat gravitasi politik Islam dari basis keagamaan di Hijaz menuju basis administratif-militer di Syam, sebuah perubahan yang menjadi ciri khas pemerintahan Dinasti Umayyah selanjutnya.

Dengan demikian, munculnya tiga golongan dalam tubuh umat Islam serta pergeseran pusat kekuasaan dari Madinah ke Kufah dan kemudian ke Damaskus merupakan bukti konkret bahwa konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak hanya berdampak pada aspek politik jangka pendek, melainkan menjadi titik awal transformasi sistem pemerintahan Islam secara menyeluruh, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada sub-bab berikut.

⁵⁴ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Mu'awiyah bin Abu Sufyan: Prestasi Gemilang Selama 20 Tahun Sebagai Gubernur dan 20 Tahun Sebagai Khalifah*, terj. Izzuddin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2016).

F. Perubahan sistem pemerintahan dari Syura ke Monarki

Perubahan sistem pemerintahan Islam dari model syura pada masa Khulafaur Rasyidin menuju sistem dinasti pada masa Bani Umayyah dapat dikenali melalui beberapa indikator utama. Pertama, terjadi perubahan mekanisme suksesi kepemimpinan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengangkatan khalifah dilakukan melalui baiat dan musyawarah (syura) yang melibatkan para sahabat, meskipun mekanisme pelaksanaannya berbeda pada setiap masa kepemimpinan. Akan tetapi, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, mekanisme tersebut mengalami perubahan dengan ditetapkannya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota (wali al-ahd) yang dipersiapkan untuk menggantikan kedudukannya sebagai khalifah.

Kedua, peran syura sebagai dasar penentuan pemimpin mulai mengalami pergeseran. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin syura menjadi prinsip utama dalam menentukan khalifah dan memperoleh legitimasi politik dari umat, maka pada masa Muawiyah proses tersebut tidak lagi menjadi mekanisme utama dalam pergantian kepemimpinan. Penunjukan Yazid dilakukan atas kebijakan penguasa yang sedang memerintah, sehingga ruang musyawarah dalam menentukan pemimpin menjadi semakin terbatas.

Ketiga, lahirnya sistem monarki herediter sebagai bentuk baru pemerintahan Islam. Kekuasaan yang sebelumnya tidak diwariskan berdasarkan hubungan keluarga berubah menjadi sistem yang menempatkan garis keturunan sebagai dasar suksesi kepemimpinan. Dengan demikian, perubahan sistem pemerintahan tidak hanya ditandai oleh pergantian penguasa, tetapi juga oleh berubahnya mekanisme suksesi, melemahnya penerapan prinsip syura, serta munculnya tradisi pewarisan kekuasaan dalam lingkungan keluarga penguasa. Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa konflik politik pada

masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak hanya berdampak pada perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi titik awal transformasi sistem pemerintahan Islam dari model khilafah berbasis musyawarah menuju sistem monarki dinasti.

Konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak hanya mengakibatkan pergantian kepemimpinan, tetapi juga membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam. Rangkaian peristiwa yang dimulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Shiffin, peristiwa tahkim, munculnya kelompok Khawarij, hingga terbunuhnya Ali bin Abi Thalib menyebabkan stabilitas politik umat Islam semakin melemah. Situasi tersebut berlanjut ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah pada tahun 661 M sebagai upaya mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Peristiwa ini menjadi awal berdirinya Dinasti Umayyah dan menempatkan Muawiyah sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan Islam.

Setelah memperoleh kekuasaan secara penuh, Muawiyah berupaya menjaga stabilitas politik dan mencegah terulangnya konflik politik yang sebelumnya terjadi. Salah satu kebijakan politik yang ditempuh adalah mempersiapkan mekanisme suksesi kepemimpinan dengan menetapkan putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus kekuasaan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pola pergantian pemimpin. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin pengangkatan khalifah dilakukan melalui mekanisme musyawarah (syura) dan baiat umat, maka pada masa Muawiyah mulai terlihat kecenderungan menjadikan hubungan keturunan sebagai dasar suksesi kepemimpinan. Perubahan tersebut merupakan bukti konkret bahwa konflik politik pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak hanya berdampak pada aspek politik jangka pendek, tetapi juga memengaruhi struktur pemerintahan Islam

secara mendasar. Penunjukan Yazid sebagai wali al-ahd menandai dimulainya sistem pewarisan kekuasaan dalam lingkungan keluarga penguasa yang kemudian menjadi ciri utama pemerintahan Dinasti Umayyah. Dengan demikian, perubahan dari sistem syura menuju sistem monarki tidak dapat dipisahkan dari dinamika konflik politik yang terjadi pada masa transisi antara Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah.

Meskipun pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil menciptakan stabilitas politik dan mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi setelah masa fitnah, pada akhir pemerintahannya muncul perubahan penting dalam sistem kepemimpinan Islam. Perubahan tersebut ditandai dengan upaya Muawiyah menetapkan putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus kekuasaan. Kebijakan ini menjadi perhatian karena berbeda dengan pola pemilihan pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengutamakan musyawarah (syura). Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam kitab Tarikh Al-Thabari (The History of Al-Thabari) Volume 18:

Di antara peristiwa-peristiwa tersebut adalah kampanye musim dingin Junadah bin Abi Umayyah di wilayah Bizantium. Abd al-Rahman bin Masud juga dikatakan telah memimpin kampanye ini. Yazid bin Shajarah al-Rahāwī juga dikatakan telah melakukan penyerangan melalui laut sementara Iyad bin al-Harith melakukannya melalui darat. Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan memimpin orang-orang dalam ibadah haji menurut riwayat yang saya dengar dari Ahmad bin Thabit seseorang Ishaq bin Isa Abu Mashar. Pada tahun ini Muawiyah melaksanakan ibadah haji kecil (umrah) pada bulan Rajab. Pada tahun ini Muawiyah menyeru orang-orang untuk mengakui putranya, Yazid, sebagai penggantinya, dan menjadikannya wali sah (wali al-ahd).

Saya diberitahu oleh al-Harith, Ali bin Muhammad, Abu Ismail al-Hamdani dan Ali bin Mujahid al-Shabi: Al-Mughirah datang kepada Muawiyah, dan mengajukan pengunduran diri sambil mengeluh tentang kelemahannya. Muawiyah memecatnya dan ingin mengangkat Said bin al-As. Sekretaris Al-Mughirah mendengar hal itu, lalu ia datang kepada Said bin al-Aṣ dan memberitahunya tentang hal ini sementara seorang Kufan bernama Rabiah atau al-Rabi dari Khuzaah bersamanya. Kemudian Rabiah datang kepada Al-Mughirah, berkata, "Wahai Mughirah, saya yakin bahwa Amirul Mukminin tidak menyukaimu. Saya melihat Ibn Khunays, sekretarismu, bersama Said bin al-Aṣ memberitahunya bahwa Amirul Mukminin akan menempatkannya sebagai

penanggung jawab al-Kufah." Al-Mughirah menjawab, "Bukankah dia mengatakan seperti yang dikatakan al-Asha; Atau apakah tuanmu sedang tidak ada di tempat sehingga kamu membutuhkan pertolongan? Dan mungkin tuanmu akan kembali dengan membawa bantuan."

Pelan-pelan saja! Aku akan pergi menemui Yazid. Al-Mughirah kemudian pergi menemui Yazid, dan mengusulkan pengakuan itu kepadanya. Ketika Yazid menyampaikan hal itu kepada ayahnya, Muawiyah mengangkat kembali al-Mughirah ke al-Kufah, memerintahkannya untuk mengupayakan pengakuan Yazid. Al-Mughirah kemudian berangkat ke al-Kufah, dan sekretarisnya, Ibn Khunays, datang kepadanya, berkata, "Demi Allah, aku tidak menipu atau mengkhianatimu, dan aku juga tidak membenci pemerintahanmu, tetapi aku berhutang budi kepada Said, dan aku berterima kasih kepadanya atas hal itu." Al-Mughirah senang dengannya dan menerimanya kembali ke kantornya. Al-Mughirah juga mengupayakan pengakuan Yazid, dan mengirim utusan kepada Muawiyah mengenai hal itu.

Saya diberitahu oleh al-Harith, Ali, Maslamah: Ketika Muawiyah ingin mengakui Yazid (sebagai penggantinya), dia menulis surat kepada Ziyad, meminta nasihatnya. Ziyad kemudian memanggil Ubayd bin Kab al-Numayri berkata, "Setiap orang yang meminta nasihat memiliki kepercayaan, dan setiap rahasia memiliki tempat untuk menyimpannya. Sesungguhnya manusia telah menciptakan dua sifat bagi mereka: mengungkapkan rahasia dan memberikan nasihat kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Satu-satunya tempat penyimpanan rahasia adalah salah satu dari dua orang: seorang manusia duniawi yang mengharapkan pahala dan seorang manusia dunia yang memiliki harga diri dan kebijaksanaan yang menjaga kehormatannya. Aku telah mengalami keduanya darimu, oleh karena itu aku memuji hal itu atas namamu. Aku memanggilmu tentang suatu masalah yang aku ragu untuk menuliskannya. Sesungguhnya Amirul Mukminin telah menulis surat kepadaku yang menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk mengakui Yazid (sebagai penggantinya). Namun, ia takut akan ketidaksetujuan orang banyak. Ia berharap mendapat persetujuan mereka, dan meminta nasihatku. Dukungan untuk Islam dan keamanannya sangat penting, sementara Yazid santai dan lalai, mengingat pengabdianya pada berburu. Maka temuilah Amirul Mukminin, bertindak atas namaku, dan beritahukan kepadanya tentang tindakan Yazid. Katakan kepadanya, Berhati-hatilah dalam masalah ini, karena akan menjadi lebih tepat untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Jangan terburu-buru, karena pencapaian dengan penundaan lebih baik daripada tergesa-gesa tanpa hasil.

Ubayd menjawabnya, "Ada alternatif lain." Ziyad bertanya, "Apa itu?" Ubayd menasihati, "Jangan meremehkan pandangan Muawiyah kepadanya, dan jangan membuatnya membenci putranya. Aku akan bertemu dengan Yazid secara rahasia, memberitahunya atas namamu bahwa Amirul Mukminin telah menulis surat kepadamu meminta nasihatmu tentang pengakuan Yazid (sebagai pengganti), dan bahwa engkau khawatir akan ketidaksetujuan orang-orang

karena kekurangan yang mereka anggap ada padanya. Aku juga akan memberitahunya bahwa engkau berpikir dia harus meninggalkan perilaku yang dianggap buruk padanya, sehingga argumen Amirul Mukminin di hadapan orang-orang akan semakin kuat. Apa yang engkau inginkan akan mudah. Dengan demikian engkau akan mempersiapkan Yazid dan memuaskan Amirul Mukminin, serta menghindari apa yang engkau takutkan mengenai masyarakat." Mendengar itu, Ziyad menjawab, "Kau telah tepat sasaran. Pergilah dengan restu Allah. Jika kau berhasil, itu tidak akan disangkal, dan jika kau salah, itu bukanlah penipuan. Aku tidak menganggapmu sebagai orang yang membuat kesalahan, jika Allah menghendaki." Ubayd menjawab, "Kau katakan apa yang kau pikirkan, dan Allah menentukan secara rahasia apa yang Dia ketahui." Kemudian ia datang kepada Yazid dan berunding dengannya (tentang) hal itu, sementara Ziyad menulis surat kepada Muawiyah mendesaknya untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru. Muawiyah menerima itu, dan Yazid menahan diri dari melakukan banyak hal yang biasa dilakukannya. Kemudian Ubayd kembali kepada Ziyad, dan yang terakhir memberinya hibah tanah. Aku diberitahu oleh al-Harith, Ali: Ketika Ziyad meninggal, Muawiyah meminta dokumen tentang pengangkatan Yazid sebagai penggantinya dan membacanya kepada orang-orang. Jika ia meninggal, Yazid akan menjadi pewaris takhta.⁵⁵

Berdasarkan riwayat dalam Tarikh al-Thabari tersebut, dapat dipahami bahwa proses penunjukan Yazid bin Muawiyah sebagai penerus kekuasaan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui langkah-langkah politik yang berlangsung secara bertahap. Muawiyah terlebih dahulu membangun dukungan dari sejumlah pejabat dan tokoh berpengaruh di berbagai wilayah, seperti al-Mughirah bin Syubah dan Ziyad bin Abihi, untuk memperoleh pengakuan masyarakat terhadap Yazid. Riwayat tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan ini melibatkan berbagai pertimbangan politik, terutama terkait kemungkinan munculnya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap penetapan Yazid sebagai penerus kekuasaan. Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat dukungan dan legitimasi bagi Yazid sebelum pengakuan tersebut diumumkan secara lebih luas.

⁵⁵ Al-Tabari, *The History of al-Tabari*, vol. 18, h. 173-186.

Dari perspektif historis, peristiwa ini menandai perubahan penting dalam sistem suksesi kepemimpinan Islam. Jika pada masa Khulafaur Rasyidin pemilihan pemimpin dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan persetujuan para tokoh umat, maka pada masa Muawiyah mulai terlihat kecenderungan penerapan sistem pewarisan kekuasaan berdasarkan hubungan keluarga. Penetapan Yazid sebagai wali al-ahd menunjukkan bahwa kepentingan menjaga stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan menjadi pertimbangan utama Muawiyah. Namun, kebijakan tersebut juga memunculkan perdebatan karena dianggap menggeser prinsip syura yang sebelumnya menjadi dasar dalam proses pemilihan khalifah.

Dengan demikian, pengangkatan Yazid sebagai penerus Muawiyah tidak hanya merupakan peristiwa pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi titik awal transformasi sistem politik Islam dari model khilafah yang berorientasi pada musyawarah menuju bentuk pemerintahan yang lebih bercorak dinasti. Peristiwa ini menunjukkan adanya perubahan dalam mekanisme suksesi kekuasaan yang sebelumnya didasarkan pada proses syura menjadi penunjukan pewaris yang telah dipersiapkan sejak masa pemerintahan penguasa yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, kebijakan Muawiyah dalam menetapkan Yazid sebagai wali al-ahd dapat dipandang sebagai salah satu perubahan penting dalam sejarah politik Islam pada masa awal perkembangan pemerintahan Bani Umayyah.

Secara keseluruhan, rangkaian dampak konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang diuraikan pada bab ini, yaitu munculnya Khawarij, terjadinya Perang Nahrawan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, penyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali, munculnya tiga golongan dalam tubuh umat Islam, bergesernya pusat kekuasaan dari Madinah ke Kufah dan kemudian ke Damaskus, hingga berubahnya

sistem pemerintahan dari syura menjadi monarki, dapat dianalisis melalui Teori Konflik Ralf Dahrendorf sebagaimana dikemukakan pada Bab I. Dalam kerangka Dahrendorf, konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan konflik distribusi otoritas antara kelompok yang mempertahankan prinsip syura dan kelompok yang mendukung konsolidasi kekuasaan Muawiyah, yang tidak terselesaikan melalui mekanisme musyawarah sehingga bereskalasi menjadi konfrontasi terbuka dan melahirkan kelompok-kelompok baru seperti Khawarij dan Syiah. Puncak dari konflik distribusi otoritas tersebut adalah dilembagakannya kekuasaan Muawiyah melalui pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai wali al-ahd, sebagaimana tercatat dalam riwayat Ath-Thabari.⁵⁶ Dengan demikian, struktur pemerintahan lama yang bertumpu pada syura tergantikan oleh struktur baru yang bertumpu pada kekuatan politik dan militer, sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan titik tolak utama transformasi sistem pemerintahan Islam pada abad VII M.

⁵⁶ Al-Tabari, *The History of al-Tabari*, vol. 18, h. 173-186.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konflik politik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan berawal dari krisis legitimasi kepemimpinan pasca wafatnya Utsman bin Affan. Meskipun Ali bin Abi Thalib telah diangkat sebagai khalifah melalui mekanisme baiat dan syura, sebagian kelompok, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan, menuntut agar pelaku pembunuhan Utsman segera diadili sebelum memberikan pengakuan penuh terhadap kepemimpinan Ali. Perbedaan pandangan mengenai prioritas penegakan qisas dan legitimasi kekuasaan tersebut berkembang menjadi konflik politik yang semakin kompleks, ditandai dengan Perang Jamal, Perang Shiffin, peristiwa tahkim, munculnya kelompok Khawarij, hingga melemahnya persatuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.
2. Konflik antara Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perubahan sistem pemerintahan Islam pada abad VII M. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan qisas yang diajukan Muawiyah tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya menegakkan keadilan ataupun semata-mata sebagai kepentingan politik, melainkan merupakan perpaduan dari kedua aspek tersebut yang berjalan secara beriringan dalam dinamika sejarah. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan melemahnya mekanisme syura sebagai dasar legitimasi politik pada masa Khulafaur Rasyidin dan membuka jalan bagi lahirnya sistem pemerintahan dinasti pada masa Bani Umayyah. Dengan demikian, konflik ini menjadi salah satu titik balik penting yang mengubah pola suksesi kepemimpinan Islam dari sistem musyawarah menuju sistem monarki hereditas yang diwariskan secara turun-temurun.

B. Saran

1. Kepada akademisi dan lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian sejarah politik Islam, khususnya mengenai dinamika konflik internal pada masa Khulafaur Rasyidin. Kajian terhadap konflik Ali bin Abi Thalib - Muawiyah bin Abi Sufyan hendaknya dipahami secara objektif berdasarkan sumber-sumber sejarah yang kredibel sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan sistem pemerintahan Islam.
2. Kepada masyarakat dan para pemerhati sejarah Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bahwa perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari dinamika sejarah yang harus disikapi secara kritis dan proporsional. Konflik yang terjadi pada masa awal Islam tidak hanya berkaitan dengan persoalan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan legitimasi, kepentingan politik, dan kondisi sosial yang kompleks, sehingga tidak tepat dipahami hanya dari satu sudut pandang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai sejarah politik Islam dengan mengkaji aspek-aspek lain yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti perbandingan konsep legitimasi kekuasaan pada masa Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah, dinamika politik pasca tahkim terhadap lahirnya berbagai kelompok politik dalam Islam, atau perkembangan sistem pemerintahan Islam pada dinasti-dinasti berikutnya. Penelitian lanjutan diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu sejarah Islam serta memberikan perspektif yang lebih luas mengenai transformasi politik dalam peradaban Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Biografi Ali bin Abi Thalib*. Terj. Muslich Taman, Akmal Burhanudin, dan Ahmad Yaman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Mu'awiyah bin Abu Sufyan: Prestasi Gemilang Selama 20 Tahun Sebagai Gubernur dan 20 Tahun Sebagai Khalifah*. Terj. Izzuddin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Ath-Thabari., Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir al-Amali. *The History of Al-Tabari: The Crisis of the Early Caliphate*. Vol. XV. Albany: State University of New York Press, 1990.
- Ath-Thabari., Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir al-Amali. *The History of Al-Tabari: The Community Divided*. Vol. XVI. Albany: State University of New York Press, 1997.
- Ath-Thabari., Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir al-Amali. *The History of Al-Tabari: The First Civil War*. Vol. XVII. Albany: State University of New York Press, 1996.
- Ath-Thabari., Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir al-Amali. *The History of Al-Tabari: Between Civil Wars: The Caliphate of Mu'awiyah*. Vol. XVIII. Albany: State University of New York Press, 1987.
- Auliaurrahman, Zulkifli Abdurrahman Usman, Usman bin Abdullah. "Dari Syura Ke Monarki: Perubahan Sistem Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Klasik Auliaurrahman1,." *JSSSR Journal Of Samudra Social Studies Research*, 2025.
- Bestari, Mochammad Ardika Akbar, A'la Abd., and Rochimah. "Dinamika Kekhalifahan Islam Bani Umayyah Di Masa Pemerintahan Muawiyah Bin Abi Sufyan (661-680 M): Pengaruh Politik , Sosial Dan Budaya." *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 1 (2024).
- Desyana Mustafa, Suraijiah. "Konsep Dan Praktik Manajemen Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *AT-TALKIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 959–76.

- Fadjar Tri Sakti. *Pengantar Ilmu Politik*. Vol. 7. Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Fisari, Dinda Harum, Rikha Amelia, and Mohamad Djasuli. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Pada Masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab" 2, no. 3 (2022).
- Haryono, Satrio Dwi. "Wacana Rasialisme Dalam Sosiologi Max Weber." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022).
- Haura Hanifah dkk. "Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Pikir, Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025).
- Herllina, Nina. *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020*. Bandung: Satya Historika, 2022.
- Hidayat, Rahmat, Daud Rasyid, Riska Ramdani, Rambang Basari, Retna Dwi Estuningtyas, Universitas Ibnu, and Chaldun Jakarta. "Peristiwa Fitnah Kubro : Sejarah Dakwah Yang Harus Diluruskan." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2025).
- Ikwal Pangsa Chaniago , Ahmad Kholil, Fadil SJ. "Politik Kekuasaan Dan Legitimasi Pada Masa Utsman Bin Affan : Kajian Historis Atas Ekspansi Dan Nepotisme Dalam Pemerintahan Islam Awal." *Jurnal Studi Islam* 03, no. 02 (2026).
- Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Kadenun. "Proses Peralihan Kekuasaan Dan Kebijaksanaan Dalam Khulafaurnasyidin" 1, no. 2 (2021).
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Madelung, Wilferd. *The Succesion to Muhamma: A Study of the Early Caliphte*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Masykuroh, Siti. "Analisis Jejaring Sosial : Nepotisme Dan Krisis Legitimasi Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan (644-656M) Social Network Analysis : Nepotism and the Crisis of Legitimacy during the Time of Caliph Uthman Bin Affan (644-656 AD)." *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 06, no. 02 (2025).
- Meri Erawati dkk. *Jejaring Teknologi Pembelajaran Ilmu Sejarah, Adat, Dan Sosial*.

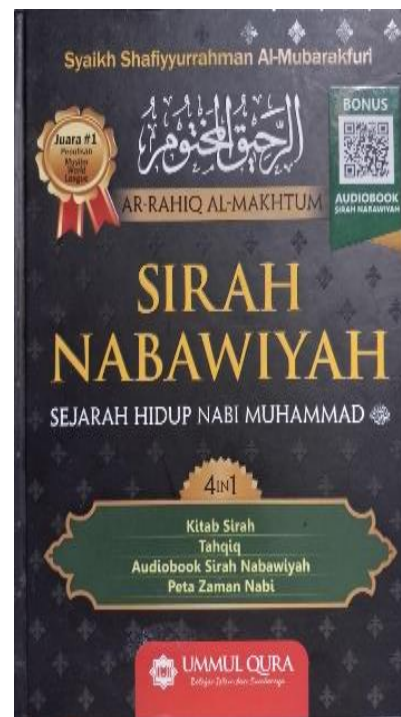
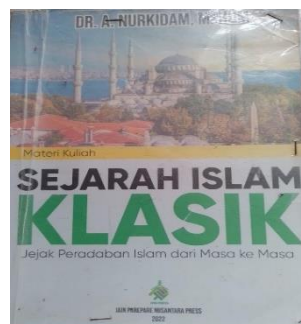
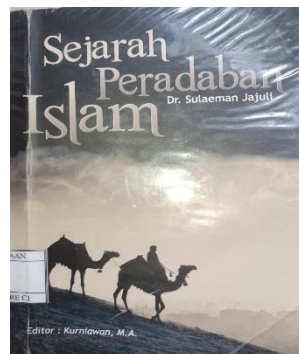
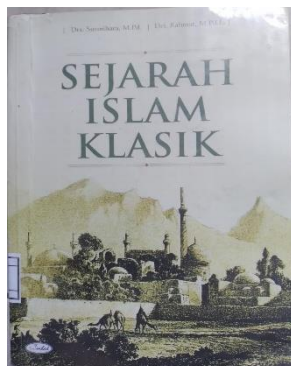
- Vol. 4. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2023.
- Muhammad Yamin Saud M. Saleh S. Ali, Eymal B. Demmallino. *Teori-Teori Sosial Dan Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Perencanaan*. Balikpapan: CV. Azizah Publishing, 2020.
- Mukaromah, Lisa Aminatul. "Perkembangan Ekonomi Islam Era Klasik (Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah)." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2020): 66–82.
- Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Chicago: The University of Chicago Press, 1974).
- Musyarif, "Politik Suksesi Dari Abu Bakar Hingga Ali: Konflik, Demokrasi Awal, Dan Warisan Bagi Dunia Islam Modern" (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2026).
- Mustofa, Agus. *Perlukah Negara Islam*. Surabaya: Padma Press, 2010.
- Nasrudin, Nina Nursari. *Pengantar Sosiologi (Teori, Realitas, Dan Transformasi Sosial Di Abad 21)*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025.
- Musyrifah Susanto, "*Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*" (Jakarta: Kencana, 2003).
- Noor, Muhammad, Muhammad Husni, and Muhammad Iqbal. "Structuration in the Leadership of Caliph Ali Bin Talib Strukturasi Dalam Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Thalib." *Syams : Jurnal Studi Keislaman* 3, no. November (2022).
- Nurkidam, "*Sejarah Islam Klasik Jejak Peradaban Islam dari Masa ke Masa*" (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).
- Rahmadhani, Febri. "Al-Fitnah Al-Kubra Roots Sectarianism In Islam." *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman P-ISSN: 22*, no. 1 (2024).
- Ramzar, Adelia, Muhammad Hidayat Harahap, Tengku Najib, Ahmad Kamil, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Sumatera Utara, et al. "Pemikiran Politik Pada Masa Khulafaurrasyidin." *Jurnal Ilmiah Multidispilin Ilmu* 2, no. 2 (2025).
- Rusdi, M. *Dinamika Sosial Masyarakat Desa*. Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi, 2020.
- Saepuloh, Eep, Ganda Priatna Satmita, Gine Insan Permata, M Tajudin Zuhri, Nenden

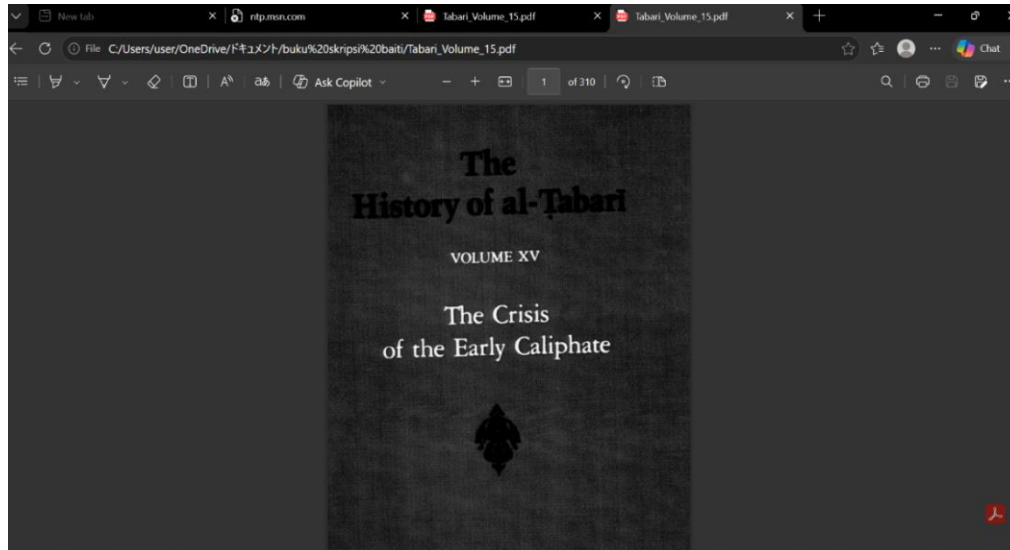
- Munawaroh, Universitas Garut, Peradaban Islam, and Nabi Muhammad Saw. "Pemikiran Dan Peradaban: Arab Pra-Islam Dan Munculnya Peradaban Pada Masa Nabi Muhammad Saw." *Jurnal Transformasi Pendidikan Berkelanjutan* 6, no. 2 (2025).
- Sekarwangi, Kurniati, and Yusril. "Peran Pemimpin Dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam The Role of Leaders in Handling National Security Conflicts: An Islamic Political Ethics Perspective." *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024).
- Selviana, Syamzan Syukur, Rahmawati. "Latar Belakang Terjadinya Perang Jamal Dan Perang" 3, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12597874>.
- Shofiyya Mawaddah, Imam Ibnu Hajar, Wasid. "Teori Konflik Kekuasaan Dan Dinamika Politik Di Indonesia." *Qurthuba: The Journal History and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2024).
- Societies, Muslim, Ghassani Marisa Hasibuan, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Habibatul Qalbi, Universitas Islam, Negeri Sumatera, et al. "Konsep Demokrasi Dalam Perspektif Islam Dan Barat." *Al-Bayan Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 01 (2025).
- Swari, Puspita Rani. "Budaya Patriarki Dan Tantangan Dalam Kebebasan Berepresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf)." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023).
- Susmihara, Rahmat "Sejarah Islam Klasik" (Makassar: Ombak, 2013). h. 85-86.
- Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiq Al-Makhtum Bahtsun fis Siratin Nabawiyyati ala Shahibiha Afdhalus Shalati wa Sallam, ter. Agus Suwandi (Jakarta: Ummul Qura 2011).
- Sulaeman Jajuli, "Sejarah Peradaban Islam" (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Wahyuni, Sri, Afni Raisya Lestari, and Zuhri Mulyani, Mela. "Sejarah Kepemimpinan Utsman Bin Affan : Analisis Peranannya Dalam Perkembangan Peradaban Islam History of the Leadership of Uthman Bin Affan : Analysis of His Role in the Development of Islamic Civilization." *ARJI Action Research Journal Indonesia* 7,

no. 2 (2025).

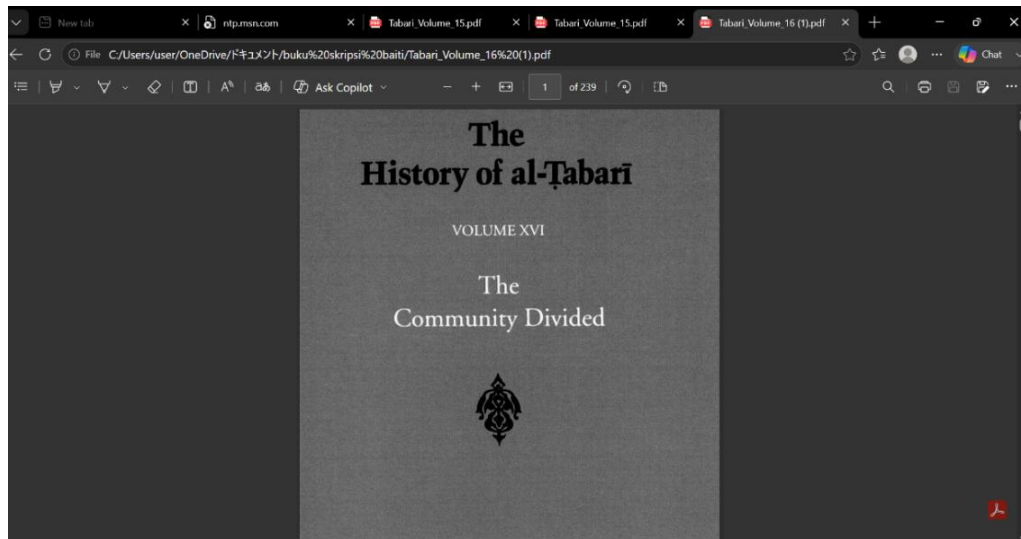
LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Buku Fisik

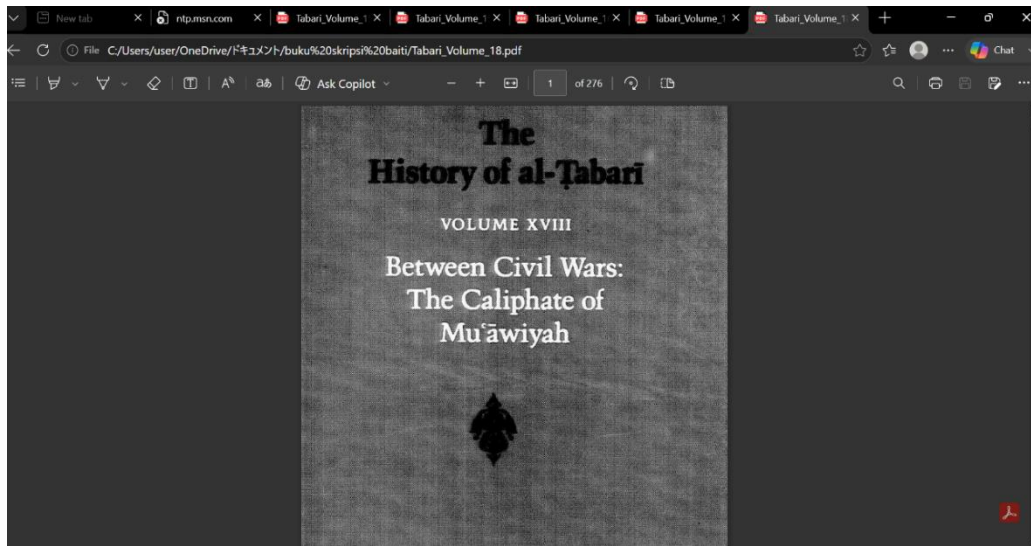




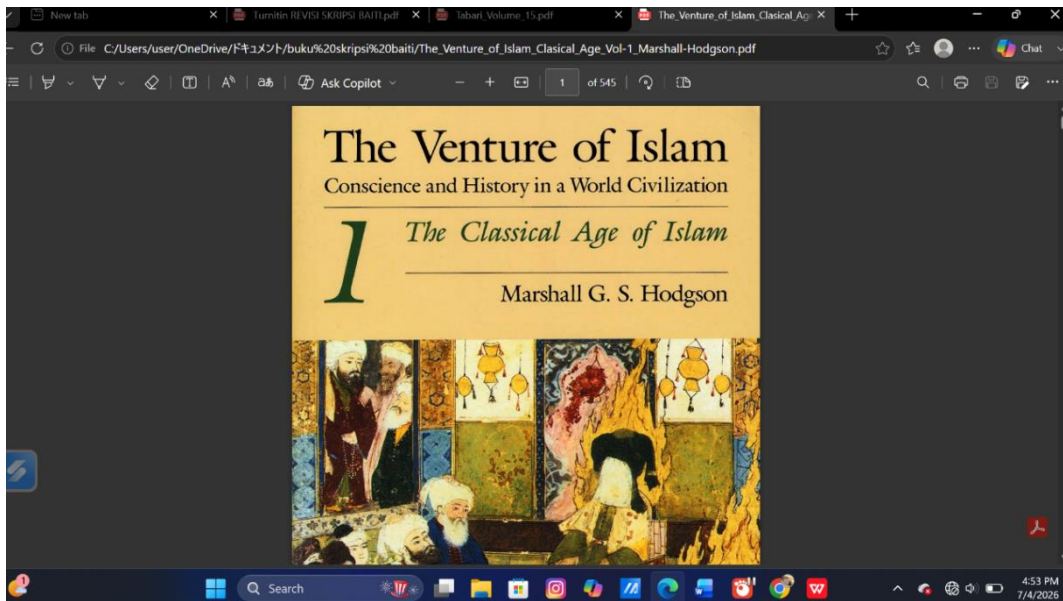
<https://drive.google.com/file/d/1zqfTDmA858uGhO1jK9p8J35sS6DAXWFf/view?usp=drivesdk>



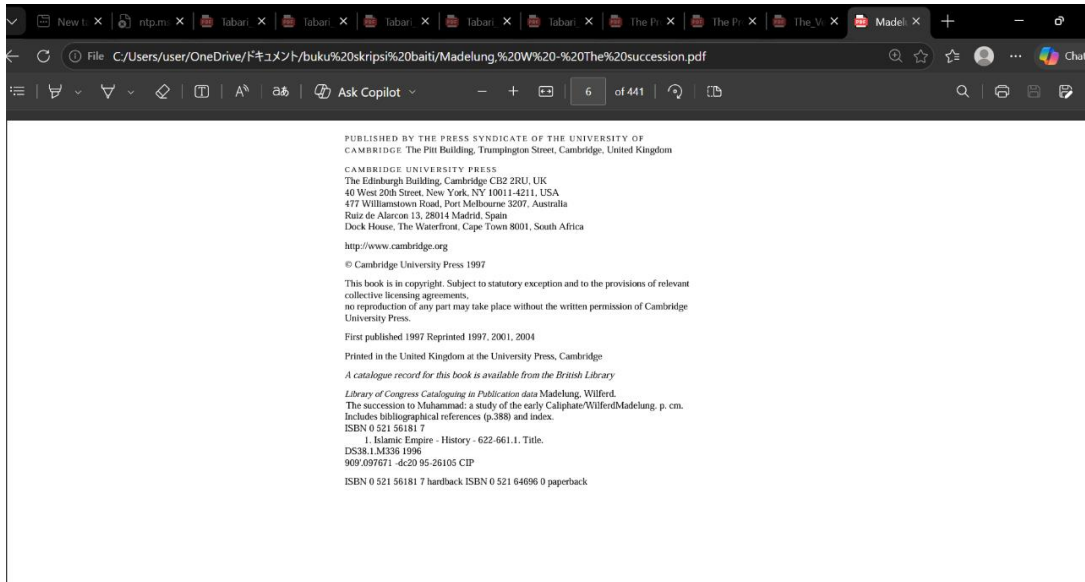
<https://drive.google.com/file/d/1Dsx-yt4S3rBUV8gTiJH6H-ncvMMBZiXE/view?usp=drivesdk>



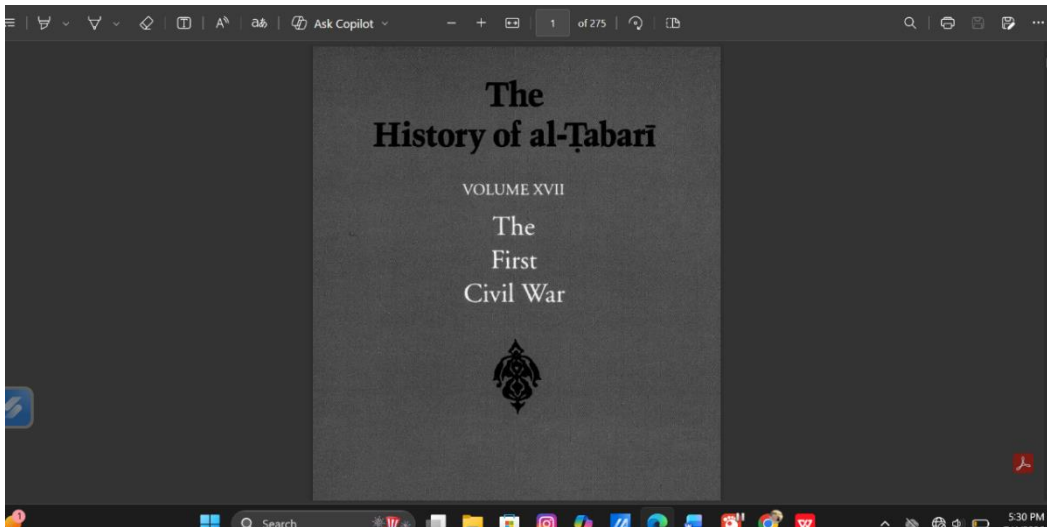
https://drive.google.com/file/d/14FdU_7_RXH4tR1WaoXXYhv8M-qcN4wXO/view?usp=drivesdk



<https://drive.google.com/file/d/1Lt3or8lDoReOQlszdd8jpfXDnVl5dXOn/view?usp=drivesdk>

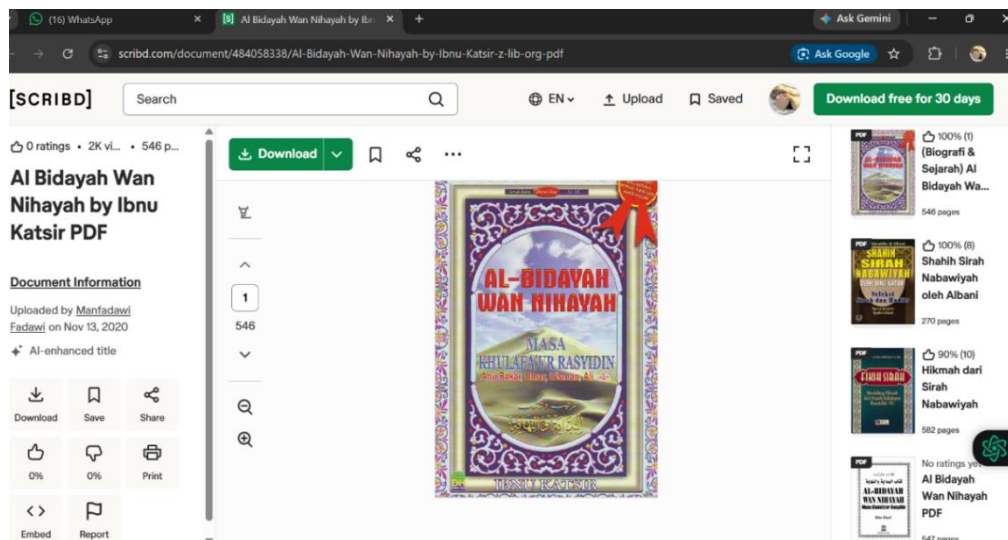


https://drive.google.com/file/d/1pxEFI7ok_hVjjZLnt7PxprKU1rDrX0fa/view?usp=drivesdk



<https://drive.google.com/file/d/1PAqWru9tnWjGsPNcliRu23rxSBzVwMzf/view?usp=drivesdk>

[Al](#)



[Bidayah Wan Nihayah by Ibnu Katsir PDF | PDF](https://id.scribd.com/document/484058338/Al-Bidayah-Wan-Nihayah-by-Ibnu-Katsir-z-lib-org-pdf)
<https://id.scribd.com/document/484058338/Al-Bidayah-Wan-Nihayah-by-Ibnu-Katsir-z-lib-org-pdf>



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-1254/in.39/FUAD.03/PP.00.09/05/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAAREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 28 Mei 2025 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 1254 Tahun 2025, tanggal 28 Mei 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Usman, M.Hum.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : NURBAITI
NIM : 2220203880230011
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Judul Penelitian : PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA ALI MUAWIYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 28 Mei 2025

Dekan.



Dr. Muhiddin, Lc., M.Fil.
NIP 197607132009121002

BIODATA PENULIS



NURBAITI, Lahir di Salupangi pada tanggal 11 Agustus 2004. Penulis merupakan anak dari Bapak Badaruddin dan Ibu Nurmiati.

Penulis memulai pendidikan di TK PGRI Salupangi pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres Salupangi pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2016. Jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dilanjutkan di MTsN 1 Mamuju pada tahun 2016 dan tamat pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Mamuju pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare melalui jalur SPAN-PTKIN. Penulis mengambil program studi Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat utama dalam meraih gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.) pada program S1 IAIN Parepare dengan judul “DINAMIKA KONFLIK POLITIK ALI BIN ABI THALIB – MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN TERHADAP PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM ABAD VII M”.

TURNITIN



Page 2 of 169 - Integrity Overview

Submission ID: tm:oid:1:3605698027

21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 21% Internet sources
- 3% Publications
- 4% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Page 2 of 169 - Integrity Overview

Submission ID: tm:oid:1:3605698027